



BERITA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



BULAN MARET

TAHUN 2023

KLIPING KORAN



**Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang Telp. (0751) 7057391 - 705753
Fax. (0751) 7059328 Padang 25133, Sumatera Barat**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	JUMAT, 31 MARET 2023	9

Jangan Sampai Terjerumus Maksiat

Suwirpen Suib: Orang Tua harus Perhatikan Anak-anaknya

Padang, Rakyat Sumbar — Wakil ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, mengingatkan masyarakat provinsi setempat tidak terjerumus kenakakan remaja seperti wudhan dan penyakit masyarakat (Pekat). Oleh sebab itu, masyarakat harus membentengi diri dengan pendidikan agama.

"Zaman semakin canggih, para orang tua senantiasa memperhatikan anak-anak mereka supaya tidak terjerumus pada perbuatan maksiat," kata Suwirpen Suib, Safari Ramadan Masjid Baitul Makmur Kuranji, Padang, Rabu (29/3) malam.

Ia melanjutkan, karena perkembangan teknologi zaman sudah semakin canggih, sehingga sudah mengakses segala sesuatu yang tersedia di dalam teknologi tersebut.

"Para orang tua harus menawasi anak-anak mereka, karena dampak buruk dari teknologi itu sudah dapat merusak kehidupan

dan masa depan mereka," ucap Suwirpen.

Menurut Suwirpen Suib, untuk membentengi diri dari pengaruh buruk perkembangan teknologi zaman, maka masyarakat harus meningkatkan pendidikan agama dengan cara lebih banyak beribadah di masjid.

"Fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pusat pendidikan agama," ungkap Suwirpen.

Ia menekankan, masjid merupakan pusat segala kegiatan umat Islam. Oleh karena itu, jangan pernah alergi terhadap masjid, tetapi meramaikan masjid dengan melaksanakan kegiatan keagamaan demi meningkatkan keimanan.

"Di dalam ayat Alquran menyebutkan fungsi masjid adalah sebagai tempat yang didalamnya banyak menyebut nama Allah SWT, yakni tempat bertakaf,



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid Baitul Makmur Kuranji, Padang, saat Safari Ramadan, Rabu (29/3) malam.

beribadah, pusat pertemuan Islam untuk membicarakan urusan hidup dan perjuangan," tuturnya.

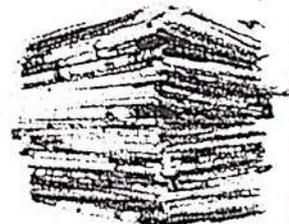
Selain itu sambung Suwirpen Suib, masyarakat mesti mempererat silaturahmi, terutama pada Ramadan, sehingga saling membantu, menjaga kerukunan bermasyarakat serta membantu warga yang kurang mampu.

"Allah SWT akan melipat gandakan pahala kita, apabila kita melakukan suatu kebaikan terhadap sesama, teruma di bulan

puasa Ramadan ini, karena bulan Ramadhan adalah bulan penuh hikmah," sebut Suwirpen.

Suwirpen juga menyerahkan bantuan Rp50 juta untuk Masjid Baitul Makmur. Bantuan tersebut untuk renovasi dan keperluan masjid itu.

"Manfaatkan bantuan ini secara maksimal, agar Masjid Baitul Makmur ini semakin bagus dan indah, sehingga jamaah banyak yang beribadah di sini," tutup Suwirpen. (byr)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
PADANG	JUMAT, 31 MARET 2023	6

PARIWARA DPRD SUMBAR



WAKIL KETUA DPRD SUMBAR SUWIRPEN SUIB:

Orang Tua Harus Berperan Aktif Dididik Anak, Agar tak Terjerumus dalam Masalah Sosial

PADANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Suwirpen Suib, mengimbau orang tua untuk memainkan peran aktif dalam mengontrol perilaku anak-anak mereka agar terhindar dari perilaku negatif, termasuk tawuran yang telah meresahkan masyarakat.

"Pola mendidik anak pada saat ini berbeda dengan dahulu, dan banyak ancaman bagi generasi muda untuk terjerumus dalam perilaku negatif. Oleh karena itu, peran orang tua sangat diperlukan dalam membawa masa depan yang baik bagi anak-anak mereka," sebut Suwirpen Suib saat Safari Ramadan di Masjid Baitul Makmur Pelembing, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Rabu (29/3). Suwirpen berharap generasi muda tidak terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti tawuran dan penyalahgunaan narkoba karena dapat mengancam masa depan mereka. Persaingan masa depan semakin ketat, ujar Suwirpen mengingatkan untuk tidak jadi budak di negeri sendiri nantinya. Dia menyarankan untuk mencari teman dan lingkungan yang dapat membimbing pada kegiatan positif, serta meminta orang tua untuk mencari pembina kepada anak-anak mereka jika mereka tidak berada di rumah hingga malam. Suwirpen juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan masjid sebagai tempat melalui banyak kegiatan positif, seperti tempat belajar agama, berdiskusi tentang pengetahuan, merancang aksi sosial yang bermanfaat. Dia juga mengajak seluruh pihak untuk melakukan langkah-langkah antisipatif agar generasi tidak terjerumus. Dengan menghabiskan waktu untuk kegiatan di masjid, peluang rumus ke dalam masalah tersebut menjadi lebih baik dan pembinaan mental spiritual generasi semakin maksimal.

mur Perumas Balimbing, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Suwirpen menyerahkan bantuan dari Pemprov Sumbar senilai Rp50 juta untuk menunjang operasional masjid serta melanjutkan pembangunan fasilitas dan kegiatan lainnya sebagai bentuk motivasi pemerintah kepada kegiatan keagamaan masyarakat. Kondisi maraknya tawuran juga menjadi perhatian Yandra, Camat Kuranji, yang turut hadir dalam acara tersebut. Yandra mengungkapkan, bahwa tawuran sudah mencapai wilayah Kuranji dan bahkan terjadi di depan Makam Pahlawan Kuranji. Oleh karena itu, Yandra mengingatkan masyarakat untuk lebih menjaga keamanan lingkungan bersama-sama. (*)



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib.



KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
PADANG	JUMAT, 31 MARET 2023	6

Puluhan Mahasiswa Aliansi BEM-SI Tolak UU Cipta Kerja

PADANG, KP - Puluhan mahasiswa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) melakukan aksi di kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (30/3) untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan.

Aliansi BEM-SI mendesak DPR RI untuk mencabut Perpu Cipta Kerja dan DPRD Sumbar menolak Perpu Cipta Kerja baik secara formil maupun materil. Mereka juga mendesak Presiden dan DPR RI untuk menghentikan segala bentuk pembangkangan konstitusi dan pengkhianatan kepada rakyat.

Meskipun diguyur hujan deras, mahasiswa tetap semangat untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan membawa replika keranda mayat bertuliskan "Telah berpulang ke Rahmatullah Hati Nurani DPR". Mahasiswa menolak Perpu Cipta Kerja dan meminta segera dicabut.

Kortap aksi unjuk rasa, Sahji Rinaldi menyampaikan bahwa Perpu Cipta Kerja akan berdampak buruk kepada buruh-buruh di Indonesia, terutama dalam segi perizinan.

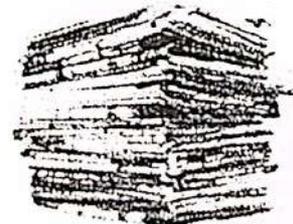
Sahji menyatakan, bahwa Perpu Cipta Kerja adalah copy paste dari Undang-Undang Cipta Kerja yang cacat secara formil maupun materil. Aliansi BEM-SI meminta kepada DPRD Sumbar untuk bersama-sama mendesak DPR RI mencabut Perpu Cipta Kerja tersebut.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengapresiasi semangat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat meskipun diguyur hujan deras.

Supardi menambahkan bahwa penolakan mahasiswa atas Perpu Cipta Kerja merupakan wewenang pemerintah pusat, namun DPRD Sumbar akan berupaya untuk meneruskan aspirasi ini ke pusat. (fai)



PULUHAN mahasiswa dari aliansi BEM-SI melakukan aksi di kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (30/3).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	JUM'AT, 31 MARET 2023	3

Kunjungi DPRD Sumbar

Komisi I DPRD Agam Sharing Aturan Pengawasan Izin Pertambangan

ANG, METRO
omisi I DPRD Kabu-
i Agam melakukan
ngan kerja ke DPRD
ar. Kunjungan terse-
alam rangka menam-
eferensi dan sharing
t Pengawasan DPRD
terhadap penerbitan
saha pertambangan.
(29/03).

datangan Rombon-
omis I DPRD Kabu-
Agam, diterima Sek-
DPRD Sumbar, Raf-
di ruang kerjanya.
flis menerangkan
pertanyaan komisi
D Kabupaten Agam,
dengan aturan ber-
i provinsi Sumatera
dan mengacu pada
lainnya, termasuk
ran pusat.

lah satu fungsi dew-
alah pengawasan,
iuk juga pengawa-
hadap penerbitan
aha pertambangan,
mat perlu membuat
yang bisa dilaksan-
ara bersama-sama,
ya mengacu pada
lebih tinggi, term-
an dan edaran dari
tah pusat," terang

is juga menerang-
gaimana masyara-
mengupload den-
dah semua aturan,
a tidak terjadi ke-
haman dalam me-
kannya.



MENERIMA— Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar H. Raflis, menerima Kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Agam.

"Kita di DPRD Sumbar memiliki berbagai program yang gunanya untuk masyarakat mudah mengakses semua produk hukum termasuk perda, sehingga kita mudah melakukan pengawasan terhadap

stakeholder terkait," papar Raflis yang baru saja pulang memberikan keterangan pada KI Pusat karena masuk nominasi keterbukaab informasi nasional.

Ketika ditanya rombongan mengenai dasar hukum pengawasan perizinan tambang, Raflis dengan tegas mengatakan, semua mengacu pada peraturan daerah pusat, karena masalah tambang bukan masalah sepele, maka perlu barometer ketat.

"Pengawasan terhadap izin tambang bukan masalah ringan, apa lagi yangkut pada lingkungan dan efek pada orang banyak, maka perlu barometer dan pegangan hukum yang kuat," tegas Raflis lagi.

Ia juga memberikan beberapa dokumen sekaitan dengan maksud kunjungan komisi I DPRD Agam, termasuk peraturan daerah provinsi Sumatera Barat.

Sekaitan dengan kun-

jungan tersebut, ketua komisi I DPRD Agam mengatakan amat puas dan bangga bisa diterima dengan baik di DPRD Sumbar.

"Kami merasa senang dan bangga atas pelayanan yang diberikan pak Sekwan pada rombongan, dan semua maksud kami tercapai, karena bisa membawa beberapa berkas untuk dijadikan acuan nantinya di kabupaten Agam," terangnya sambil tersenyum.(hsb)



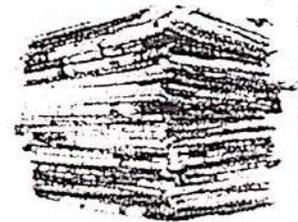
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA



ASA— Ketua DPRD Sumbar Supardi menanggapi aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Sumatera Barat terkait penolakan Perppu Cipta Kerja.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Haluan	JUMAT, 31 MARET 2023 9 Ramadan 1444 H	/

UU CIPTAKER DISAHKAN

BEM SI Tuding Pem erintah KHIANATI RAKYAT

PADANG, HALUAN
— Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Sumbar menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPRD Sumbar Kamis (30/3) sore.

Dalam aksi unjuk rasa saat ini, massa aksi menuding mayoritas fraksi partai yang ada di DPR RI sebagai pengkhianat rakyat lantaran telah mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR RI Selasa lalu.

Pantauan *Haluan*, aksi tersebut berlangsung di bawah hujan deras yang turun kitar pukul 15.20 WIB. Ker

ti di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian, aksi demonstrasi saat itu berjalan dengan lancar, aman dan tertib.

Mereka tampak mengunyah sebuah replika keranda ayat berwarna putih yang tulisi dengan kalimat "Telah berpulang Ke Rahmatullah atau Nurani DPR RI". Selain itu mereka juga membentangkan sebuah spanduk yang berisi sindiran kepada Ketua

DPR RI, Puan Maharani. "Puan Bukan Sembarang Perempuan," tertulis dengan cat pilox warna merah dalam salah satu spanduk terbesar yang diusung para demonstran.

"Pengesahan Undang-undang Ciptakerja telah membuktikan bahwa DPR tidak lagi berpihak kepada rakyat. Nyatanya mereka hanyalah sekum-

pulan perpanjangan tangan dari para Oligarki," ujar Menteri Kebijakan Nasional BEM KM UNAND, Sahji Rinaldi, dalam orasinya.

Ia melanjutkan, Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu yang lalu itu, merupakan suatu produk hukum yang cacat formil. Bahkan menurutnya Mahkamah Konstitusi (MK) sempat menyatakan UU Ciptaker Inkonstitusional murni.

"Namun, bukannya memperbaiki, mengikuti, taat dan patuh kepada putusan MK, mereka malah menerbitkan Perppu yang isinya bahkan tidak jauh berbeda dengan produk hukum yang telah dinyatakan MK Inkonstitusional itu," tegasnya.

Sahji menilai, pengesahan UU Cipta Kerja akan berdampak terhadap aspek perburuhan, lingkungan hingga masyarakat kecil. Dijelaskannya, dengan disahkannya UU Cipta Kerja, negara seolah menggelar karpet merah bagi para investor dengan memberikan berbagai kemudahan.

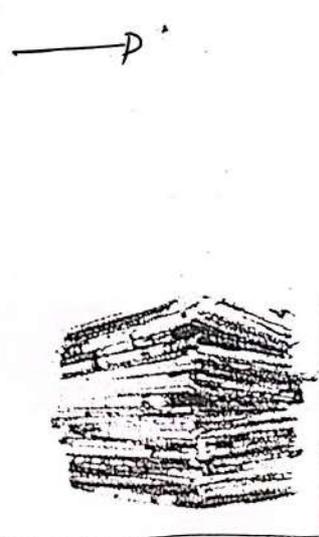
Namun sayangnya, kemudahan tersebut malah berpotensi mengeksploitasi buruh sebagai tenaga kerja, merusak lingkungan dan hanya akan semakin meminggirkan masyarakat kecil yang pasti akan merasakan dampak buruk dari suatu aktivitas pembangunan maupun investasi.

"UU Cipta Kerja ini merubah dan semakin mempermudah mekanisme perizinan bagi investor, UU ini menyederhanakan atau bahkan

menghilangkan perizinan yang penting bagi lingkungan seperti AMDAL. Jadi Kedepannya UU Ciptaker ini akan menyebabkan masalah yang lebih kompleks," ungkapnya.

Sementara pada bidang perburuhan, lanjut Sahji, UU Ciptaker berpotensi semakin menyengsarakan kaum buruh. Dimana menurutnya dengan berlakunya UU yang telah menimbulkan pro kontra sejak masih berbentuk RUU Ini, banyak kerugian yang akan dialami para pekerja.

"Ini akan menambah kerumitan mengenai *outsourcing*, alih daya, jam kerja, kontrak pekerja, upah minimum dan lain sebagainya. Intinya aturan hukum ini tidak memiliki asas kebermanfaatan dan malah akan menyengsarakan





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Haluan Membudayakan Kehidupan Masyarakat	JUMAT, 31 MARET 2023 9 Ramadan 1444 H	9.

SAFARI RAMADAN DI BELIMBING KOTA PADANG

Wakil Ketua DPRD Sumbar Ajak Orang Tua Awasi Perilaku Anak

PADANG, HALUAN- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Suwirpen Suib mengajak orang tua berperan aktif mengawasi dan mengontrol perilaku anak. Hal ini agar anak terhindar dari perbuatan negatif, salah satunya seperti aksi tawuran yang sering meresahkan masyarakat.

"Pola mendidik anak pada saat sekarang berbeda dengan dahulu, banyak hal yang mengancam generasi muda terjerumus pada perilaku negatif. Peran orang tua sangat diperlukan untuk menghadirkan masa depan yang cerah pada anak-anaknya," kata Suwirpen saat Safari Ramadan di Masjid Baitul Makmur Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Rabu (29/3).

Dia berharap generasi muda tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang meresahkan, seperti tawuran dan penyalahgunaan narkoba. Jika telah terpapar, ancamannya adalah kehilangan masa depan yang cerah. Ia mengatakan, persaingan kedepan semakin ketat,

jangan sampai generasi masa depan bangsa ini jadi budak di negeri sendiri.

"Jadi carilah teman serta lingkungan yang bisa menuntun kita pada kebaikan, jadi orang tua kalau anaknya tidak di rumah memasuki larut malam, tolong dicari dan berikan pembinaan," kata Suwirpen.

Dia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan masjid sebagai tempat melakukan

banyak kegiatan positif, bukan sekedar tempat ibadah saja, namun juga tempat belajar ilmu agama, berdiskusi tentang berbagai pengetahuan dan merancang berbagai aksi sosial yang bermanfaat.

"Jangan alergi dengan masjid, jadikan tempat ini sebagai

penjalin silaturahmi, serta berlomba-lomba dalam kebaikan," katanya.

Lebih lanjut ia mengajak seluruh pihak hendaknya dapat melakukan langkah-langkah antisipatif agar remaja tidak terjerumus dengan perbuatan yang melanggar norma. Dengan menghabiskan banyak waktu untuk kegiatan di masjid, peluang terjerumus ke dalam masalah-masalah tersebut menjadi kecil dan pembinaan mental spritual generasi muda semakin maksimal.

Dalam safari Ramadan tersebut, Suwirpen menyerahkan bantuan dari Pemprov Sumbar sebesar Rp50 juta untuk Masjid Baitul Makmur. Bantuan ditujukan untuk menunjang operasional masjid serta melanjutkan pembangunan fasilitas dan kegiatan lainnya

sebagai bentuk motivasi pemerintah kepada kegiatan keagamaan masyarakat.

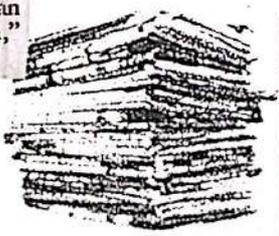
Kondisi maraknya tawuran

saat ini juga mendapat sorotan Camat Kuranji, Yandra yang turut hadir mendampingi Suwirpen Suib.

Yandra mengungkapkan,

tawuran sudah sampai ke wilayah Kuranji. Ia menuturkan, beberapa waktu lalu tawuran bahkan pecah di depan Makam Pahlawan Kuranji.

"Kejadian ini harus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih menjaga keamanan lingkungan kita bersama," ucapnya. (adv)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA



5/11/2018 10:11:11



KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	JUMAT 31 MARET 2023 JUMAT 8 RAMADHAN 1444 H	10

TOLAK PERPU CIPTA KERJA

Ratusan Mahasiswa "Kepung" Gedung DPRD Sumbar

Padang, Khazanah - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Sumbar, "kepung" gedung DPRD Sumbar di Jalan Khatib Sulaiman Padang menolak dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja, Kamis (30/3).

Di bawah guyuran hujan deras, para mahasiswa tersebut tetap bersemangat menyampaikan aspirasi mereka sambil membawa replika keranda mayat bertuliskan "Telah berpulang ke Rahmatullah Hati Nurani DPR". Mereka sepakat menolak dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja dan meminta untuk segera dicabut.

Korlap aksi unjuk rasa, Sahji Rinaldi menyampaikan, dengan telah dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja tersebut akan berdampak buruk kepada buruh-buruh di Indonesia.

"Salah satunya yaitu dari segi perizinan, karena dalam perpu itu izin usaha akan dipermudah, tentunya akan menjadi angin segar bagi investor untuk membuka usaha. Dan itu menurut kami akan berdampak buruk nantinya terhadap lingkungan," kata Sahji.

Menurut Sahji, Perpu Cipta Kerja yang baru saja dikeluarkan itu merupakan copy paste atau salinan dari Undang-undang Cipta Kerja yang cacat secara

Formil maupun Materil.

"Oleh sebab itu kami dari Aliansi BEM- SI meminta kepada DPRD Sumbar untuk bersama-sama mendesak DPR RI mencabut Perpu Cipta Kerja tersebut," ujarnya.

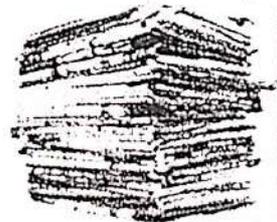
Tidak lama menunggu, Ketua DPRD Sumbar, Supardi langsung keluar menemui para pengunjung rasa tersebut didampingi anggota DPRD Sumbar Afrizal.

Pada kesempatan itu Supardi mengapresiasi semangat mahasiswa untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat meskipun diguyur hujan deras.

"Kita sangat apresiasi terhadap adik-adik mahasiswa ini, meski hujan deras tetap semangat berjuang untuk bangsa dan negara. Saya pastikan aksi kali ini adalah murni tanpa diboncengi oleh kepentingan-kepentingan pihak manapun," ucap Supardi.

Supardi menambahkan, mengenai penolakan mahasiswa atas Perpu Cipta Kerja tersebut, itu merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun demikian, kami DPRD Sumbar pastinya akan berupaya untuk meneruskan aspirasi ini ke pusat.

"Jadi adik-adik mahasiswa, nanti coba dibuat secara tertulis apa yang menjadi keluhan terkait Perpu Cipta Kerja ini, dan kirimkan ke DPRD Sumbar. Setelah itu akan kami teruskan ke pusat," ucap Supardi. n jer





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	JUMAT 31 MARET 2023	3

Sekretariat DPRD Berpeluang Raih Anugerah Tinarbuka

RASA optimisme meraih hasil terbaik terpancar di wajah Sekwan DPRD Sumbar Rafli bersama jajaran Sekretariat DPRD Sumbar. Menyusul masuknya Sekretariat DPRD Sumbar dalam tiga badan publik dari Sumbar yang mengikuti tahapan uji kepatutan untuk Anugerah TinarBuka dalam rangka peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) Tahun 2023.

"Insya Allah, kita siap menghadapi panelis pada uji kepatutan Anugerah TinarBuka yang digelar di Serpong Tangerang Banten," ujar Sekwan DPRD Sumbar Rafli, di Jakarta, Senin (27/3) lalu. Sebelum berangkat untuk uji kepatutan, Rafli beserta jajaran PPID DPRD Sumbar menghadap pada Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Ketua DPRD Sumbar Supardi.

Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar berkeyakinan Sekretariat DPRD Sumbar bisa meraih hasil terbaik dalam TinarBuka ini. "Saya

yakin dengan berbagai program inovasi keterbukaan yang telah dilaksanakan sekretariat DPRD Sumbar, menjadi nilai plus untuk meraih yang terbaik dalam TinarBuka tahun ini," ujar Mahyeldi.

Ketua DPRD Sumbar Supardi menyebut, selama ini apapun program dan kegiatan lembaga tersebut selalu mudah diakses informasinya oleh publik. "Tetap semangat, kita yakin akan mendapat yang terbaik, karena DPRD Sumbar sudah terbuka. Selama ini sudah banyak program dan terobosan keterbukaan, maka saya yakin Sekwan dan jajaran akan mampu memberikan keterangan terbaik pada tim penilaian TinarBuka," kata Supardi.

Sekwan DPRD Sumbar tercatat di monitoring evaluasi KI Sumbar berpredikat informatif dua kali berturut-turut dan menjadi satu-satu OPD Sekwan DPRD se-Indonesia yang menjadi nominasi Anugerah TinarBuka. "Ya dari kategori OPD

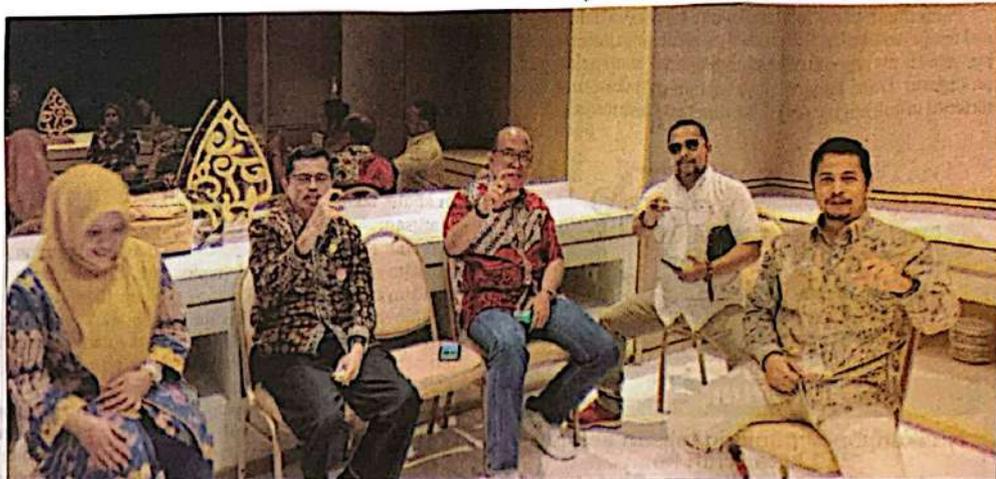
atau SKPD, Sekwan DPRD Sumbar satu-satunya Sekwan se-Indonesia masuk nominasi TinarBuka 2023 ini," ujar Kabag Persidangan Setwan DPRD Sumbar Zardi Syahrir bersama Pelaksana pengelola PPID Pelaksana Setwan DPRD Sumbar, Idris.

Anugerah TinarBuka 2023 adalah penghargaan pertama dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Publik. "Ini (Anugerah TinarBuka 2023, red) perdana yang merupakan anugerah struktural tentang keterbukaan informasi publik, Anugerah TinarBuka ini pada uji kepatutan adalah kolaborasi KI Pusat bersama kementerian seperti Kemenko Polhukam, Bapenas dan Kemenpan RB," ujar Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoto.

Selain Sekretariat DPRD Sumbar masuk kategori organisasi perangkat daerah, juga masuk seleksi Bawaslu Sumbar untuk kategori badan publik penyelenggara pemilu dan Fadly Amran

kategori kepala daerah. Anugerah TinarBuka sendiri diserahkan Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional di Kampar pada 4 Mei mendatang.

Tim Penguji Anugerah TinarBuka terdiri dari Kemenkopolhukam, MenPAN-RB dan Mendagri RI, serta dua komisioner pusat dengan ketua Tim Penilai Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandiyudha. Selain itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi juga hadir. (*)



KEBERSAMAAN: Sekwan DPRD Sumbar Rafli bersama Ketua DPRD Sumbar Supardi, Ketua KI Sumbar Noval Wiska, Komisioner KI Adrian Tuswandi dan lainnya.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA

HALAMAN



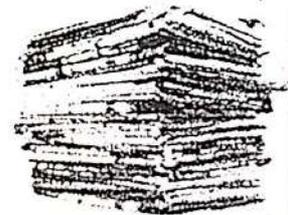
WAN DPRD Sumbar Rafli bersama komisioner KI Sumbar dan lainnya.



SEKWAN DPRD Sumbar Rafli memaparkan pokok-pokok pemikirannya.



SEKWAN DPRD Sumbar Rafli bersama Ketua DPRD Sumbar Supardi, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska dan lainnya.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Jumat, 31 Maret 2023 (9 Ramadhan 1444 H)	20.



MENYERAHKAN

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib saat menyerahkan bantuan pada pengurus masjid Baitul Makmur Perumas Balimbing, Kuranji, Padang, Rabu (29/3) malam dalam rangka safari Ramadhan. (ist)

Wakil Ketua DPRD Sumbar Ajak Orang Tua Kontrol Anak

PADANG - SINGGALANG

Saat agenda safari Ramadhan di Masjid Baitul Makmur Perumas Balimbing, Kuranji, Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib mengajak orang tua berperan aktif mengontrol perilaku anak agar terhindar dari perbuatan negatif, salah satunya aksi tawuran yang telah meresahkan masyarakat.

"Pola mendidik anak pada saat sekarang berbeda dengan dulu, banyak hal yang mengancam generasi muda terjerumus pada perilaku negatif. Peran orang tua sangat diperlukan untuk menghadirkan masa depan yang cerah pada anak-anaknya," kata Suwirpen

saat memberikan sambutan, Rabu malam (29/3).

Dia berharap generasi muda tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang meresahkan, seperti tawuran dan penyalahgunaan narkotika. Jika telah terpapar, ancamannya adalah kehilangan masa depan yang cerah. Persaingan kedepan semakin ketat, jangan sampai jadi budak di negeri sendiri nantinya.

"Jadi carilah teman serta lingkungan yang bisa menunjang kita pada kebaikan, jadi orang tua kalau anaknya tidak di rumah memasuki larut malam, tolong dicari dan berikan pembinaan," kata Suwirpen.

Dia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan masjid sebagai tempat melakukan banyak kegiatan positif, bukan sekadar tempat ibadah saja,

namun juga tempat belajar ilmu agama, berdiskusi tentang berbagai pengetahuan dan merancang berbagai aksi sosial yang bermanfaat.

"Jangan alergi dengan masjid, jadikan tempat ini sebagai penjalih silaturahmi, serta berlomba-lomba dalam kebaikan," katanya.

Dia mengajak seluruh pihak hendaknya dapat melakukan langkah-langkah antisipatif agar remaja tidak terjerumus. Dengan menghabiskan banyak waktu untuk kegiatan di masjid, peluang terjerumus ke dalam masalah-masalah tersebut menjadi kecil dan pembinaan mental spritual generasi muda semakin maksimal.

Dalam safari Ramadhan tersebut, Suwirpen menyerahkan bantuan dari Pemprov

Sumbar Rp50 juta untuk Masjid Baitul Makmur. Bantuan ditujukan untuk menunjang operasional masjid serta melanjutkan pembangunan fasilitas dan kegiatan lainnya sebagai bentuk motivasi pemerintah kepada kegiatan keagamaan masyarakat.

Kondisi maraknya tawuran saat ini juga mendapat sorotan Camat Kuranji, Yandra yang turut hadir mendampingi Suwirpen Suib.

Yandra mengungkapkan, tawuran sudah sampai ke wilayah Kuranji. Beber Yandra, beberapa waktu lalu tawuran bahkan pecah di depan Makam Pahlawan Kuranji.

"Kejadian ini harus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih menjaga keamanan lingkungan kita bersama," ujarnya. (401)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Jumat, 31 Maret 2023 (9 Ramadhan 1444 H)	15

DPRD Sumbar Lakukan Kajian ke Berbagai Daerah di Indonesia

Seluruh komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan studi banding ke luar daerah (BOP). Studi banding tersebut dilaksanakan selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Maret 2023.

Setiap komisi mengunjungi provinsi dan lembaga yang berbeda-beda sesuai sektor yang menjadi bidang konsentrasi kerja masing-masing.

Agenda studi banding tersebut telah ditetapkan badan musyawarah (bamus) DPRD tertanggal 21 Maret 2023 lalu.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan pelaksanaan studi banding merupakan salah satu cara efektif untuk mempelajari kelebihan yang dimiliki oleh provinsi lain. Sehingga kemudian bisa diadopsi ataupun menjadi pelajaran oleh pemerintahan Sumbar dalam upaya meningkatkan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Setiap komisi, lanjut dia, akan menjadikan bahan atau data yang didapat dari BOP untuk memperkaya pengetahuan dan landasan pembahasan program bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi.

Selain itu, menurut Supardi, pelaksanaan studi banding telah menjadi bagian dari kerja rutin anggota dewan di lembaga legislatif. Hal ini diperbole-

hkan dan telah diatur oleh pemerintah pusat.

Untuk studi banding yang dilaksanakan pada akhir Maret ini, Komisi I DPRD Sumbar yang membidangi sektor pemerintahan melaksanakan studi banding ke Provinsi Riau.

Salah satu hal yang digali Komisi I yakni persiapan Provinsi Riau dalam menghadapi tahapan pemilu serta pilkada serentak yang sudah semakin dekat.

Dalam studi banding tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indea Dt Raji Lelo ikut mendampingi komisi I yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Sawal. Selain turut hadir pula Asisten 1 Pemprov Sumbar, Kadis Dukcapil, Kepala Kesbangpol, Kasatpol PP dan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumbar. Pertemuan digelar di ruang rapat kantor Gubernur Riau, rombongan Komisi I diterima Kabiro Pemerintahan & Otda Pemprov Riau serta beberapa OPD terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Riau menyatakan terdus melakukan persiapan dengan sebaik mungkin. Tahapan pemilu diharapkan akan terlaksana dengan baik dengan adanya persiapan matang.

Pemprov Riau menilai walaupun terjadi gonjang ganjing di tingkat nasional soal penundaan pemilu ataupun sistem pemilu tertutup terbuka, persiapan harus tetap dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan belum ada keputu-

san perubahan dari pemerintah pusat.

Persiapan antara lain Pemprov Riau melalui Dukcapil selalu berkoordinasi dengan KPU setempat.

Sementara itu, Komisi II DPRD Sumbar yang membi-

dangi sektor perekonomian melaksanakan studi banding ke Provinsi Banten.

Dipimpin Ketua Komisi II, Mochklaslin diskusi dengan Pemprov Banten dan OPD terkait membahas tentang kebijakan daerah tersebut di bidang kelautan dan perikanan.

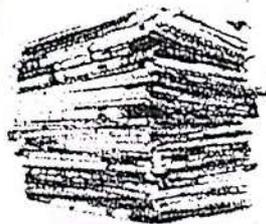
Selain itu bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Banten untuk memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan untuk menunjang pembangunan serta pembangunan daerah.

Kemudian, Komisi III yang membidangi keuangan melaksanakan Studi banding ke Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPM-PTSP) Provinsi Jambi untuk menggali tentang Pengembangan Iklim Investasi di daerah tersebut.

"Investasi di Jambi belakangan ini meningkat cukup tajam. Kita ingin mempelajari upaya apa yang dilakukan Pemerintah Jambi sehingga terjadi peningkatan investasi," ujar Ketua Komisi III Ali Tanjung yang saat studi banding tersebut didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sumbar Adib Alfikri.

Ali Tanjung mengatakan pemerintah Sumbar harus banyak belajar dari daerah lain untuk memastikan daerah ini diminati investor.





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA

LAMAN





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
PADANG	KAMIS, 30 MARET 2023	

PARIWARA
KOMISI III DPRD SUMBAR



KUNJUNGAN KE DPMTSP JAMBI

Komisi III DPRD Sumbar Dorong Pemprov Berikan Kenyamanan Investasi

KOMISI III DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk lebih optimal dalam memberikan kenyamanan bagi investor yang akan menanamkan modal di daerah tersebut.

Dorongan tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung saat kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Jambi, Selasa (28/3).

Ali Tanjung menyatakan, pertumbuhan sektor investasi di Provinsi Jambi cukup signifikan belakangan ini karena pemerintah setempat memberikan kemudahan dan insentif kepada investor yang menanamkan modal di daerah tersebut.

Salah satu insentif yang diberikan adalah keringanan pajak, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Ali Tanjung menyarankan agar Pemprov Sumbar mencontoh langkah tersebut, karena tren investasi di Jambi terus meningkat setiap tahun.

Ketika ada persoalan yang melanda investor, pemerintah daerah (pemda) juga siap mengakomodir mencari solusi dengan mengedepankan sistem kekeluargaan, sehingga orang tidak takut berinvestasi di Jambi.

"Prinsipnya investasi yang dilakukan bisa memberikan dampak positif bagi daerah dan investor yang menanamkan modal mendapatkan kenyamanan hingga keuntungan," katanya.

Kedatangan Komisi III DPRD Sumbar disambut

but Kepala DPMTSP Provinsi Jambi, Imron Rosyadi dijelaskannya, realisasi investasi Provinsi Jambi di 2021 ini telah melebihi target. Realisasi investasi hingga triwulan ketiga, yakni dari Juli hingga September mencapai Rp5,3 triliun.

Pemprov Jambi menargetkan investasi masuk ke daerah sebesar Rp8 triliun di tahun 2022. Imron Rosyadi mengatakan, sektor perkebunan dan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk merealisasikan target investasi tersebut.

Untuk diketahui sebelumnya, Kepala DPMTSP Provinsi Sumbar, Adib Alfikri mengatakan pada tahun 2022 target investasi di Sumbar telah ditetapkan sebesar Rp5,1 triliun. Melihat pada posisi Januari - September 2022 realisasi investasi 59,60 persen atau sebesar Rp3 triliun lebih.

"Dari realisasi itu, kontribusi penanaman modal asing (PMA) Rp1 triliun lebih dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp2 triliun lebih," katanya.

Adib menambahkan, melihat dari realisasi itu, untuk PMA realisasi terbilang masih rendah yakni hanya 34,20 persen atau Rp1 triliun lebih dari target sebesar Rp2,1 triliun. (*)

KETUA Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung, Kepala DPMTSP Provinsi Jambi, Imron Rosyadi.





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA



KOMISI III DPRD Sumbar dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Jambi foto bersama usai menyerahkan cenderemata.



SUASANA kunjungan kerja Komisi III DPRD Sumbar ke DPMTSP Provinsi Jambi.



FOTO bersama usai kunjungan kerja.



OPD Diminta Optimal Jaga Stok dan Stabilitas Harga Pangan



PADANG, KP - Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib menghadiri Focus Discussion Group terkait langkah antisipasi stok dan stabilitas harga pangan, di Istana Gubernur Sumbar, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut Suwirpen mendorong OPD terkait untuk optimal menjalankan instruksi gubernur menjaga ketersediaan pangan untuk konsumsi masyarakat selama Ramadhan.

"Ketersediaan pangan dan stabilitas harga merupakan hal yang krusial terutama di bulan puasa, hal tersebut harus menjadi perhatian bersama," katanya.

Ia menegaskan, seluruh pihak terkait harus mempunyai langkah-langkah antisipasi agar kebutuhan pokok masyarakat tidak mengalami gangguan.

"Kebutuhan pokok masyarakat harus dipastikan aman dengan harga dan rantai distribusi yang tetap stabil. Seluruh instansi terkait

harus memastikan dan harus memiliki langkah antisipasi agar tidak ada gejolak harga karena kelangkaan atau kekurangan pasokan maupun gangguan distribusi," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi menginstruksikan pada seluruh jajaran OPD lingkup Pemprov Sumbar untuk memastikan ketersediaan pangan dan bahan pokok lainnya, khususnya memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H.

Rapat tersebut diikuti jajaran Forkopimda Sumbar, Kepala Perwakilan BI Sumbar, Perwakilan Bulog Wilayah Sumbar, Asisten I Setdaprov. Sumbar, Kepala Badan Kesbangpol Sumbar dan OPD terkait lingkup Pemprov Sumbar

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pangan Sumbar, Effendi, menjelaskan bahwa ketersediaan komoditas pokok di Sumbar secara umum aman bahkan sebagian besar komoditas mengalami surplus. Pihaknya juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi kenaikan harga.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Bulog Wilayah Sumbar menyatakan bahwa stok beras kategori public service obligation (PSO) hingga akhir April 2023 relatif aman, yakni mencapai 4.000 ton. Bulog Sumbar juga selalu berkoordinasi dengan pusat terkait pasokan pangan apabila dibutuhkan.

Terkait persoalan harga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar Novrial menyatakan pihaknya terus melakukan pemantauan harga ke 19 kabupaten/kota dan hingga saat ini seluruh harga komoditi pokok relatif aman meski diprediksi akan ada sedikit lonjakan. (fai)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Haluan <small>Membaca dan Kebahagiaan Masyarakat</small>	KAMIS, 30 MARET 2023 8 Ramadan 1444 H	9

Sekretariat DPRD Sumbar Ikuti Uji Kecepatan Anugerah Tinarbuka

SEKRETARIAT DPRD Sumatera Barat masuk dalam tiga badan publik dari Sumatera Barat (Sumbar) yang mengikuti tahapan uji kepatutan untuk Anugerah TinarBuka dalam rangka peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) Tahun 2023.

Ketiga badan publik dari Sumbar itu tergabung pada tiga kategori, Sekretariat DPRD Sumbar untuk kategori organisasi perangkat daerah, Baswaslu Sumbar untuk kategori badan publik penyelenggara pemilu dan Fadly Amran kategori kepala daerah.

"Insya Allah kita sudah siap hadapi panelis pada uji kepatutan Anugerah TinarBuka yang digelar hari ini di Serpong Tangerang Banten," ujar Sekwan DPRD Sumbar Rafalis, Senin (27/3) di Atria Hotel.

Sebelum berangkat untuk uji kepatutan, Rafalis beserta jajaran PPID DPRD Sumbar menghadap pada Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar Supardi.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar memberikan motivasi dan keyakinan Sekretariat DPRD Sumbar akan meraih hasil terbaik dalam TinarBuka ini.

"Saya yakin dengan berbagai program inovasi keterbukaan yang telah dilaksanakan sekretariat DPRD Sumbar, akan menjadi nilai plus untuk meraih yang terbaik dalam TinarBuka tahun ini," tutur Mahyeldi.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi, dimana selama ini apapun program serta kegiatan lembaga tersebut selalu mudah diakses informasinya oleh publik.

"Tetap semangat, kita yakin akan mendapat yang terbaik, karena DPRD Sumbar memang sudah terbuka. Selama ini sudah banyak program serta terobosan keterbukaan, maka saya yakin Sekwan dan jajaran akan mampu memberikan keterangan terbaik pada tim penilaian TinarBuka," tegas Supardi.

Sekwan DPRD Sumbar tercatat di monitoring evaluasi KI Sumbar berpredikat informatif dua kali berturut-turut dan menjadi satu-satu OPD Sekwan DPRD se Indonesia yang menjadi nominasi Anugerah TinarBuka.

"Ya dari kategori OPD atau SKPD, Sekwan DPRD Sumbar satu-satunya Sekwan se-Indonesia masuk nominasi TinarBuka 2023 ini," ujar Kabag Persidangan Setwan DPRD Sumbar Zardi Syahrie

bersama Pelaksana pengelola PPID Pelaksana Setwan DPRD Sumbar Idris.

Anugerah TinarBuka 2023 adalah penghargaan pertama dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Publik.

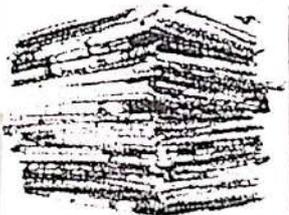
"Ini perdana merupakan anugerah struktural tentang keterbukaan informasi publik,

Anugerah TinarBuka ini pada uji kepatutan adalah kolaborasi KI Pusat bersama kementerian seperti Kemenko Polhukam, Bapenas dan Kemenpan RB," ujar Ketua KI Pusat Donny Yoessiantoto

Anugerah TinarBuka direncanakan diserahkan Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Keterbukaan

Informasi Nasional di Kampar pada 4 Mei mendatang.

Tim Penguji Anugerah TinarBuka terdiri dari Kemenkopolkukam, Menpan RB dan Mendagri RI serta dua komisioner pusat dengan ketua Tim Penilai Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandiyudha. Selain itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi juga hadir. (*)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 30 MARET 2023 8 Ramadan 1444 H	6



SAFARI RAMADAN — Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Aida saat kunjungan safari Ramadan ke Masjid Al Hidayah, Jorong Koto Kaciak Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. IST

AKTIF BERSILAHTURAHMI DENGAN MASYARAKAT

Aida Serahkan Bantuan Puluhan Juta untuk Tiga Masjid dan Satu Musala

PADANG, HALUAN- Lakukan safari Ramadan, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar Aida aktif menyambangi masjid dan musala di daerah pemilihannya (dapil) untuk bersilahturahmi dengan konstituen.

Saat kunjungan ke sejumlah masjid dan musala ini, Aida sekaligus menyerahkan bantuan dana hibah dari pemerintahan provinsi sebesar Rp50 juta untuk masjid, dan Rp20 juta untuk musala.

Aida saat diwawancarai *Haluan*, Selasa (28/3) mengatakan, hingga kemarin total ada tiga masjid dan satu musala yang telah ia kunjungi untuk bersilahturahmi dengan masyarakat.

Masjid dan musala itu yaikninya, pertama Masjid Nurul Ikhsan Nagari Bukit Limbuku, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kedua Masjid Al Hidayah, Jorong

Koto Kaciak Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketiga Masjid Nurul Huda Jorong Balai Tinggi, Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kemudian, untuk musala Aida menyambangi Musala Nurul Iman Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Kota.

Disebut Aida, bantuan dana yang diberikan untuk masjid dan musala tadi, peruntukkannya adalah untuk meningkatkan sarana prasarana, dari tempat ibadah yang menerima bantuan.

"Bisa jadi digunakan untuk membeli tikar masjid, MCK, untuk kubah, dan kebutuhan lain dari masjid atau musala yang menerima bantuan," ulas Aida yang merupakan Srikandi Partai Demokrat tersebut.

Selain menyerahkan bantuan, Aida saat pertemuan dengan masyarakat juga berpesan, di bulan puasa ini masyarakat agar fokus beribadah, banyak melakukan kegiatan positif, dan menjaga ketenangan serta ketertiban di lingkungan.

"Kita semua harus melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, jaga ketenangan, karena belum tentu di tahun depan kita masih bisa menikmati Ramadan seperti ini. Semoga puasa dan ibadah lain yang kita jalankan bisa diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masyarakat sejahtera, dan kita semua bisa sehat," ulasnya.

Sementara itu, masyarakat yang hadir dalam agenda tersebut juga menyampaikan sejumlah harapan. Salah satunya, mereka mendoakan dan berharap, pada 2024 mendatang Aida bisa kembali terpilih sebagai wakil rakyat mereka di DPRD Provinsi Sumbar. (len)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	RABU, 29 MARET 2023 RABU, 7 RAMADHAN 1444 H	

SEKWAN UJI KEPATUTAN ANUGERAH TINARBUKA 2023

Ketua DPRD Sumbar Hadir Langsung Memberi Motivasi

Serpong, Khazanah — Ketua DPRD Sumbar Supardi hadir langsung memberi semangat dan motivasi saat Sekretaris DPRD Sumbar Rafliis mengikuti uji kepatutan Anugerah TinarBuka 2023, Senin (27/3) di Serpong, Tangerang Provinsi Banten, sehingga turut menuai pujian dari tim penilai.

Rafliis saat presentasi dalam Uji Kepatutan Anugerah TinarBuka 2023 menyampaikan, keterbukaan Informasi Publik (KIP) bisa mengatasi munculnya angketa informasi publik.

"Keterbukaan informasi publik dikelola secara aturan, bisa meminimalisir berbagai perkara menyangkut informasi diproduksi DPRD Sumbar," ujar Rafliis saat

itu. Dia mengaku, pasca keluarnya UU No.14/2008 tentang KIP, memicu semangat pihak DPRD Sumbar agar lebih terbuka ke publik dengan cara memperbarui informasi yang ada di DPRD.

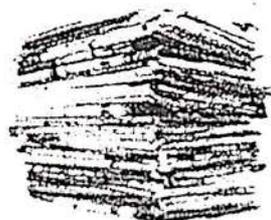
"Harapannya apa informasi yang dilahirkan DPRD Sumbar bisa tersampaikan secara baik ke publik," tutur Rafliis lagi.

Di sisi lain, KI Pusat Samrotunnajah Ismail mau tak mau mengakui paparan yang disampaikan Sekretaris DPRD Sumbar, Rafliis itu cukup berbobot, sehingga mendapat apresiasi tim penguji.

"Sejak pagi menguji, ini baru pimpinan tertinggi di badan publik hadir langsung, duduk di



Ketua DPRD Sumbar Supardi bersama Sekwan Rafliis saat Uji Kepatutan Anugerah TinarBuka 2023 digelar Komisi Informasi Pusat





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 29 Maret 2023 (7 Ramadhan 1444 H)	8

Sekretariat DPRD Sumbar Ikuti Uji Kecepatan Anugerah Tinarbuka

Sekretariat DPRD Sumatera Barat masuk dalam tiga badan publik dari Sumatera Barat (Sumbar) yang mengikuti tahapan uji kepatutan untuk Anugerah Tinarbuka dalam rangka peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) Tahun 2023.

Ketiga badan publik dari Sumbar itu terbagi pada tiga kategori, Sekretariat DPRD Sumbar untuk kategori organisasi perangkat daerah, Bawasu Sumbar untuk kategori badan publik penyelenggara pemilu dan Fadly Amran kategori kepala daerah.

"Insyallah kita sudah siap hadapi panelis pada uji kepatutan Anugerah Tinarbuka yang digelar hari ini di Serpong Tangerang Banten," ujar Sek-

wan DPRD Sumbar Rafliis, Senin (27/3) di Atria Hotel.

Sebelum berangkat untuk uji kepatutan, Rafliis beserta jajaran PPID DPRD Sumbar menghadap pada Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar Supardi.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar memberikan motivasi dan berkeyakinan Sekretariat DPRD Sumbar akan meraih hasil terbaik dalam Tinarbuka ini.

"Saya yakin dengan berbagai program inovasi keterbukaan yang telah dilaksanakan sekretariat DPRD Sumbar,

akan menjadi nilai plus untuk meraih yang terbaik dalam Tinarbuka tahun ini," tutur Mahyeldi.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi, dimana selama ini apapun program serta kegiatan lembaga tersebut selalu mudah diakses informasinya oleh publik.

"Tetap semangat, kita yakin akan mendapat yang terbaik, karena DPRD Sumbar memang sudah terbuka. Selama ini sudah banyak program serta trobosan keterbukaan, maka saya yakin Sekwan dan jajaran akan mampu memberikan keterangan terbaik pada tim penilaian Tinarbuka," tegas Supardi.

Sekwan DPRD Sumbar tercatat di monitoring evaluasi KI Sumbar berprediket informatif dua kali berturut-turut dan menjadi satu-satu OPD Sekwan DPRD se Indonesia yang menjadi nominasi Anugerah Tinarbuka.

"Ya dari kategori OPD atau SKPD, Sekwan DPRD Sumbar satu-satunya Sekwan se Indonesia masuk nominasi Tinarbuka 2023 ini," ujar Kabag Persidangan Setwan DPRD Sumbar Zahardi bersama Pelaksana pengelola PPID Pelaksana Setwan DPRD Sumbar Idris.

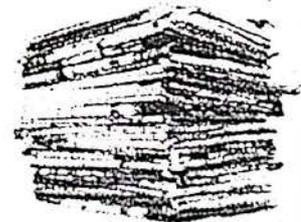
Anugerah Tinarbuka 2023 adalah penghargaan pertama dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Publik.

"Ini perdana merupakan

anugerah struktural tentang keterbukaan informasi publik, Anugerah Tinarbuka ini pada uji kepatutan adalah kolaborasi KI Pusat bersama kementerian seperti Kemenko Polhukam, Bapenas dan Kempan RB," ujar Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoto

Anugerah Tinarbuka direncanakan diserahkan Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional di Kampar pada 4 Mei mendatang.

Tim Penguji Anugerah Tinarbuka terdiri dari Kemenkopolhukam, Menpan RB dan Mendagri RI serta dua komisioner pusat dengan ketua Tim Penilai Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandiyudha. Selain itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi juga hadir. (*)

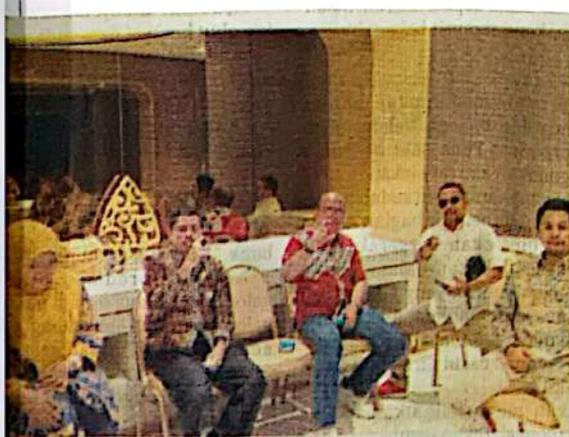




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA



KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Haluan	RABU, 29 MARET 2023 7 Ramadan 1444 H	6

JAGAKETERSEDIAAN DAN STABILITAS HARGA PANGAN

Suwirpen Minta OPD Terkait Jalankan Instruksi Gubernur

PADANG, HALUAN- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib menghadiri Focus Discussion Group terkait, langkah-langkah antisipasi ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan di Istana Gubernur Sumbar, Baru-baru ini.

Dalam kesempatan tersebut Suwirpen mendorong OPD terkait agar optimal menjalankan instruksi gubernur menjaga ketersediaan pangan, untuk konsumsi masyarakat selama Ramadan 1444 Hijrah.

"Ketersediaan pangan dan stabilitas harga merupakan hal yang krusial dalam memasuki bulan puasa, hal tersebut harus menjadi perhatian bersama," katanya.

Politisi Demokrat ini menegaskan, seluruh pihak terkait harus mempunyai langkah-langkah antisipasi agar kebutuhan pokok masyarakat tidak mengalami gangguan.

"Kebutuhan pokok masyarakat harus dipastikan yang tetap stabil dan rantai distribusi terkait harus memastikan, dan harus memiliki langkah antisipasi agar tidak ada gejolak harga disebabkan kelangkaan atau kekurangan pasokan atau gangguan

distibusi," katanya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menginstruksikan pada seluruh jajaran OPD lingkup Pemprov Sumbar untuk memastikan ketersediaan pangan dan bahan pokok lainnya aman selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H.

Rapat diikuti oleh jajaran Forkopinda Sumbar, Kepala Perwakilan BI Sumbar, Perwakilan Bulog Wilayah Sumbar, Asisten I Sekretaris Sumbar, Kepala Badan Kesbangpol Sumbar dan OPD terkait lingkup Pemprov Sumbar.

Lebih lanjut, Gubernur mengatakan bahwa semua pihak harus mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok yang biasanya terjadi. Hal ini juga penting untuk meredam laju inflasi di Sumbar.

Terkait inflasi, menurutnya, Pemprov Sumbar telah mengambil sejumlah langkah diantaranya dengan melakukan kerja sama antar daerah, mengoptimalkan kinerja tim pengendalian inflasi daerah, serta mendorong pelaksanaan operasi pasar.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pangan Sumbar, Effendi, menjelaskan bahwa ketersediaan komoditas pokok di Sumbar secara

umum aman bahkan sebagian besar komoditas mengalami surplus. Pihaknya juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi kenaikan harga.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Bulog Wilayah Sumbar menyatakan bahwa stok beras kategori public service obligation (PSO) hingga akhir April 2023 relatif aman, yakni mencapai 4.000 ton.

Bulog Sumbar juga selalu ber-

koordinasi dengan pusat terkait pasokan pangan apabila dibutuhkan. Terkait persoalan harga pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Novrial, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan harga ke 19 kabupaten/kota dan hingga saat ini seluruh harga komoditi pokok relatif aman meski diprediksi terjadi sedikit lonjakan di minggu awal Ramadan ini. (len)



Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib saat menghadiri Focus Discussion Group terkait, langkah-langkah antisipasi ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan di Istana Gubernur Sumbar baru-baru ini. IST



KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Harian	SELASA, 28 MARET 2023 6 Ramadan 1444 H	12

SERAHKAN BANTUAN RP50 JUTA

TSR Pemprov Sumbar Sambangi Baruah Gunuang

LIMA PULUH KOTA, LIMA PULUH KOTA - Tim Safari Ramadan (TSR) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) mendatangi Masjid Raya Baruah Gunuang, Jorong Baruah Gunuang II, Nagari Baruah Gunuang, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Minggu (26/3) malam.

Tim yang dikomandoi Ketua DPRD Sumbar ini terdiri dari Kepala Bagian Kesra dan Pelayanan Dasar Randy Harfian, Komisioner KPU Sumbar Azwar Aini serta sejumlah OPD di Pemprov Sumbar.

Berjarak 50 KM sebelah utara dari Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak, TSR Provinsi Sumbar diiringi Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo.

Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengapresiasi Pemprov Sumbar yang telah menetapkan dua Nagari di Lima Puluh Kota sebagai tujuan TSR pada 2023 ini.

"Kami turut mengapresiasi Masjid Raya Baruah Gunuang atas terselenggaranya program tahfiz bernama Pondok Tahfiz Raudhatul Ilmi. Hal ini sangat mendukung visi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu mewujudkan Lima Puluh Kota Madani, Beradat, dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah dan sejalan dengan visi Provinsi Sumbar yakni terwujudnya Sumbar Madani yang unggul dan berkelanjutan," ujar Safaruddin.

Ia mengajak masyarakat untuk mewujudkan visi Pemkab maupun Pemprov dengan mendukung setiap kebijakan

yang dikeluarkan pemerintah. Tidak hanya itu, Safaruddin berharap agar para orang tua dapat mendidik anak-anak serta generasi muda nagari untuk meramaikan masjid maupun surau dan menjadikan surau/musala sebagai pusat kegiatan masyarakat.

"Tidak hanya peningkatan SDM yang jadi fokus pembangunan, di bidang infrastruktur pun Pemprov dan Pemkab telah bersinergi, dengan diperbaikinya jalan ke Baruah Gunuang hingga Koto Tinggi, diharapkan perekonomian masyarakat mengalami peningkatan," ulas Safaruddin.

Kepala Bagian Kesra dan Pelayanan Dasar Setdaprov Sumbar Randy Harfian mengucapkan rasa syukur atas pelaksanaan Safari Ramadan yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar.

"Selain menjalin ukhuwah, 12 tim provinsi yang terdiri dari unsur forkopimda akan mengunjungi 19 kabupaten/kota di Sumbar dengan tujuan untuk menyemarakkan dan memakmurkan masjid, salah satunya di Nagari Baruah Gunuang," kata Randy.

Ia berharap upaya Pemprov Sumbar bersama Kabupaten Lima Puluh Kota

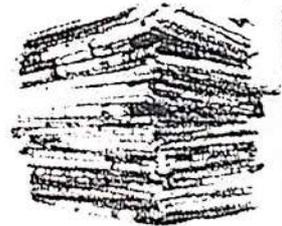
dapat mewujudkan Sumbar religius dan berbudaya dan didukung penuh oleh wali nagari, camat, dan seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan pendidikan moral, agama dan nilai adat budaya bagi generasi muda sebagai

upaya dalam mencegah degradasi moral.

Di samping itu, melalui bantuan hibah Pemprov Sumbar, Randy berharap Masjid Raya Baruah Gunuang dapat memanfaatkannya dalam pembangunan masjid serta sejumlah kegiatan yang diselenggarakan

di masjid.

Di penghujung kegiatan, TSR Pemprov Sumbar menyerahkan bantuan pembangunan masjid sebesar Rp50 Juta kepada pengurus masjid Raya Baruah Gunuang dan disaksikan ratusan masyarakat Nagari Baruah Gunuang. (tfk)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Haluan <small>Harian Free Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat</small>	SELASA, 28 MARET 2023 6 Ramadhan 1444 H	9.

KETUA DPRD SUMBAR SAFARI RAMADAN DI LIMA PULUH KOTA

Bentengi Moral Gene rasi Muda Melalui Ak tivitas Masjid

MENGAWALI agenda Safari Ramadan 1444 Hijriah, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyambangi Masjid Raya Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jumat (24-25/3).

Pada kesempatan itu Supardi mengajak masyarakat Nagari VII Koto Talago menjadikan masjid sebagai sarana membentengi moralitas generasi muda dari fenomena sosial menyimpang di tengah masyarakat, salah satunya Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT).

"Untuk sekarang ini, kita dirisaukan dengan penyakit yang berasal dari manusia itu sendiri, seperti perilaku seksual menyimpang (LGBT) hingga tingginya peredaran narkoba, untuk itu perlu langkah antisipasi dengan menghidupkan aktivitas masjid," katanya.

Dia mengatakan untuk persentase LGBT dan penyebaran narkoba di Sumbar, cukup tinggi. Prinsipnya dengan banyak menghabiskan waktu di masjid, maka akan didapatkan perlindungan dari yang maha

kuasa. "Kita yakin dan percaya akan hal itu," ucapnya.

Ia berharap masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat beribadah, namun lebih dari itu hendaknya bisa dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat yang memprioritaskan penana-

man nilai-nilai moral kepada generasi muda.

Dalam agenda itu Ketua DPRD Sumbar Supardi menyerahkan bantuan dana hibah Tim Safari Ramadhan (TSR) pemerintahan provinsi sebesar Rp 50 juta untuk kelangsungan operasional masjid, selain itu

ada juga bantuan dari Bank Nagari sebesar Rp 10 juta.

Bantuan yang diserahkan merupakan bentuk motivasi kepada pengurus dan warga sekitar, agar membuat program-program yang bisa memajukan masjid.

"Kita ingin masyarakat yang beribadah di Masjid Raya Tanjung Jati bisa merasa nyaman," katanya.

Lebih lanjut Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam penanganan dan pemberantasan narkoba. Orang tua hendaknya menjaga anak-anak mereka, begitu juga ninik mamak dan tokoh masyarakat.

Sementara itu Wali Nagari VII Koto Talago, Yondri, menjelaskan kondisi sosial masyarakat Kenagarian VII Koto Talago yang sering terjerat

rentenir untuk meminjam pemodal usaha kecil menengah. Bahkan ada juga yang kesulitan untuk membayar dan bunganya semakin besar.

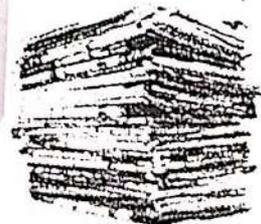
"Tidak hanya persoalan rentenir, krisis moral juga menghantui generasi muda daerah ini," katanya.

Dia mengatakan, telah terjadi degradasi moral terhadap generasi muda yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena perkembangan teknologi informasi, hal itu harus menjadi perhatian bersama.

Pada kunjungan itu Ketua DPRD Sumbar didampingi

oleh Sekretaris DPRD Sumbar Rafli, Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Peraturan Perundang-Undangan Zardi Syahrir dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas Protokol Dahrul Idris.

Tidak hanya didampingi unsur Sekretariat DPRD Sumbar, beberapa OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga ikut dalam agenda yang diikuti ratusan jemaah tersebut.





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA

KORAN

LAMAN

Adapun OPD tersebut adalah, Dinas PMD dan PTSP, Inspektorat hingga Kabag Kesra dan Pelayanan Dasar. Juga tampak beberapa perwakilan Bank Nagari, Komandan Lanud Sutan Sjahrir, Komisioner KPU Sumbar, seluruh unsur tersebut merupakan rombongan TSR III Pemprov yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi. (adv)



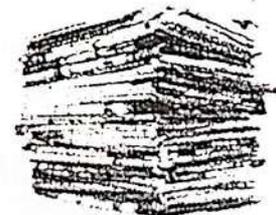
KETUA DPRD Sumbar, Supardi menyerahkan bantuan dari pemerintah provinsi untuk masjid yang disambangi



MENYERAHKAN bantuan dari Bank Nagari



JEMAAH Masjid Raya Tanjung Jati dalam kegiatan safari Ramadan Pemprov yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi



KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SELASA, 28 MARET 2023	5

Pengelolaan Informasi Publik Secara Benar Bisa Meminimalisir Dampak Urjuk Rasa

PADANG, METRO

Tiga badan publik dari Sumatera Barat (Sumbar) hadapi Uji Kepatutan Anugerah Tinarbuka 2023.

Ketiga badan publik dari Sumbar itu terbagi pada tiga kategori, Bawastu Sumbar (kategori Badan Publik Penyelenggara Pemilu), Sekretariat DPRD Sumbar (kategori Organisasi Perangkat Daerah) dan Fadly Amran, kategori kepala daerah.

Raflis (Sekretariat DPRD Sumbar) dan Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) optimis memberikan yang terbaik untuk Sumbar. Sebab ke tiga badan publik ini sudah teruji. Seperti disampaikan Raflis, Sekretariat DPRD Sumbar untuk keterbukaan informasi publik sudah teruji dan kaya inovasi. "Kita melayani dengan merbetakan kemudahan serta kenyamanan kepada masyarakat pemohon informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini. Selain itu untuk penguatan

pelayanan keterbukaan informasi publik, mulai ketua dan wakil ketua serta anggota DPRD Sumbar memberikan dukungan optimal untuk kerja kerja keterbukaan informasi publik ini," ujar Raflis.

Bahkan, lanjut Raflis sebelum menghadapi Uji Kepatutan, pihak PPD Pelaksana DPRD ini juga melapor dan mohon arahan serta dukungan dari Gubernur Sumbar.

"Begitu masuk nominasi, kita langsung melapor kepada Gubernur Sumbar, Pak Mahyeldi langsung bangga terhadap Setwan DPRD Sumbar yang bersama Bawastu dan Walikota Padang Panjang, wakil Sumbar di Tinarbuka 2023," ujar Raflis.

Pada saat Uji Kepatutan Anugerah Tinarbuka 2023 yang digelar Komisi Informasi Pusat, Senin (27/3), Raflis menyampaikan, keterbukaan informasi publik, bisa dikelola secara benar bisa meminimalisir urjuk rasa ke DPRK Sumbar.

"UU 14 tahun 2008 ternyata sinergis dengan se-



UJI KEPATUTAN-Sekwan DPRD Sumbar Raflis saat Uji Kepatutan Anugerah Tinarbuka 2023 digelar Komisi Informasi Pusat, Senin (27/3).

angkat kami atas arahan Ketua DPRD soal jayanti cepat dan informasi sudah diinformasikan, "ujar Sekwan DPRD Sumbar Raflis.

Pemparan dari Raflis mengundang puji dari Tim Penguji Anugerah Tinarbuka terdiri dari Ketua Komisi Informasi, Mengan RB dan Mendagri RI serta dua komisioner pusat dengan ketua Tim Penilai Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha. Juga hadir Ketua DPRD Sumbar Su-

pardi.

Raflis juga menyampaikan demo besar UU Omnibus Law ke DPRD Sumbar beberapa waktu lalu. Menurutnya, terjadi kerusakan dan kerugian DPRD miliaran rupiah saat ini mungkin karena informasi tidak sampai dan tak tercerna di publik terkait UU Omnibus Law itu.

"Membatuh saya ketika melihat kerusakan parah gedung waktu itu ini mungkin karena informasi tidak sampai dan tak tercerna di publik terkait UU

Omnibus Law itu. Karena itu saya bertekad bagaimana ke depan informasi bisa lebih diproduksi lagi di DPRD Sumbar," ujar Raflis.

Semangat dan update serta menarik penyampaian bak master public speaking Sekwan DPRD Sumbar diakui semua Tim Penilai Anugerah Tinarbuka 2023.

"Salam hormat kepada Pak Supardi Ketua DPRD Sumbar yang support langsung Pak Raflis di Uji Kepatutan ini," Arya Sandhiyudha. (hsb)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
PADANG	SELASA, 28 MARET 2023	7

PARIWARA
DPRD SUMBAR



HADAPI FENOMENA SOSIAL

Supardi Dorong Penguatan Nilai-nilai Moral
pada Generasi Muda

AWALI agenda Safari Ramadan 1444 Hijriah, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi sambangi Masjid Raya Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (24-25/3).

Tim Safari Ramadan (TSR) III Pemrov Sumbar yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam kesempatan tersebut mengajak masyarakat Nagari VII Koto Talago untuk memperkuat nilai-nilai moral pada generasi muda dalam menghadapi fenomena sosial yang dianggap kontroversial, salah satunya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

"Untuk sekarang kita dirisaukan dengan fenomena sosial yang berasal dari manusia itu sendiri, seperti LGBT hingga tingginya peredaran narkoba. Untuk itu perlu langkah antisipasi dengan menghidupkan aktivitas masjid kepada generasi muda," katanya.

Harapannya, masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah, namun juga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang memprioritaskan pena naman etika dan akhlak yang baik, terutama kepada generasi muda.

Dalam agenda itu Supardi menyerahkan

bantuan dana hibah TSR Pemrov Sumbar sebesar Rp50 juta untuk kelangsungan operasional masjid, begitupun Bank Nagari juga menyalurkan bantuan sebesar Rp10 juta.

Bantuan yang diserahkan merupakan bentuk motivasi kepada pengurus dan warga sekitar, untuk membuat program-program meramaikan masjid. "Kita ingin masyarakat yang beribadah di Masjid Raya Tanjung Jati bisa merasa nyaman," katanya.

"Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Orang tua hendaknya menjaga anak-anak, begitu juga tokoh masyarakat.

Sementara itu Wali Nagari VII Koto Talago, Yondri menjelaskan, saat ini ada sebagian masyarakat di kenagarian tersebut yang mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha dan terpaksa menggunakan jasa rentenir dengan risiko

yang tinggi. Hal itu disebabkan kurangnya akses ke lembaga pembiayaan atau rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat setempat. Selain itu, beberapa dampak negatif yang timbul akibat penggunaan jasa rentenir, seperti tingginya beban utang dan risiko jatuh miskin.

Disamping itu, krisis moral juga menghantui generasi muda daerah ini. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, selain faktor teknologi informasi, faktor lain yang dapat menyebabkan degradasi moral antara lain lingkungan keluarga, pendidikan, pergaulan, dan media sosial. Hal itu

harus menjadi perhatian bersama.

Pada kunjungan itu Ketua DPRD Sumbar didampingi Sekretaris DPRD Sumbar Rafis, Kabag Persidangan Peraturan Perundang-Undangan, Zardi Syarif dan Kepala sub bagian (Kasubag) Humas Protokol Dahrut Idris. (*)



PIHAK Bank Nagari menyerahkan dana CSR.



PENYERAHAN dana hibah



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar Supardi menyampaikan sambutan.

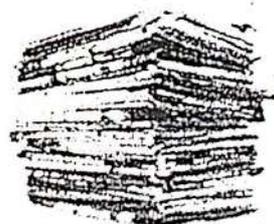
ANGG



SUASANA kunjungan TSR Pemprov Sumbar di Masjid Raya Tanjung Jati.



KETUA DPRD Sumbar Supardi menyerahkan bantuan dana hibah TSR Pemprov Sumbar kepada pengurus masjid.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
KHAZI	SELASA, 28 MARET 2023 SELASA, 6 RAMADHAN 1444 H	8.

DALAM RANGKA Mencari MASUKAN

Lima Komisi di DPRD Sumbar Studi Banding ke Luar Daerah

Padang, Khazanah - Selama empat hari berturut-turut, dari tanggal 26-29 Maret 2023, semua Komisi di DPRD Sumbar melaksanakan studi banding ke luar daerah, sesuai Komisi yang dibidangnya.

Komisi I yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan, melakukan studi banding ke Provinsi Riau untuk menggali persiapan provinsi tetangga itu tentang bagaimana tahapan pemilu dan pilkada serentak di daerah itu.

Dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Dt. Rajo Lelo dan Ketua Komisi I, Sawal yang juga didampingi Asisten I Pemprov Sumbar, Kadis Dukcapil, Kepala Kesbangpol, Kasatpol PP, Kabiro Hukum itu, pertemuan digelar di ruang rapat kantor Gubernur Riau diterima Kabiro Pemerintahan & Otda Pemprov Riau serta beberapa OPD terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Riau menyatakan siap dan terus melaksanakan tahapan pemilu dan pilkada serentak, walaupun terjadi gonjang ganjing di tingkat nasional soal penundaan pemilu ataupun sistem pemilu tertutup terbuka.

Persiapan antara lain Pemprov Riau melalui Dukcapil selalu berkoordinasi dengan KPU setempat.

Sementara Komisi II membidangi perekonomian dipimpin ketuanya Mochlasin melakukan studi banding ke Provinsi Banten, terutama menyangkut masalah Kelautan dan Perikanan di daerah itu.

Begitupun dengan Komisi III yang membidangi keuangan dipimpin ketuanya Ali Tanjung melaksanakan Studi Banding ke Dinas Penanaman Modal &

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi untuk menggali tentang Pengembangan Iklim Investasi di daerah tersebut.

"Investasi di Jambi belakangan ini meningkat cukup tajam," ujar Ali Tanjung yang juga didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sumbar Adib Alfikri.

Sedangkan Komisi IV yang membidangi pembangunan melakukan studi banding dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar bersama Ketua Komisi IV, Zulkenedi Said mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

Seperti disampaikan anggota Komisi IV, H. M. Nurnas, BPBD DKI Jakarta memang luar biasa dan sudah punya SOP dengan jelas dari 9 Ancaman Bencana Banjir, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Masalah Gedung, Epidemik dan Wabah Penyakit, Gelombang Pasang dan Abrasi,

Cuaca Ekstrem, Kegagalan Teknologi, Konflik Sosial dan Gerakan Tanah.

Apalagi, tukuk Nurnas, BPBD DKI Jakarta juga sudah punya Command Center ruang pantau, sehingga masyarakat bisa mengakses melalui kontak 112 dan juga punya ruang belajar edukasi dan Simulasi untuk masyarakat mengatasi Kebakaran, Banjir, dll.

Dari paparan Kalaksa, tambahnya, yang penting itu dalam menangani bencana harus patuh dengan SOP yang sudah ditetapkan dan tidak ada ego sektoral.

"Jika semua Kalaksa BPBD di Prov/Kab/Kota seperti di DKI

Jakarta, saya yakin semua itu akan cepat tertangani dengan catatan, kepala daerah jangan lupa soal dukungan anggaran," ujar Nurnas.

Sementara Komisi V yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat (Kesra), melakukan studi banding ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi V, Hj. Aida, SH saat dihubungi kemarin, masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat sudah jauh lebih maju dibanding dengan daerah kita.

Di Jawa Barat, katanya, meskipun penduduknya banyak, namun kepala daerahnya tak pernah melupakan masalah pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap anak, bahkan sampai menyiapkan perdanya.

"Salut kita. Bahkan gubernurnya banyak menyiapkan produk-produk seperti perempuan juara, anak juara. Pokoknya banyaklah yang bisa dibawa pulang ke Sumbar untuk kita terapkan pula di Sumbar," katanya.

■ adv





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA

IAN



Komisi I yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan, saat melakukan studi banding ke Provinsi Riau



Komisi II membidangi perekonomian saat melakukan studi banding ke Provinsi Banten, terutama menyangkut masalah Kelautan dan Perikanan



Komisi III yang membidangi keuangan saat melaksanakan Studi Banding ke Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	SENIN, 27 MARET 2023 SENIN, 5 RAMADHAN 1444 H	2

KETUA DPRD SUMBAR SUPARDI:

Banyak Indikator Digunakan Mengukur Kinerja Gubernur

Padang, Khazanah - Ketua DPRD Sumbar Supardi mengingatkan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, merupakan LKPJ tahun kedua dari Gubernur Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2021-2025 dan sampai berakhirnya masa jabatannya, akan terdapat 2 (dua) LKPJ lagi yang akan disampaikan kepada DPRD.

"Berhubung tidak adanya lagi LKPJ akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka LKPJ tahunan ini nanti akan menjadi akumulasi penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur diakhir masa jabatannya," ujar Supardi dalam sambutannya didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib dan Indra Dt. Rajo Lelo saat memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar LKPJ dan Pembentukan Pansus LKPJ tahun 2022, Jumat (24/3).

Oleh sebab itu, tukunya, DPRD sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu melihat secara lebih tajam kinerja Gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Gubernur Sumatera Barat.

"Banyak indikator dan variabel yang digunakan untuk melihat dan mengukur kinerja Gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Daerah, diantaranya capaian makro ekonomi daerah, capaian target kinerja program dan kegiatan pada tataran output dan outcome serta kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut," ujar Supardi.

Capaian kinerja tersebut, tambahannya, tidak hanya dilihat

dalam tataran angka-angka statistik yang dilaporkan oleh masing-masing OPD saja, akan tetapi juga perlu dilihat bagaimana kondisi rilnya dilapangan.

"Sangat mungkin, secara statistik capaiannya sudah cukup bagus, tetapi rilnya dilapangan masih ada yang tidak sesuai dengan angka-angka statistik tersebut," terangnya.

Sebagai contoh konkrit, tambahannya, dari rilis data laporan akhir tahun 2022 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, hampir semua target

kinerja program dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, di atas target yang ditetapkan. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan masih ada kondisi yang tidak tidak sesuai dengan capaian target kinerja tersebut.

Dan disamping itu, korelasi antara capaian target kinerja tahunan yang terdapat dalam LKPJ masih cukup banyak yang belum selaras dengan target kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

"Dari aspek capaian target kinerja tahunan sudah cukup baik, tetapi setelah diakumulasikan dengan target RPJMD, masih belum sejalan," tambahannya.

Tahun 2022, lanjutnya, pasca berakhirnya pandemi covid-19 penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat sudah pulih kembali seperti semula. Oleh sebab itu, idealnya capaian kinerja Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas dan

kewajibannya, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada masa pandemi covid-19.

"Untuk dapat melihat keberhasilan tersebut, tentu nanti kita perlu dalam muatan dan laporan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang termuat dalam LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022," tandasnya.

Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam laporannya menyampaikan, penduduk

Sumatera Barat dibagi atas dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.

"Tahun 2022 penduduk usia kerja di Sumatera Barat mencapai 4,14 juta orang," urai gubernur.

Dari penduduk usia kerja tersebut, lanjut gubernur, 2,87 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari bekerja 2,69 juta orang dan pengangguran 180,10 ribu orang. Jumlah bukan angkatan kerja mencapai 1,27 juta orang terdiri dari penduduk yang bersekolah 387,77 ribu orang, mengurus rumahtangga 724,53 ribu orang dan lainnya sebanyak 158,38 ribu orang. "Angka tersebut merupakan





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA

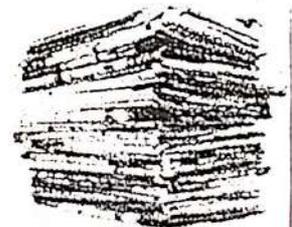
modal utama bagi pembangunan Sumatera Barat sekaligus tantangan untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk menyerap atau mengurangi angka pengangguran," tambahnya.

Kemudian melihat jumlah angkatan kerja di tahun 2022 masih didominasi oleh laki-laki, yang mencapai 1,69 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjanya (TPAK) sebesar 82,58 persen dan angkatan kerja perempuan sebesar 1,18 juta orang (dengan TPAK 56,28 persen).

Sebaliknya jumlah bukan angkatan kerja lebih didominasi oleh perempuan yang tercatat sebanyak 913,87 ribu orang dan laki-laki hanya 356,81 ribu orang.

"Hampir separoh dari jumlah wanita yang berusia produktif yang tergolong bukan angkatan kerja. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat mendorong terciptanya industri rumah tangga secara terpadu, komprehensif, intensif, dan berkelanjutan sehingga diharapkan bermuara pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat," katanya. ■ jer

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyerahkan Nota Pengantar LKPJ kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi disaksikan Wakil Ketua Suwirpen Suib dan Indra Dt. Rajo Lelo





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SENIN, 27 MARET 2023	8

Manfaatkan Masjid, Lah irkan Generasi Kuat, Hebat dan Cerdas

Yondri: Warga Bangga, Supardi Peduli Nagari

KETUA Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi, SH menyampaikan, perlu meningkatkan pemanfaatan masjid dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, selain menjadi tempat beribadah juga menjadi pusat pendidikan moral, budaya serta juga pengembangan ekonomi masyarakat.

"Dahulu nabi Muhammad SAW jika membuka wilayah baru di Madinah yang pertama-tama dibangun adalah masjid. Dimana masjid dipakai untuk pengembangan Islam, pendidikan, tempat bermusyawarah, membangun strategi perang selain dari tempat beribadah", ujar Supardi pada saat melakukan Safari Ramadhan di masjid Raya Tanjung Jati, Limapuluhkota.

Selaku Ketua Tim III Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat, Supardi menghimbau masyarakat agar ikut serta berperan dalam melahirkan generasi yang kuat dan cerdas, bukan meninggalkan generasi yang lemah membuat negeri ini hancur dan menderita.

"Bagi masyarakat seharusnya menjadikan masjid sebagai tempat menyemaikan benih-benih generasi yang kuat, hebat dan cerdas dimasa datang. Pendidikan formal belum tentu mampu memberikan yang terbaik bagi

semua generasi muda kita tentunya. Dari Masjid dengan didikan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kearifan

lokal tentu akan mampu melengkapi meningkatkan kemampuan anak-anak kita," ungkapnya.

Supardi juga menekankan, jika perlu anak-anak kita ini, belajar, bermain dan tidur dimasjid seperti halnya dimasa lalu

anak laki-laki tidur di surau, ingatnya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Supardi menyerahkan bantuan himbauan pemprov Sumbar untuk pembangunan masjid Raya Tanjung Jati sebesar 50 juta rupiah dan juga ada tambahan sumbangan dari Bank Nagari 10 juta rupiah.

Wali Nagari Tujuh Koto Talago Yondri, S.S, dalam sambutannya juga menyinggung persoalan melemahnya perekonomian masyarakat saat ini. Khususnya kondisi ekonomi masyarakat di Nagari Tujuh Koto Talago, Bahkan ada yang terjerat pinjaman 4-5 (pinjam 4 bayar lima). Dan kadang-kadang sering sipeminjam kesulitan bayar saat ditagih sampai-sampai menghindar dan sembunyi.

Yondri juga menam-

bahkan, bukan saja persoalan pinjaman 4-5 juga ada banyak persoalan lainnya, soal moral dan etika terjadinya degradasi budaya dari pengaruh globalisasi informasi saat ini.

"Masyarakat tentunya perlu berbenah merubah diri kembali kepada budaya dan nilai-nilai agama terhadap tantangan kebutuhan dan kesulitan ekonomi dalam menghadapi semua ini", ajaknya.

Walinagari ini juga menyebutkan bangga dan senang atas kunjungan anak bako urang Tujuh Koto Talago Ketua DPRD Sumbar Supardi, SH yang begitu peduli terhadap pendidikan dan pengembangan pembangunan di nagari ini.

"Sudah lonyah oleh ketua DPRD Sumbar Supardi ke nagari Tujuh Koto Talago ini dan diketahui kepedulian terhadap anak-anak kurang mampu menjadi orang tua asuh", serunya.

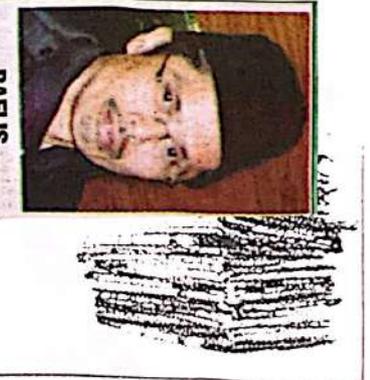
Ketua Tim III Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat juga didampingi oleh Danlanud Tabing Su-

tan Syahrir, Kepala Inspektoriat provinsi, Komisioner KPU, Sekretaris DPRD, Dinas PMD dan PTSP, Bank Nagari, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan, Kabag Kesra Pelayanan Dasar dan Humas Set DPRD Sumbar. (***)

KETUA DPRD Sumbar memberikan sambutan saat melakukan Safari Ramadhan di masjid Raya Tanjung Jati, Limapuluhkota



RAFLIS Sekretaris DPRD Sumbar





**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA



KETUA DPRD Supardi menyerahkan bantuan hibah Pemprov Sumbar untuk pembangunan masjid Raya Tanjung Jati sebesar Rp 50 juta .



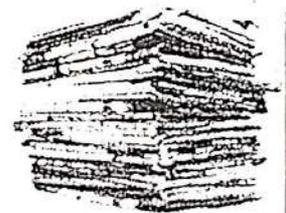
KETUA DPRD Sumbar Supardi usai memberikan sambutan.



PIHAK Bank Ngari juga menyerahkan Sumbangan Rp 10 juta .



KETUA DPRD Sumbar, Supardi Berbaur dengan Masyarakat





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
KHAZ	SENIN, 27 MARET 2023 SENIN 4 RAMADHAN 1444 H	10

Ketua DPRD Sumbar Sorot Kekerasan di Pesantren ICBS

Payakumbuh, Khazanah - Kekerasan yang terjadi di Sekolah Islam Terpadu Insan Cendekia Boarding School atau yang lebih dikenal sebagai Pesantren ICBS di Harau, Payakumbuh, disorot tajam Ketua DPRD Sumbar Supardi.

Saat dihubungi awak media, Jumat (3/3), ia juga mengkritik keras segala kekerasan yang terjadi di pesantren, tak hanya ICBS tapi semua pesantren secara keseluruhan.

"Yah kita heran kalau sekiranya betul ada aksi kekerasan yang berulang-ulang di sebuah pesantren nah berarti ada sesuatu yang salah di situ," tegasnya.

Bahkan ia juga meminta agar yayasan bertindak tegas jika ada pelanggaran yang terjadi baik itu dilakukan oleh siswa atau ustad yang mendampingi anak-anak selama mondok.

"Yayasan harus bertindak tegas dan jangan ditutup-tutupi sebab haknya wali murid harus tahu juga perkembangan anaknya di sekolah. Nggak boleh wali murid nggak boleh mengakses perkembangan anaknya karena ini kan masa depan generasi muda di tangan mereka," ungkapnya.

Padaahal, sambung dia, Pendidikan Pesantren atau Boarding School menjadi salah satu tempat favorit bagi orangtua untuk menitipkan harapan agar anak mendapat pendidikan yang lebih baik dan profesional.

Supardi juga mengatakan, di pesantren tidak boleh ada senioritas. Dan ia meminta adanya pengawasan yang ketat untuk memantau perilaku siswa.

"Ini pesantren ya bukan sekolah kayak IPDN atau STPDN atau sekolah semi militer ada junior dan senior, di pesantren tidak ada istilah senior dan junior. Yang ada adalah ini abangnya, ini adiknya abang menyayangi adiknya, adiknya yang menghormati abangnya. Tidak ada istilah kekerasan di situ seharusnya," jelasnya.

Karena sejak sore sampai



Ketua DPRD Sumbar, Supardi

sampai malam, sampai pagi sebelum belajar nah ustad tadi itu harus tahu pola anak-anaknya. Harus tahu karakter anak-anaknya.

"Jangan disamain! Ini Sumatera Barat, ini Payakumbuh," ungkapnya.

Apalagi anak kita itu berasal dari berbagai daerah dan dengan karakter yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda, maka pembinaanya atau gurunya harus betul-betul memahami karakter dari si anak tadi itu.

Ia juga berbicara makna kekerasan pada anak. Kalau ada pola kekerasan tergantung sudut pandang kita.

"Kalau saya melihat kekerasan itu merusak fisiknya dan mentalnya. Kalau ada yang luka, patah, terdeteksi oleh visum berarti itu kekerasan namanya dan itu tidak dibenarkan. Sesuai hadis, kalau anak usia 7 tahun tidak mau sholat ya dikasih tahu, dilacui. Tapi dilacui tu yo kakinyo jan pungguangnyo. Jan kapalonyo, jan badannyo, kakinya. Nah malacui ko ndak marusak. Ndak merusak organ, ndak merusak kulit. Ada batasan-batasan juga," ungkapnya dengan prihatin.

Ia juga mengkritik jika adanya ancaman atau intimidasi dari pihak sekolah yang mencoba untuk menakuti orangtua murid jika ada yang melaporkan peristiwa ini atau menyampaikan aksi protes.

Untuk itu, ia meminta jika ada terjadi tindak kekerasan di sekolah, orangtua murid jangan sungkan untuk mencari keadilan

dan menyibak kebenaran itu agar bisa ditindak lanjuti melalui pihak yang berwenang didalamnya.

"Pertama itu ada Komisi Perlindungan Anak ya, KPAI punya kewajiban dan teknishlah untuk mengungkap hal ini, diserahkan kepada yang ahli. Kedua ada psikiater, psikolog yang bisa mendeteksi kejiwaan anak tersebut seperti apa. Ketiga ada visum, nah visum itu menandakan sebuah kejadian jika merusak fisik itu terjadi kekerasan. Nggak mungkin rusak fisik anak tersebut dengan serta merta nggak mungkin pasti ada yang merusak. Siapa yang merusak? Nah tinggal tanya sama anak," ulasnya.

Sehingga ia meminta agar orangtua tidak perlu takut untuk mencari keadilan agar hal tersebut bisa terungkap. Dan ia juga menyampaikan kritikan ada ponpes untuk mengedukasi anak-anak dengan benar.

Karena untuk masuk di sekolah tersebut pasti menjalani serangkaian tes, sehingga seharusnya pihak sekolah sudah mengetahui kapasitas, kredibilitas, karakter dan latar belakang anak itu.

"Dari awal harusnya pihak sekolah dan yayasan mendeteksi si anak tersebut seperti apa karakternya dengan menggabungkan latar belakang bapak ibunya. Jadi kalau seandainya anak diterima di sekolah, artinya sekolah sudah siap menerima dalam kondisi apa pun siswa tadi itu," jelasnya. n lili yuniati





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SENIN, 27 MARET 2023	9.

LKPJ, Tolok Ukur Kinerja Gubernur

Supardi: Bentuk Pansus untuk Evaluasi

Laporan

► **HANDI YANUAR**
Harian Rakyat Sumbar

Ketua DPRD Sumbar, mengatakan, lembaganya akan mendalami LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, yang telah disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi. Oleh sebab itu, pihaknya akan membentuk Pansus membahas LKPJ tersebut.

"TENTU nanti kita perlu mendalami muatan dan laporan yang disampaikan oleh gubernur, untuk dapat melihat keberhasilan tersebut," kata Supardi, saat rapat paripurna dewan agenda Penyampaian nota pengantar LKPJ

dan pembentukan Pansus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumbar tahun 2022, di ruang sidang utama, gedung lembaga setempat, Jumat, (24/3).

Ia menyampaikan, LKPJ tersebut, digunakan sebagai bahan evaluasi atas kinerja kepala daerah selama satu tahun anggaran. LKPJ itu kewajiban kepala daerah, sebagai akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan sesuai dengan amanat

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

"Banyak indikator dan variabel yang digunakan untuk melihat dan mengukur kinerja gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah, antara lain capaian makro ekonomi daerah, capaian target kinerja program dan kegiatan pada tataran output dan outcome, serta kebijakan yang ditetapkan untuk mengoptimal-

kan pelaksanaan program tersebut," ucapnya.

Menurut Supardi, korelasi antara capaian target kinerja tahunan di dalam LKPJ masih cukup banyak belum selaras dengan target kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

"Dari aspek capaian target kinerja tahunan sudah cukup baik, tetapi setelah diakumulasikan

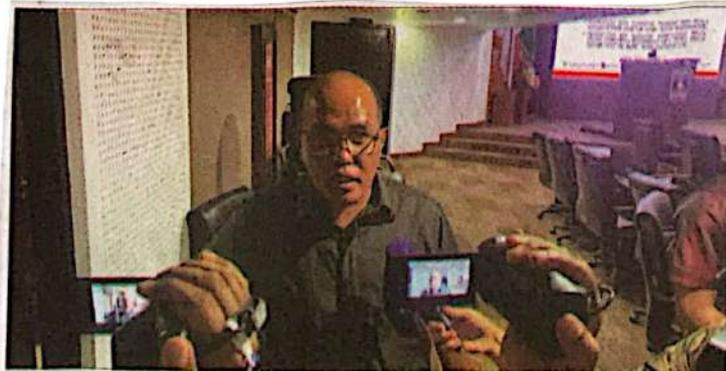
dengan target RPJMD, masih belum sejalan," ungkap Supardi.

Ia mengungkapkan, DPRD akan melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumbar, dengan Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

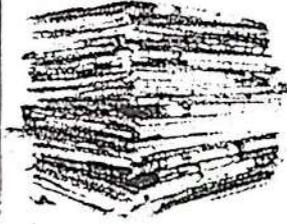
"Paling lambat 30 hari sejak LKPJ disampaikan oleh kepala

daerah kepada DPRD. Pembahasan itu sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019," sebutnya.

"Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD akan memberikan rekomendasi yang akan digunakan untuk perbaikan perencanaan, penganggaran dan pembentukan Perda/Perkada serta penetapan kebijakan strategis kepala daerah," tutup Supardi. (byr)



KETUA DPRD Sumbar, Supardi, saat rapat paripurna dewan agenda Penyampaian nota pengantar LKPJ dan pembentukan Pansus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumbar tahun 2022, di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Jumat, (24/3).



yang diberikan dari pembahasan LKPY tahun sebelumnya," ucap Supardi.

Menurut Supardi, karena tidak ada lagi LKPY akhir masa jabatan, sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka LKPY tahunan ini nanti akan menjadi akumulasi penilaian kinerja gubernur dan wakil gubernur diakhir masa jabatannya.

"Oleh sebab itu, DPRD sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu melihat secara lebih tajam kinerja gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai gubernur dan kewajibannya sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengatakan, LKPY bentuk pertanggungjawabannya sebagai kepala daerah untuk tahun kedua dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar 2021-2026.

"Dokumen LKPY kami susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana- naan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," tutur Mahyeldi. (byr)

2014," kata Ketua DPRD Sumbar Supardi, saat rapat paripurna.

Ia melanjutkan, LKPY tersebut disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LKPY digunakan sebagai bahan evaluasi atas kinerja Kepala Daerah selama satu tahun anggaran.

"Sesuai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, mutan LKPY mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pelaksanaan tugas pembantuan serta kepatuhan Kepala Daerah menjalankan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Padang, Rakyat Sumbar — Pihak DPRD Provinsi Sumbar, menerima nota pengantar LKPY Gubernur Sumbar, Mahyeldi, saat rapat paripurna devan agenda Penyan- paitan nota pengantar LKPY dan pembentukan Pansus LKPY Kepala Daerah Provinsi Sumbar tahun 2022, di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Jumat (24/3).

"Kepala Daerah berke- jiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPY) kepada DPRD sebagai representatif masyarakat, sebagai akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan ke- wajiban Kepala Daerah, sesuai dengan amanat Pasal 69 Un- dang-Undang Nomor 23 Tahun

PARIWARA DPRD SUMBAR DPRD Sumbar Teri ma Nota Pengantar LKPY Gubernur

HALAMAN	HARI / TANGGAL	KORAN
9	SENIN, 27 MARET 2023	Rakyat Sumbar

KLIPPING BERITA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Jln. Khalid Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 70599328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>





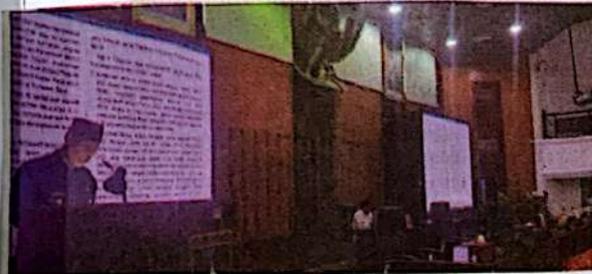
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar, Supardi, menerima nota pengantar LKPJ, dari Gubernur Sumbar, Mahyeldi, saat rapat paripurna dewan di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Jumat, (24/3).



GUBERNUR SUMBAR, Mahyeldi, menyampaikan LKPJ saat rapat paripurna dewan di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Jumat, (24/3).



SEKRETARIS DPRD Sumbar, Rafis, membacakan konsep keputusan DPRD, saat rapat paripurna dewan di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Jumat, (24/3).



KETUA DPRD Sumbar, Supardi, Gubernur Mahyeldi, Wakil Ketua Suwirpen Suib, Indra Datuak Rajo Lelo, dan Sekwan Rafis, foto bersama setelah penyerahan LKPJ saat rapat paripurna dewan di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Jumat, (24/3).



KETUA DPRD Sumbar, Supardi, Wakil Ketua Irsyad Syafar, Suwirpen Suib, Indra Datuak Rajo Lelo, dan Gubernur Mahyeldi, saat rapat paripurna dewan di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Jumat, (24/3).



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SENIN 27 MARET 2023	10



KETUA DPRD Sumbar, Supardi, menyerahkan bantuan hibah saat Safari Ramadan di masjid Raya Tanjung Jati, Limapuluh Kota, Jumat, (24/3) malam.

Supardi: Manfaatkan Masjid sebagai Pusat Pendidikan Moral

Padang, Rakyat Sumbar—Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengingatkan masyarakat supaya memanfaatkan masjid sebagai pusat pendidikan moral, selain tempat beribadah. Masjid sebagai pembentukan generasi cerdas.

"Kita perlu meningkatkan pemanfaatan masjid dalam kehidupan sehari-hari, selain sebagai tempat beribadah juga menjadi pusat pendidikan moral, budaya, serta pengembangan ekonomi masyarakat," kata Supardi, saat Safari Ramadan di masjid Raya Tanjung Jati, Limapuluh Kota, Jumat, (24/3) malam.

Ia melanjutkan, pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid dimanfaatkan sebagai pengembangan Islam, pendidikan, tempat bermusyawarah, membangun strategi perang selain dari tempat beribadah.

"Dahulu Nabi Muhammad SAW jika membuka wilayah baru di Madinah yang pertama-tama dibangun adalah masjid," ucap Supardi, yang juga Ketua Tim III Safari Ramadan Provinsi Sumbar.

Selain itu, sambung Supardi, seharusnya masyarakat menjadikan masjid sebagai tempat menyemai benih-benih generasi yang kuat, hebat dan cerdas dimasa datang.

"Pendidikan formal belum tentu mampu memberikan yang terbaik bagi semua generasi muda kita tentunya, dari masjid dengan didikan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kearifan lokal tentu akan

mampu melengkapi meningkatkan kemampuan anak-anak kita," ulasnya.

Ia mengajak masyarakat agar berperan dalam melahirkan generasi yang kuat, dan cerdas, tidak meninggalkan generasi yang lemah, membuat negeri ini hancur dan menderita.

"Jika perlu anak-anak kita ini belajar, bermain dan tidur di masjid, seperti halnya di masa lalu anak laki-laki tidur di surau," ungkap Supardi.

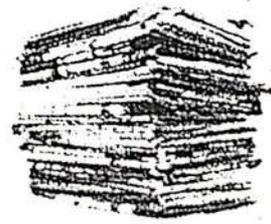
Sementara itu, Walinagari Tujuh Koto Talago, Yondri, menyampaikan, globalisasi informasi berdampak terhadap moral dan etika, sehingga terjadinya degradasi budaya.

"Masyarakat tentunya perlu berbenah mengubah diri, kembali kepada budaya, dan nilai-nilai agama terhadap tantangan kebutuhan dan kesulitan ekonomi dalam menghadapi semua ini," sebut Yondri.

Yondri menyebutkan, Ketua DPRD Sumbar, Supardi, anak bako urang Tujuh Koto Talago, sangat peduli terhadap pendidikan dan pengembangan pembangunan di nagari ini.

"Sudah lonyah (sering) oleh ketua DPRD Sumbar, Supardi ke Nagari Tujuh Koto Talago ini, dan diketahui kepedulian terhadap anak-anak kurang mampu menjadi orang tua asuh," pungkasnya.

Supardi juga menyerahkan bantuan hibah Pemprov Sumbar Rp50 juta pembangunan masjid Raya Tanjung Jati, dan tambahan sumbangan Rp10 juta dari Bank Nagari. (byr)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
PADANG	SENIN, 27 MARET 2023	8

Pemprov Alokasikan Bantuan Rp10,2 Miliar untuk 204

Masjid pada Ramadan Tahun Ini



AL AMIN

PADANG, KP - Pemprov Sumbar mengalokasikan bantuan Rp10,2 miliar untuk 204 masjid yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota dalam program rutin Safari Ramadhan pada tahun ini. Tim Safari Ramadhan Pemprov Sumbar (TSR) dibagi tiga, yaitu tim reguler, tim khusus, dan tim DPRD Sumbar.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumbar Al Amin mengatakan, tim reguler terdiri dari gubernur, wakil gubernur dan forkopimda yang ada

di Sumbar. Tim ini akan mengunjungi 12 masjid.

Selanjutnya ada tim khusus yang hanya terdiri dari gubernur dan wakil gubernur. Masing-masing unsur tersebut mengunjungi 19 masjid. Lalu tim DPRD Sumbar, sebanyak 65 anggota DPRD Sumbar masing-masing mengunjungi 2 masjid sehingga total ada 130 masjid.

"Jadi total masjid yang dikunjungi pada Ramadan tahun ini sebanyak 204 masjid," katanya.

Al Amin menyebut, TSR akan menyerahkan bantuan Rp50 juta per masjid. Masjid yang dibantu harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dan harus ada rekomendasi bupati dan wali kota.

Sementara bantuan dari tim khusus yang terdiri dari gubernur dan wakil, masjid harus

dalam kondisi pembangunan dan sangat dibutuhkan pemanfaatannya oleh masyarakat.

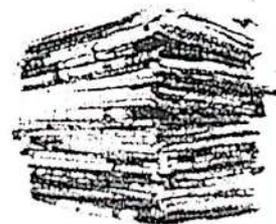
Tidak hanya Safari Ramadhan, pemprov juga menggelar dua agenda rutin lainnya yaitu singgah sahur dan perbaikan rumah tidak layak huni. Pada program singgah sahur, gubernur akan mengunjungi masyarakat yang tengah dalam kesulitan dan ikut sahur bersama dan menyerahkan bantuan yang bisa meringankan beban keluarga tersebut.

Untuk program singgah sahur, jelas Al Amin, gubernur akan mengunjungi 19 rumah keluarga miskin. Sementara wagub mengunjungi 12 rumah keluarga miskin.

"Melalui singgah sahur nanti, gubernur dan wagub nantinya juga merehab atau bedah RTLH

yang jumlahnya 31 unit," terangnya.

Menurutnya, anggaran program bedah RTLH dari Baznas Sumbar dengan jumlah bantuan Rp25 juta untuk masing-masing rumah, sehingga totalnya mencapai Rp775 juta. (fat)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
PADANG	SENIN, 27 MARET 2023	6

PARIWARA DPRD SUMBAR



GUBERNUR SAMPAIKAN NOTA PENGANTAR LKPJ 2022

DPRD Provinsi Sumbar Siap Berikan Rekomendasi

GUBERNUR Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2022 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Jumat (24/3) dalam rapat paripurna.

Terhadap LKPJ tersebut, DPRD Sumbar akan melakukan pembahasan dan pendalaman, paling lambat 30 hari sejak LKPJ kepala daerah ini disampaikan.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat memimpin jalannya rapat paripurna tersebut mengatakan, dalam akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewajiban kepala daerah, sesuai amanat Pasal 69 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD sebagai representatif masyarakat di daerah. LKPJ sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LKPJ, kata dia, digunakan sebagai bahan evaluasi atas kinerja kepala daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

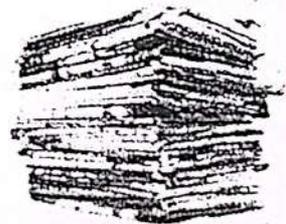
"Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019, muatan LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan tugas pembantuan serta kepatuhan kepala daerah dalam menjalankan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan dari pembahasan LKPJ tahun sebelumnya," ujar Supardi.

ia menambahkan, LKPJ kepala daerah tahun 2022, merupakan tahun kedua dari gubernur masa jabatan 2021-2025 Berhubung tidak adanya lagi LKPJ akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam PP

Nomor 13 Tahun 2019, maka LKPJ tahunan ini nanti akan menjadi akumulasi penilaian kinerja gubernur dan wakil gubernur diakhir masa jabatannya.

Oleh sebab itu, sambungnya, DPRD se-

bagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu melihat secara lebih tajam kinerja gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Banyak indikator dan variabel yang digunakan untuk melihat dan mengukur kinerja gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah, diantaranya capaian makro ekonomi daerah, capaian target kinerja program dan kegiatan pada tataran out-





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA

put dan outcome serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Capaian kinerja tersebut, tidak hanya dilihat dalam tataran angka- angka statistik yang dilaporkan oleh masing-masing OPD saja, akan tetapi juga akan dilihat bagaimana kondisi riilnya di lapangan. "Sangat mungkin, secara statistik capaiannya sudah cukup bagus, tetapi riilnya di lapangan masih ada yang tidak sesuai dengan angka-angka statistik tersebut," katanya.

Ia memaparkan, sebagai contoh konkret, dari rilis data laporan akhir tahun 2022 yang disampaikan oleh pemerintah daerah, hampir semua target kinerja program dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, mencapai di atas target yang ditetapkan. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan masih ada kondisi yang tidak sesuai dengan capaian target kinerja tersebut.

Di samping itu, korelasi antara capaian target kinerja tahunan yang terdapat dalam LKPJ masih cukup banyak yang belum selaras dengan target kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumbar 2021-2026. Dari aspek capaian target kinerja tahunan sudah cukup baik, tetapi setelah diakumulasi dengan target RPJMD, masih belum sejalan.

Lebih lanjut ia menyampaikan, tahun 2022, pasca berakhirnya pandemi covid-19 penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat sudah putih kembali seperti semula. Oleh sebab itu, DPRD menilai idealnya capaian kinerja kepala daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, jauh lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya yang berada pada masa pandemi Covid-19

Untuk dapat melihat keberhasilan tersebut, DPRD akan mendalami muatan dan laporan LKPJ yang disampaikan gubernur. Sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2019, DPRD akan melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sejak LKPJ disampaikan oleh kepada DPRD.

"Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD akan memberikan rekomendasi yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan perencanaan, penganggaran dan pembentukan perda/perkada serta penetapan kebijakan strategis kepala daerah," tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, LKPJ disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ia berharap, LKPJ tahun anggaran 2022 ini dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam memberikan saran, masukan dan rekomendasi serta

catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. (*)

HALAMAN



KETUA DPRD Sumbar Supardi menerima Nota Pengantar LKPJ kepala daerah 2022 dari Gubernur Sumbar.



KETUA DPRD Sumbar Supardi memimpin rapat paripurna.



PENYERAHAN Nota Pengantar LKPJ kepala daerah 2022 disaksikan dua Wakil Ketua DPRD Sumbar.



KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
PADANG	SENIN, 27 MARET 2023	5

Safari Ramadan Perdana, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Bentengi Generasi Muda Melalui Aktivitas Masjid



KETUA DPRD Sumbar Supardi menyerahkan bantuan saat melakukan safari ramadan perdana dengan mengunjungi Masjid Raya Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluhkota, Jumat (24/3).

LIMAPULUHKOTA, KP - Ketua DPRD Sumbar Supardi melakukan safari ramadan perdana dengan mengunjungi Masjid Raya Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluhkota, Jumat (24/3).

Pada kesempatan tersebut, Supardi mengajak masyarakat Nagari VII Koto menjadikan masjid sebagai sarana membentengi moralitas generasi muda dari fenomena sosial menyimpang di tengah masyarakat, salah satunya Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT). Dia mengatakan untuk persentase LGBT dan penyebaran narkoba di Sumbar saat ini cukup tinggi.

Supardi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Orangtua hendaknya menjaga anak-anak, begitu juga ninik mamak dan tokoh masyarakat.

Dalam agenda itu Ketua DPRD Sumbar Supardi menyerahkan bantuan dana hibah Tim Safari Ramadhan (TSR) pemerintahan provinsi sebesar Rp 50 juta untuk kelangsungan operasional masjid, begitupun Bank Nagari juga menyalurkan bantuan sebesar Rp 10 juta. Bantuan yang diserahkan merupakan bentuk motivasi kepada pengurus dan warga sekitar, untuk

membuat program-program meramaikan masjid.

Sementara, Walinagari VII Koto Talago, Yondri, menjelaskan kondisi sosial masyarakat Kena-garian VII Koto Talago yang sering terjerat rentenir untuk meminjam permodalan usaha. Bahkan ada yang kesulitan membayar, terlebih bunganya semakin besar.

"Sehingga, saat cicilan pinjaman ditagih ada yang menghindar dan sembunyi," katanya.

Ia juga mengungkapkan rasa bangga atas kunjungan anak bako rang VII Koto Talago, Ketua DPRD Sumbar Supardi, yang peduli terhadap pendidikan dan pembangunan di nagari.

"Sudah 'lonyah' Nagari VII Koto Talago ini oleh Pak Ketua DPRD Sumbar," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Supardi menyerahkan bantuan hibah Pemprov Sumbar untuk pembangunan Masjid Raya Tanjung Jati sebesar Rp50 juta dan tambahan sumbangan dari Bank Nagari Rp10 juta.

Turut hadir Danlanud Sutan Sjahrir, Kepala Inspektorat Sumbar, Komisioner KPU, Sekretaris DPRD, Dinas PMD dan PTSP, Bank Nagari, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan, Kabag Kesra Pelayanan Dasar dan Humas Set DPRD Sumbar. (fai)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
PADANG	SENIN, 27 MARET 2023	2.

180 Ribu Lebih Penduduk Usia Kerja di Sumbar Menganggur

PADANG, KP - Sekitar 180 ribu lebih penduduk usia kerja di Sumbar menganggur. Kondisi itu terungkap saat sidang paripurna nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022 di DPRD Sumbar, Jumat (24/3).

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengungkapkan, tahun 2022 penduduk usia kerja Sumbar mencapai 4,14 juta orang. Dari jumlah tersebut, 2,87 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja. Rinciannya, 2,69 juta orang bekerja dan pengangguran 180,10 ribu orang.

Sementara, jumlah bukan angkatan kerja mencapai 1,27 juta orang yang terdiri dari penduduk yang bersekolah 387,77 ribu orang, mengurus rumah tangga 724,53 ribu orang, dan lainnya sebanyak 158,38 ribu orang.

"Angka tersebut merupakan modal utama bagi pembangunan Sumbar sekaligus tantangan untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk menyerap atau mengurangi angka pengangguran," kata Mahyeldi.

Dia menjabarkan, jumlah angkatan kerja di tahun 2022 didominasi oleh laki-laki mencapai 1,69 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjanya (TPAK) sebesar 82,58 persen. Sementara angkatan kerja perempuan sebesar 1,18 juta orang dengan TPAK 56,28 persen. Sedangkan jumlah bukan angkatan kerja didominasi perempuan sebanyak 913,87 ribu orang dan laki-laki 356,81 ribu orang.

Mahyeldi mengatakan, hampir separoh dari jumlah wanita usia produktif tergolong bukan angkatan kerja.

"Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat mendorong terciptanya industri rumah tangga secara terpadu, komprehensif, intensif, dan berkelanjutan, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi Sumbar," ujarnya.

Ditambahkannya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi (PE) Sumbar mengalami perlambatan dimana ekonomi yang sempat tumbuh 6,34 persen pada tahun

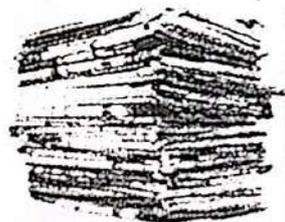
2011 justru terus menurun hingga hanya mencapai angka 5,05 persen pada tahun 2019.

Menurut Mahyeldi, pandemi covid-19 semakin memperparah kondisi perekonomian daerah yang berkontraksi sekitar -1,6 persen. Seiring dengan diterapkannya beberapa kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi secara intensif dan berkesinambungan, maka pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan termasuk di Sumbar dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada angka 3,29 persen. Namun, angka tersebut masih berada di bawah

rata-rata nasional yaitu 3,69 persen.

"Kondisi tersebut terus mengalami peningkatan, pada tahun 2022 berada pada angka 4,36 persen atau meningkat sebesar 1,07 persen. Namun masih di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 5,31 persen," papar Mahyeldi.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin jalannya rapat paripurna tersebut mengatakan, DPRD Sumbar akan melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap nota pengantar LKPJ kepala daerah tersebut, paling lambat 30 hari sejak LKPJ disampaikan. (fai)





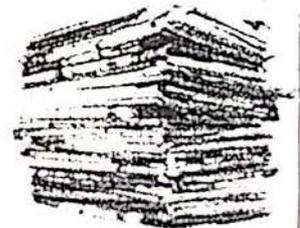
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln Khatib Sulaiman No 87 Telp 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA



GUBERNUR Sumbar Mahyeldi dan Ketua DPRD Sumbar Supardi serta unsur pimpinan DPRD, saat sidang paripurna nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022 di DPRD Sumbar, Jumat (24/3).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SENIN ■ 27 MARET 2023	8

Safari Ramadhan Ketua DPRD Sumbar Supardi

Siapkan Generasi Kuat, Cerdas dan Beriman

TIM III Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi dan rombongan mengunjungi Masjid Raya Tanjungjati, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluhkota, Jumat (24/3).

Dalam kesempatan itu sejumlah persoalan dikemukakan. Seperti disampaikan Wali Nagari VII Koto Talago Yondri. "Kita saat ini amat prihatin atas keresahan terhadap kondisi ekonomi masyarakat nagari yang terjerat pinjaman 4-5. Dan kadang-kadang sipeminjam kesulitan bayar saat ditagih sampai-sampai menghindari sembunyi," katanya.

Yondri juga menambahkan bukan saja persoalan pinjaman 4-5, juga ada banyak persoalan lainnya. Seperti soal moral dan etika terjadinya degradasi budaya dari pengaruh globalisasi informasi saat ini. Masyarakat tentunya perlu berbenah mengubah diri kembali kepada budaya dan nilai-nilai agama terhadap tantangan kebutuhan dan kesulitan ekonomi dalam menghadapi semua ini," katanya.

Dia juga menyebutkan bangga dan senang atas kunjungan anak bako urang VII Koto Talago, Ketua DPRD Sumbar Supardi. Yang begitu peduli terhadap pendidikan dan pengembangan pembangunan di nagari ini. "Sudah *lon-yah* (sering, red) oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi ke Nagari VII Koto Talago ini dan diketahui kepedulian terhadap anak-anak kurang mampu menjadi orang tua asuh," ujarnya.

Menyikapi itu, Ketua Tim III Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan

perlu meningkatkan pemanfaatan masjid dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain menjadi tempat beribadah juga menjadi pusat pendidikan moral, budaya serta juga pengembangan ekonomi masyarakat.

"Dahulu Nabi Muhammad SAW jika membuka wilayah baru di Madinah yang pertama-tama dibangun adalah masjid. Dimana masjid

di pakai untuk pengembangan Islam, pendidikan, tempat bermusyawarah, membangun strategi perang selain dari tempat beribadah," ujar Supardi.

Ketua DPRD Sumbar Supardi juga mengimbau masyarakat ikut serta berperan dalam melahirkan generasi yang kuat dan cerdas bukan meninggalkan generasi yang lemah membuat negeri ini hancur dan menderita. Bagi masyarakat seharusnya menjadikan masjid sebagai tempat menyemaikan benih-benih generasi yang kuat, hebat dan

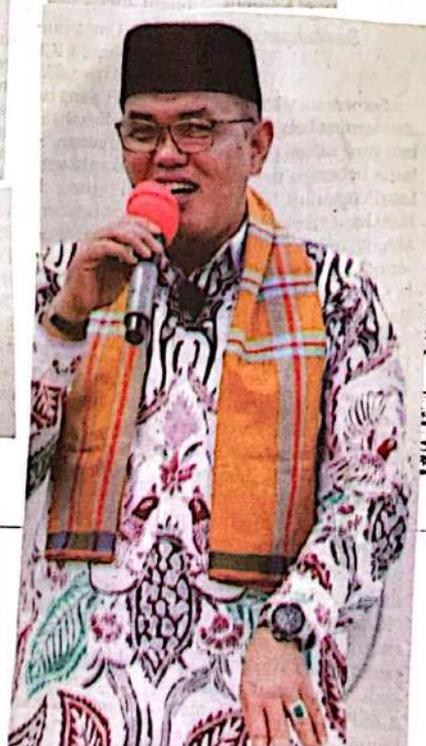
cerdas dimasa datang.

"Pendidikan formal belum tentu mampu memberikan yang terbaik bagi semua generasi muda kita tentunya. Dari masjid dengan didikan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kearifan lokal tentu akan mampu melengkapi meningkatkan kemampuan anak-anak kita," ungkapny.

Supardi juga menekankan, jika perlu anak-anak agar belajar, bermain dan tidur di masjid seperti halnya dimasa lalu anak laki-laki tidur di surau.

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Sumbar Supardi menyerahkan bantuan kepada Pemprov Sumbar untuk pembangunan Masjid Raya Tanjungjati sebesar Rp 50 juta dan juga ada tambahan sumbangan dari Bank Nagari Rp 10 juta.

Ketua Tim III Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat juga didampingi oleh Danlanud Sutan Sjahrir, Kepala Inspektorat Provinsi, Komisioner KPU, Sekretaris DPRD Sumbar, Dinas PMD dan PTSP, Bank Nagari, Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Kabag Kesra Pelayanan Dasar dan Humas Sekretariat DPRD Sumbar. (*)



KLIPPING BERITA

HALAMAN



KETUA Tim III Safar Ramadhan Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua DPRD Sumbar Supardi menyerahkan bantuan Pemprov Sumbar secara simbolis pada pengurus Masjid Raya Tanjungati, Nagari VII Koto Talago, Jumat (24/3).



KETUA DPRD Sumbar Supardi dan tim III Safar Ramadhan menyakikan penyerahan bantuan oleh Bank Nagari ke pengurus Masjid Raya Tanjungati.



JAMAAH Masjid Raya Tanjungati, Nagari VII Koto Talago antusias menyambut kedatangan Tim III Safar Ramadhan Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi.



MASJID Raya Tanjungati, Nagari VII Koto Talago



KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
	SENIN, 27 MARET 2023 5 Ramadan 1444 H	6

KETUA DPRD SUMBAR SUPARDI

Bentengi Moral Generasi Muda Melalui Aktivitas Masjid

LIMA PULUH KOTA, HALUAN - Mengawali agenda Safari Ramadan 1444 Hijriah, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyambangi Masjid Raya Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jumat (24-25/3).

Pada kesempatan itu Supardi mengajak masyarakat Nagari VII Koto Talago menjadikan masjid sebagai sarana membentengi moralitas generasi muda dari fenomena sosial menyimpang di tengah masyarakat, salah satunya Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT).

"Untuk sekarang kita dirisaukan dengan penyakit yang berasal dari manusia itu sendiri, seperti perilaku seksual menyimpang (LGBT) hingga tingginya peredaran narkoba, untuk itu perlu langkah antisipasi dengan menghidupkan aktivitas masjid," katanya.

Dia mengatakan untuk persentase LGBT dan penyebaran narkoba di Sumbar, cukup

tinggi. Prinsipnya dengan banyak menghabiskan waktu di masjid, maka akan didapatkan perlindungan dari yang maha kuasa. "Kita yakin dan percaya akan hal itu," ucapnya.

Ia berharap masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat beribadah, namun lebih dari itu hendaknya bisa dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat yang memprioritaskan penanaman nilai-nilai moral kepada generasi muda.

Dalam agenda itu Ketua DPRD Sumbar Supardi menyerahkan bantuan dana hibah Tim Safari Ramadhan (TSR) pemerintahan provinsi sebesar Rp 50 juta untuk kelangsungan operasional masjid, selain itu ada juga bantuan dari Bank Nagari sebesar Rp 10 juta.

Bantuan yang diserahkan merupakan bentuk motivasi kepada pengurus dan warga sekitar, agar membuat program-program yang bisa meramaikan masjid.

"Kita ingin masyarakat yang beribadah di Masjid Raya

Tanjung Jati bisa merasa nyaman," katanya.

Lebih lanjut Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Orang tua hendaknya menjaga anak-anak mereka, begitu juga ninik mamak dan tokoh masyarakat.

Sementara itu Wali Nagari VII Koto Talago, Yondri, menjelaskan kondisi sosial masyarakat Kenagarian VII Koto Talago yang sering terjerat rentenir untuk meminjam permodalan usaha kecil menengah. Bahkan ada juga yang kesulitan untuk membayar dan bunganya semakin besar.

"Tidak hanya persoalan rentenir, krisis moral juga menghantui generasi muda daerah ini," katanya.

Dia mengatakan, telah terjadi dregarasi moral terhadap generasi muda yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya perkembangan teknologi informasi, hal itu harus menjadi perhatian bersama.

Pada kunjungan itu Ketua DPRD Sumbar didampingi oleh Sekretaris DPRD Sumbar Rafliis, Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Peraturan Perundang-Undangan Zardi Syahrir dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas Protokol Dahrul Idris.

Tidak hanya didampingi unsur Sekretariat DPRD Sumbar, beberapa OPD Pemerintahan Provinsi (Pemprov) juga ikuti dalam agenda yang diikuti ratusan jemaah tersebut.

Adapun OPD tersebut adalah, Dinas PMD dan PTSP, Inspektorat hingga Kabag Kesra

dan Pelayanan Dasar. Juga tampak beberapa perwakilan Bank Nagari, Komandan Lanud Sutan Sjahrir, Komisioner KPU Sumbar, seluruh unsur tersebut merupakan rombongan TSR III Pemprov yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi. (len)



Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam kegiatan safari Ramadan di Masjid Raya Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jumat (24-25/3). ist



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Senin, 27 Maret 2023 (5 Ramadhan 1444 H)	5

GUBERNUR TELAH SAMPAIKAN NOTA PENGANTARNYA

DPRD Sumbar Mulai Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022

PADANG - SINGGALANG

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah sampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022 melalui rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (24/3).

Dengan disampainya nota pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022, DPRD Sumbar akan melakukan pembahasan dan pendalaman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak LKPJ kepala daerah ini disampaikan.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin jalannya rapat paripurna tersebut mengatakan, dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewajiban kepala daerah, sesuai amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD sebagai representatif masyarakat di daerah.

LKPJ sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LKPJ, kata dia, digunakan sebagai bahan evaluasi atas kinerja kepala daerah selama

1 (satu) tahun anggaran.

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, muatan LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan tugas pembantuan serta kepatuhan kepala daerah dalam menjalankan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan dari pembahasan LKPJ tahun sebelumnya," ujar Supardi.

Ia menambahkan, LKPJ kepala daerah tahun 2022, merupakan LKPJ tahun kedua dari gubernur masa jabatan tahun 2021-2025. Berhubung tidak adanya lagi LKPJ akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka LKPJ tahunan ini nanti akan menjadi akumulasi penilaian kinerja gubernur dan wakil gubernur diakhir masa jabatannya.

Oleh sebab itu, sambungnya, DPRD sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu melihat secara lebih tajam kinerja gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Banyak indikator dan variabel yang digunakan untuk melihat dan mengukur kinerja gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah, diantaranya capaian makro

ekonomi daerah, capaian target kinerja program dan kegiatan pada tataran output dan outcome serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Capaian kinerja tersebut, tidak hanya dilihat dalam tataran angka-angka statistik yang dilaporkan oleh masing-masing OPD saja, akan tetapi juga akan dilihat bagaimana kondisi rilnya di lapangan.

"Sangat mungkin, secara statistik capaiannya sudah cukup bagus, tetapi rilnya di lapangan masih ada yang tidak sesuai dengan angka-angka statistik tersebut," katanya.

Ia memaparkan, sebagai contoh konkrit, dari rilis data laporan akhir tahun 2022 yang disampaikan oleh pemerintah daerah, hampir semua target kinerja program dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, mencapai di atas target yang ditetapkan. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan masih ada kondisi yang tidak sesuai dengan capaian target kinerja tersebut.

Di samping itu, korelasi antara capaian target kinerja tahunan yang terdapat dalam LKPJ masih cukup banyak yang belum selaras dengan target kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dari aspek capaian target kinerja tahunan sudah cukup baik, tetapi setelah diakumulasikan dengan target RPJMD, masih belum sejalan.





KLIPING BERITA

Lebih lanjut ia menyampaikan, tahun 2022, pasca berakhirnya pandemi Covid-19 penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat sudah pulih kembali seperti semula. Oleh sebab itu, DPRD menilai idealnya capaian kinerja kepala daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada masa pandemi Covid-19.

Untuk dapat melihat keberhasilan tersebut, DPRD akan

mendalami muatan dan laporan LKPJ yang disampaikan gubernur. Sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, DPRD akan melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sejak LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

"Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD akan memberikan rekomendasi yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan perencanaan, anggaran dan pembentukan perda/perkada serta penetapan kebijakan strategis kepala daerah," tutupnya.

Supardi menambahkan, dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, dijelaskan bahwa pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ dilakukan oleh Panitia Khusus yang sebelumnya didahului dengan pembahasan oleh Komisi-Komisi.

Dengan telah disampaikan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan dibentuknya Panitia Khusus yang akan melakukan pembahasan dan penyusunan Rekomendasi DPRD, maka pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah dapat kita laksanakan dengan memperhatikan agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 21 Maret 2023.

Supardi menambahkan Sehubungan dengan pembahasan yang akan dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Panitia Khusus,

kami menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan nanti.

Pertama, esensi utama dari pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022, adalah merupakan akumulasi dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang telah dilakukan selama tahun 2022. Oleh sebab itu, dalam pembahasan nanti, DPRD tidak hanya bertumpu pada bahan-bahan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi juga memperhatikan hasil pengawasan dan rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2022.

Dalam pembahasan dan penyusunan rekomendasi nanti, lanjut Supardi, Komisi-Komisi dan Panitia Khusus dapat mempedomani Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Meskipun DPRD tidak dalam kapasitas menerima dan menolak LKPJ Kepala Daerah, namun pembahasan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tetap merupakan hal yang strategis dan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, DPRD perlu membahas dan

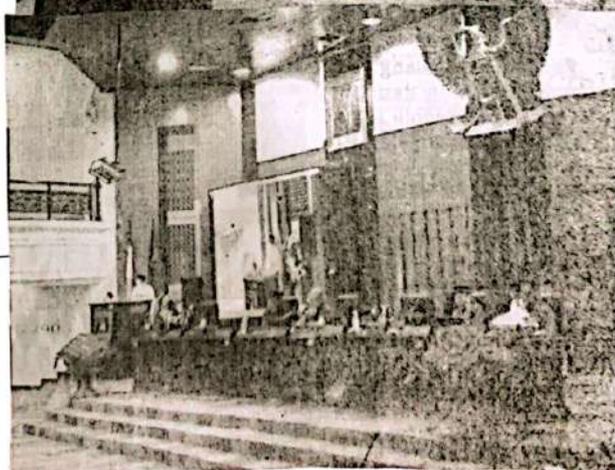
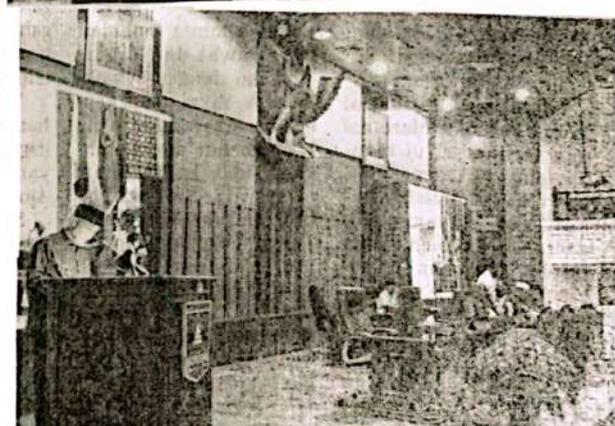
mendalami LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan sungguh-sungguh agar dapat mengukur kinerja Kepala Daerah dan memberikan rekomendasi yang strategis untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal kepada masyarakat Sumatera Barat.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, LKPJ disusun berdasarkan Per-

aturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ia berharap LKPJ Tahun Anggaran 2022 ini dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam memberikan saran, masukan dan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. (*)

LAMAN

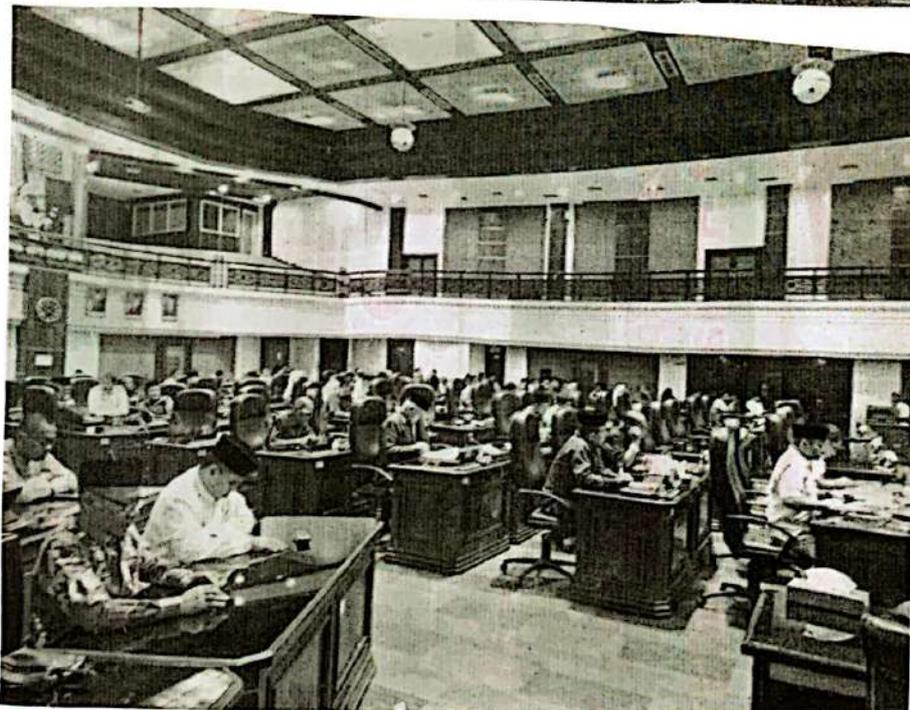
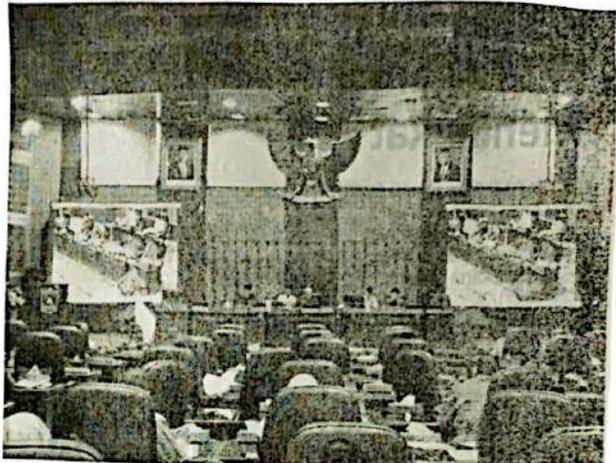




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Senin, 27 Maret 2023 (5 Ramadhan 1444 H)	3

KETUA DPRD SUMBAR MINTA PERKUAT AKTIVITAS MASJID Antisipasi Prilaku Menyimpang



SAFARI RAMADHAN - Ketua DPRD Sumbar, Supardi, serahkan bantuan dalam kunjungan ke Masjid Raya Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (24/3/2022) dalam rangka safari Ramadhan. (5s)

tua DPRD Sumbar didam-
pingi oleh Sekretaris DPRD
Sumbar Rafliis, Kepala
Bagian (Kabag) Persidang-
an Peraturan Perundang-
Undangan Zardi Syarif
dan Kepala sub bagian
(Kasubag) Humas Protokol
Dahrul Idris.

Tidak hanya didam-
pingi unsur Sekretariat
DPRD Sumbar, beberapa
OPD Pemerintah Provinsi
(Pemprov) juga ikuti da-
lam agenda yang diikuti
ratusan jamaah tersebut.

Adapun OPD tersebut
adalah, Dinas PTSP, In-
spektorat hingga Biro Bina
Mental dan Kesra Sumbar.
Juga tampak beberapa
perwakilan Bank Nagari,
Komandan Lanud Sutan
Sjahrir dan Anggota KPU
Sumbar, seluruh unsur
tersebut merupakan rom-
bongan TSR III Pemprov
yang dipimpin oleh Ketua
DPRD Sumbar Supardi.
(401)

Limapuluhkota, Singgalang
Awali agenda Safari
Ramadhan 1444 Hijriah,
Ketua DPRD Sumbar Su-
pardi, kunjungi Masjid
Raya Tanjung Jati, Nagari
VII Koto Talago, Keca-
matan Guguk, Kabupaten
Limapuluhkota, Jumat
(24/3) lalu.

Pada kesempatan terse-
but, Supardi mengajak
masyarakat Nagari VII
Koto menjadkan masjid
sebagai sarana memben-
tengi moralitas generasi
muda dari fenomena so-
sial menyimpang di te-
ngah masyarakat, salah
satunya Lesbian Gay Bi-
seksual Transgender (LGBT).

"Untuk sekarang kita
ditraktasikan dengan pena-
kiti yang berasal dari ma-
nusia itu sendiri, seperti
perilaku seksual menyim-
pang (LGBT) hingga ting-
ginya peredaran narkoba.
Untuk itu, perlu langkah
antisipasi dengan menghi-

dupkan aktivitas masjid
kepada generasi muda,"
katanya.
Dia mengatakan, untuk
persentase LGBT dan pe-
nyebaran narkoba di
Sumbar, cukup tinggi. Prin-
sipnya dengan banyak
menghabiskan waktu di
masjid, maka akan men-
dapatkan perlindungan
dari Yang Maha Kuasa.
"Kita yakin dan percaya
akan hal itu," ucapnya.
Dalam agenda itu, Ke-
tua DPRD Sumbar Supardi
menyerahkan bantuan
dana hibah Tim Safari
Ramadhan (TSR) pemerin-
tahan provinsi sebesar
Rp50 juta untuk kelangsun-
gan operasional masjid,
begitupun Bank Nagari
juga menyalurkan bantu-
an sebesar Rp 100 juta.

Bantuan yang diserah-
kan merupakan bentuk
motivasi kepada pengurus
dan warga sekitar, untuk
membuat program-pro-



KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Haliuan <small>Membaca Lebih Banyak</small>	SABTU, 25 MARET 2023 3 Ramadan 1444 H	8.

GUBERNUR SAMPAIKAN NOTA PENGANTAR LKPJ 2022

DPRD Sumbar Akan Dalami untuk Berikan Rekomendasi

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) *Mahyeldi Ansharullah* sampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022 melalui rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (24/3).

Dengan disampaikannya nota pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022, DPRD Sumbar akan melakukan pembahasan dan pendalaman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak LKPJ kepala daerah ini disampaikan.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin jalannya rapat paripurna tersebut mengatakan, dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewajiban kepala daerah, sesuai amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD sebagai representatif masyarakat di daerah.

LKPJ sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LKPJ, kata dia, digunakan sebagai bahan evaluasi atas kinerja kepala daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, muatan LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan tugas pembantuan serta kepatuhan kepala daerah dalam menjalankan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibenarkan dari pembahasan LKPJ tahun sebelumnya," ujar Supardi.

Ia menambahkan, LKPJ kepala daerah tahun 2022, merupakan LKPJ tahun kedua dari masa jabatan gubernur. Berhubung tidak adanya lagi LKPJ akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka LKPJ tahun ini nanti akan menjadi akumulasi penilaian kinerja gubernur dan wakil gubernur diakhir masa jabatannya.

Oleh sebab itu, sambungnya, DPRD sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu melihat secara lebih tajam kinerja gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Banyak indikator dan variabel yang digunakan untuk melihat dan mengukur kinerja gubernur dalam melaksanakan

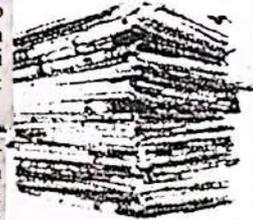
tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah, diantaranya capaian makro ekonomi daerah, capaian target kinerja program dan kegiatan pada tataran output dan outcome serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Capaian kinerja tersebut, tidak hanya dilihat dalam tataran angka-angka statistik yang

dilaporkan oleh masing-masing OPD saja, akan tetapi juga akan dilihat bagaimana kondisi rilisnya di lapangan.

"Sangat mungkin, secara statistik capaiannya sudah cukup bagus, tetapi rilisnya dilapangan masih ada yang tidak sesuai dengan angka-angka statistik tersebut," katanya.

Ia memaparkan, sebagai contoh konkrit, dari rilis data laporan akhir tahun 2022 yang disampaikan oleh pemerintah daerah, hampir semua target kinerja program dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, mencapai di atas target yang ditetapkan. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan





KLIPING BERITA

masih ada kondisi yang tidak tidak sesuai dengan capaian target kinerja tersebut.

Di samping itu, korelasi antara capaian target kinerja tahunan yang terdapat dalam LKPJ masih cukup banyak yang belum selaras dengan target kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dari aspek capaian target kinerja tahunan sudah cukup baik, tetapi setelah diakumulasi dengan target RPJMD, masih belum sejalan.

Lebih lanjut Ia menyampaikan, tahun 2022, pasca berakhirnya pandemi Covid-19 penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat sudah pulih kembali seperti semula. Oleh sebab itu, DPRD menilai idealnya capaian kinerja kepala daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada masa pandemi Covid-19.

Untuk dapat melihat keberhasilan tersebut, DPRD akan mendalami muatan dan laporan LKPJ yang disampaikan gubernur. Sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, DPRD akan melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sejak LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

“Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD akan memberikan rekomendasi yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan perencanaan, penganggaran dan pembentukan perda/perkada serta penetapan kebijakan strategis kepala daerah,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, LKPJ disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ia berharap LKPJ Tahun Anggaran 2022 ini dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam memberikan saran, masukan dan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. (adv)

/ TANGGAL	HALAMAN



GUBERNUR Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menyerahkan nota pengantar LKPJ Tahun 2022 kepada Ketua DPRD Sumbar, Supardi

— A



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPING BERITA

HALAMAN



RAPAT paripurna yang digelar DPRD Sumbar



GUBERNUR Mahyeldi serahkan nota pengantar LKPJ Tahun 2022 kepada Ketua DPRD Sumbar, Supardi



ANGGOTA DPRD Sumbar saat mengikuti rapat paripurna



KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SABTU, 25 MARET 2023	12

Gubernur Sumbar Sampaikan LKPj 2022 ke Dewan

Ekonomi Membaik, Pemban- gunaan Lancar

Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Jumat (24/3).

Dalam kesempatan tersebut Gubernur menyampaikan, LKPj ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah untuk Tahun kedua dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Banyak peningkatan dalam pelaksanaan program pembangunan Pro-

visi Sumatera Barat sepanjang Tahun 2022. Ini merupakan hasil sinergi, inovasi dan kinerja bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat.

"Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Su-

matara Barat Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan

saran dan masukan," harap Gubernur.

Gubernur juga menguraikan kondisi demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketenagakerjaan, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Ekspor dan impor dan Kondisi Kepariwisata Sumatera Barat yang rata-rata terjadi peningkatan.

Jumlah penduduk Sumatera Barat per 31 Desember 2022 sebanyak 5.664.988 jiwa. Jumlah ini meningkat sebanyak 60.531 jiwa atau 1,08% dibandingkan Tahun 2021 yang berjumlah sebanyak 5.604.457 jiwa.

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap IPM Sumatera Barat Tahun 2022 adalah 73,26, angka tersebut meningkat 0,61 poin dibandingkan tahun 2021 yang berada pada angka 72,65. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan IPM rata-rata Nasional yaitu sebesar 72,91.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pertumbu-

han ekonomi Sumatera Barat cenderung mengalami perlambatan, dimana ekonomi yang sempat tumbuh 6,34 persen pada

tahun 2011 justru terus menurun hingga hanya mencapai angka 5,05% pada tahun 2019.

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memperparah kondisi perekonomian daerah yang berkontraksi sekitar -1,6 persen. Pada tahun 2021 pertumbuhan

ekonomi mengalami peningkatan pada angka 3,29 persen dan angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu 3,69 persen. Pada tahun 2022 yang berada pada angka 4,36 persen, meningkat sebesar 1,07 persen.

Pemerintah Daerah juga serius terhadap sektor pertanian. Ini dibuktikan dengan penetapan kebijakan anggaran 10 persen dalam APBD Tahun 2022, yang tersebar pada 5 (lima) organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Perkembangan ekspor Sumatera Barat pada Tahun 2022 cenderung mengalami fluktuasi. Pada bulan Desember 2022, nilai ekspor Sumatera Barat tercatat sebesar US\$194,49 juta atau naik sebesar 7,27%. Ekspor asal Sumatera Barat pada Desember 2022 dikirim ke beberapa negara tujuan dengan nilai ekspor terbesar adalah ke Pakistan sebesar US\$80,38 juta, selanjutnya ke India sebesar US\$70,42 juta dan ke Spanyol sebesar US\$12,20 juta.

Selanjutnya nilai impor Sumatera Barat yang tercatat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sumatera Barat selama Desember 2022 sebesar US\$20,43 juta, mengalami penurunan sebesar 26,15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya berada pada angka US\$27,67 juta.

Perkembangan industri pariwisata tidak lepas dari jumlah kunjungan wisatawan yang ditinjau dari tiga indikator untuk mencerminkan perkembangan pariwisata di Sumatera Barat, yaitu Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel. Bulan Desember 2022 berdasarkan laporan yang masuk dengan rata-rata 58,62 persen atau mengalami peningkatan sebesar 5 poin dibanding TPK November 2022 yang tercatat sebesar 55,82 persen.

Mengenai Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Targetkan pendapatan daerah sebesar Rp.6.175.628.018.183,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD), APBD awal Rp. 2.613.763.216.691,00, APBD

perubahan Rp. 2.821.838.323.784,00, bertambah Rp. 208.075.107.093,00. Pendapatan Transfer, APBD awal Rp.3.227.209.603.600,00, APBD perubahan Rp.3.275.683.343.259,00, bertambah Rp.48.473.739.659,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, APBD awal Rp.83.308.303.660,00, APBD perubahan Rp.78.106.351.140,00, berkurang Rp.(5.201.952.520),00.

Dalam LKPj ini juga disampaikan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar. Mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan Peningkatan Ruang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi oleh Dinas Bina



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Kratoe Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133

<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KLIPPING BERITA

HALAMAN

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dan lainnya.

Disamping pencapaian berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun Anggaran 2022, tentunya masih ada berbagai persoalan dan tantangan yang belum dapat diselesaikan secara optimal, dan tentunya hal-hal tersebut harus kita selesaikan dan perbaiki sehingga tidak akan terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang.

Sebelumnya, dalam Pembukaan Paripurna Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menyampaikan, transparansi penyelenggaraan tugas dan kewajiban Kepala Daerah, sesuai dengan amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah berkewajiban

menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPP) kepada DPRD sebagai representatif masyarakat di daerah.

"LKPP Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, merupakan LKPP tahun kedua dari Gubernur Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2021-2025 dan sampai berakhirnya masa jabatannya, akan terdapat 2 (dua) LKPP lagi yang akan disampaikan kepada DPRD" terangnya.

DPRD sebagai institusi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu melihat secara lebih tajam kinerja Gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Gubernur Sumatera Barat.

"Capaian kinerja tersebut, tidak hanya dilihat dalam catatan angka-angka statistik yang dilaporkan oleh masing-masing OPD saja, akan tetapi juga perlu dilihat bagaimana kondisi dirinya di lapangan. Sangat mungkin, secara statistik capaiannya sudah cukup bagus, tetapi dirinya dilapangan masih ada yang tidak sesuai dengan angka-angka statistik tersebut," ujarnya. (***)



SAMPAIKAN LKPP — Gubernur Sumbar, Mahyeldi, sampaikan LKPP 2022 di hadapan anggota DPRD Sumbar.



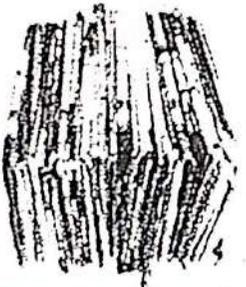
RAFLIS
Sekretaris DPRD Sumbar



MEMIMPIN RAPAT — Ketua DPRD Sumbar, Supardi, memimpin rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar LKPP Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.



SUASANA Rapat Paripurna





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU ■ 25 MARET 2023	4.

Rp10,2 Miliar untuk Safari

Ramadhan

Padang, Padek—Pemprov Sumbar menganggarkan Rp10,2 miliar untuk bantuan masjid selama kegiatan Safari Ramadhan. Total 204 masjid yang akan dikunjungi.

Selain itu juga ada bantuan bedah rumah tak layak huni Rp 77,5 juta, kerja sama dengan baznas kabupaten kota.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sumbar Al Amin saat jumpa pers yang digagas Dinas Kominfo Sumbar Jumat (24/3) mengatakan, tahun ini ada tiga agenda Safari Ramadhan, pertama untuk safari Ramadhan reguler, safari Ramadhan khusus dan Safari Ramadhan DPRD Sumbar.

Dalam jumpa pers yang dipimpin Sekprov Sumbar Hansastri dan Kepala Dinaskominfo Sumbar Siti Aisyah, Al Amin menyebut untuk Safari Ramadhan reguler sebanyak 12 tim diketuai oleh gubernur dan wakil gubernur serta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda). Tim reguler akan mengunjungi 12 masjid yang ada di kabupaten/kota.

Kemudian ada Safari Ramadhan khusus yang juga dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Tim khusus gubernur akan mengunjungi 19 masjid. Tim wakil gubernur juga akan mengunjungi 19 mesjid. Kemudian, sebanyak 65 orang Anggota DPRD Sumbar akan mengunjungi sebanyak 130 masjid. Masing-masing nantinya akan men-



SAMPAIKAN PROGRAM: Sekprov Sumbar Hansastri dan Kepala Dinaskominfo Sumbar Siti Aisyah saat jumpa pers program unggulan OPD di Dinas Kominfo Sumbar, Jumat (24/3)

dapatkan bantuan Rp 50 juta.

"Total sebanyak 204 masjid yang kita kunjungi pada Ramadhan tahun ini, hampir semuanya yang dibantu masjid," sebutnya.

Disebutkan Al Amin, kegiatan Safari Ramadhan selain untuk menyerahkan bantuan pembangunan masjid, juga upaya sosialisasi program pemerintah provinsi dan menyerap aspirasi masyarakat.

Program lainnya yang dilaksanakan Pemprov Sumbar yakni singgah sahur. Dilaksanakan oleh Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Jolinaldi mengunjungi masyarakat yang kurang beruntung. Ada bedah rumah tidak layak huni yang tersebar pada 19 kabupaten/kota di Sumbar.

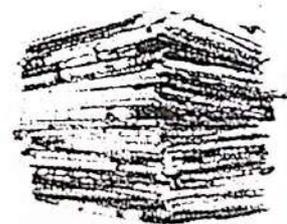
Perinciannya gubernur akan mengunjungi 19 rumah, sedangkan wakil gubernur akan mengunjungi sebanyak 12 rumah. Total ada 31 rumah

yang akan dikunjungi dengan singgah sahur.

"Rumah yang dikunjungi mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumbar masing-masing Rp25 juta satu rumah. Dengan itu total sebanyak Rp775 juta," tukasnya.

Disebutkan Al Amin, untuk masjid yang mendapatkan bantuan adalah yang mendapatkan rekomendasi dari kabupaten dan kota. Proposalnya sudah masuk sebelumnya. Mereka mendapatkan dana hibah yang penyerahannya simbolis pada Safari Ramadhan.

Sementara untuk bedah rumah tidak layak huni, mereka yang mendapatkan adalah hasil rekomendasi dari Baznas kabupaten dan kota. "Mereka yang dikunjungi adalah mereka yang tidak mampu, untuk itu setelah dikunjungi gubernur dilanjutkan dengan bedah rumah," pungkasnya. (wnl)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 25 MARET 2023	14

LKPj untuk Evaluasi Kinerja Kepala Daerah

Padang, Padek—Korelasi antara capaian target kinerja tahunan yang terdapat dalam LKPj Sumbang dinilai masih cukup banyak yang belum selaras dengan target kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Sumbang tahun 2021-2026. Dari aspek capaian target kinerja tahunan sudah cukup baik, tetapi setelah diakumulasikan dengan taget RPJMD, masih belum sejalan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbang Supardi dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar terhadap LKPj dan pembantuan Pansus LKPj kepala daerah tahun 2022, Jumat (24/3). Katanya banyak indikator dan variabel yang digunakan untuk melihat dan mengukur kinerja Gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah. Di antaranya capaian makro ekonomi daerah, capaian target kinerja program dan kegiatan pada tataran output dan outcome serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Capaian kinerja tersebut, tidak hanya dilihat dalam tataran angka-angka statistik yang dilaporkan oleh masing-masing OPD saja. Akan tetapi juga perlu dilihat bagaimana kondisi rilnya dilapangan. Sangat mungkin, secara statistik capaiannya sudah cukup bagus, tetapi rilnya dilapangan masih ada yang tidak sesuai dengan angka-angka statistik tersebut.

Sebagai contoh konkrit, dari rilis data

laporan akhir tahun 2022 yang disampaikan oleh pemerintah daerah, hampir semua target kinerja program dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, di atas target yang ditetapkan. Tetapi dalam kenyataannya dilapangan masih ada kondisi yang tidak sesuai dengan capaian target kinerja tersebut.

"Tahun 2022, pascaberakhirnya pandemi Covid-19 penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat sudah pulih kembali seperti semula. Oleh sebab itu, idealnya capaian kinerja kepala daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada masa pandemi Covid-19," katanya.

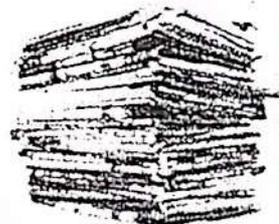
Sesuai dengan tugas dan kewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, DPRD akan melakukan pembahasan terhadap LKPj kepala daerah paling lambat 30 hari sejak LKPj disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. "Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD akan memberikan rekomendasi yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan perencanaan, penganggaran dan pembentukan perda/perkada serta penetapan kebijakan strategis kepala daerah," ujar Supardi.

Gubernur Sumbang Mahyeldi menyampaikan LKPj ini menguraikan mengenai kondisi demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketenagakerjaan, pertumbuhan eko-

nomi, nilai ekspor dan impor dan kondisi kepariwisataan Sumatera Barat. Katanya ada 4 komponen yang mempengaruhi penghitungan IPM, komponen-komponen tersebut adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun.

Untuk kondisi ketenagakerjaan, penduduk Sumatera Barat dibagi atas dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Tahun 2022 penduduk usia kerja di Sumatera Barat mencapai 4,14 juta orang. Dari penduduk usia kerja tersebut, 2,87 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari bekerja 2,69 juta orang dan pengangguran 180,10 ribu orang.

Mahyeldi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2022 seluruhnya mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022, Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni pada Kabupaten Padangpariaman dengan capaian 6,87 persen, diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 4,94 persen, Kota Bukittinggi dengan capaian sebesar 4,68 persen. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi terendah yakni Kabupaten Sijunjung dengan capaian 3,95 persen, diikuti dengan Kota Sawahlunto sebesar 3,98 persen dan Kabupaten Solok Selatan dengan capaian 4,02 persen dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan capaian 4,02 persen. (eko)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 25 MARET 2023	44

LKPj untuk Evaluasi Kinerja Kepala Daerah

Padang, Padek—Korelasi antara capaian target kinerja tahunan yang terdapat dalam LKPj Sumbang dinilai masih cukup banyak yang belum selaras dengan target kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Sumbang tahun 2021-2026. Dari aspek capaian target kinerja tahunan sudah cukup baik, tetapi setelah diakumulasikan dengan tagret RPJMD, masih belum sejalan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbang Supardi dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar terhadap LKPj dan pembantuan Pansus LKPj kepala daerah tahun 2022, Jumat (24/3). Katanya banyak indikator dan variabel yang digunakan untuk melihat dan mengukur kinerja Gubernur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah. Di antaranya capaian makro ekonomi daerah, capaian target kinerja program dan kegiatan pada tataran output dan outcome serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Capaian kinerja tersebut, tidak hanya dilihat dalam tataran angka-angka statistik yang dilaporkan oleh masing-masing OPD saja. Akan tetapi juga perlu dilihat bagaimana kondisi rilnya dilapangan. Sangat mungkin, secara statistik capaiannya sudah cukup bagus, tetapi rilnya dilapangan masih ada yang tidak sesuai dengan angka-angka statistik tersebut.

Sebagai contoh konkrit, dari rilis data

laporan akhir tahun 2022 yang disampaikan oleh pemerintah daerah, hampir semua target kinerja program dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, di atas target yang ditetapkan. Tetapi dalam kenyataannya dilapangan masih ada kondisi yang tidak sesuai dengan capaian target kinerja tersebut.

"Tahun 2022, pascaberakhirnya pandemi Covid-19 penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat sudah pulih kembali seperti semula. Oleh sebab itu, idealnya capaian kinerja kepala daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada masa pandemi Covid-19," katanya.

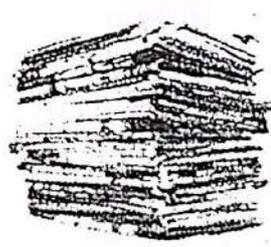
Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, DPRD akan melakukan pembahasan terhadap LKPj kepala daerah paling lambat 30 hari sejak LKPj disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. "Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD akan memberikan rekomendasi yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan perencanaan, penganggaran dan pembentukan perda/perkada serta penetapan kebijakan strategis kepala daerah," ujar Supardi.

Gubernur Sumbang Mahyeldi menyampaikan LKPj ini menguraikan mengenai kondisi demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketenagakerjaan, pertumbuhan eko-

nomi, nilai ekspor dan impor dan kondisi kepariwisataan Sumatera Barat. Katanya ada 4 komponen yang mempengaruhi penghitungan IPM, komponen-komponen tersebut adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun.

Untuk kondisi ketenagakerjaan, penduduk Sumatera Barat dibagi atas dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Tahun 2022 penduduk usia kerja di Sumatera Barat mencapai 4,14 juta orang. Dari penduduk usia kerja tersebut, 2,87 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari bekerja 2,69 juta orang dan pengangguran 180,10 ribu orang.

Mahyeldi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2022 seluruhnya mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022, Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni pada Kabupaten Padangpariaman dengan capaian 6,87 persen, diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 4,94 persen, Kota Bukittinggi dengan capaian sebesar 4,68 persen. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi terendah yakni Kabupaten Sijunjung dengan capaian 3,95 persen, diikuti dengan Kota Sawahlunto sebesar 3,98 persen dan Kabupaten Solok Selatan dengan capaian 4,02 persen dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan capaian 4,02 persen. (eko)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

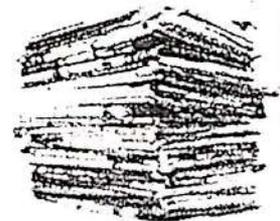
Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

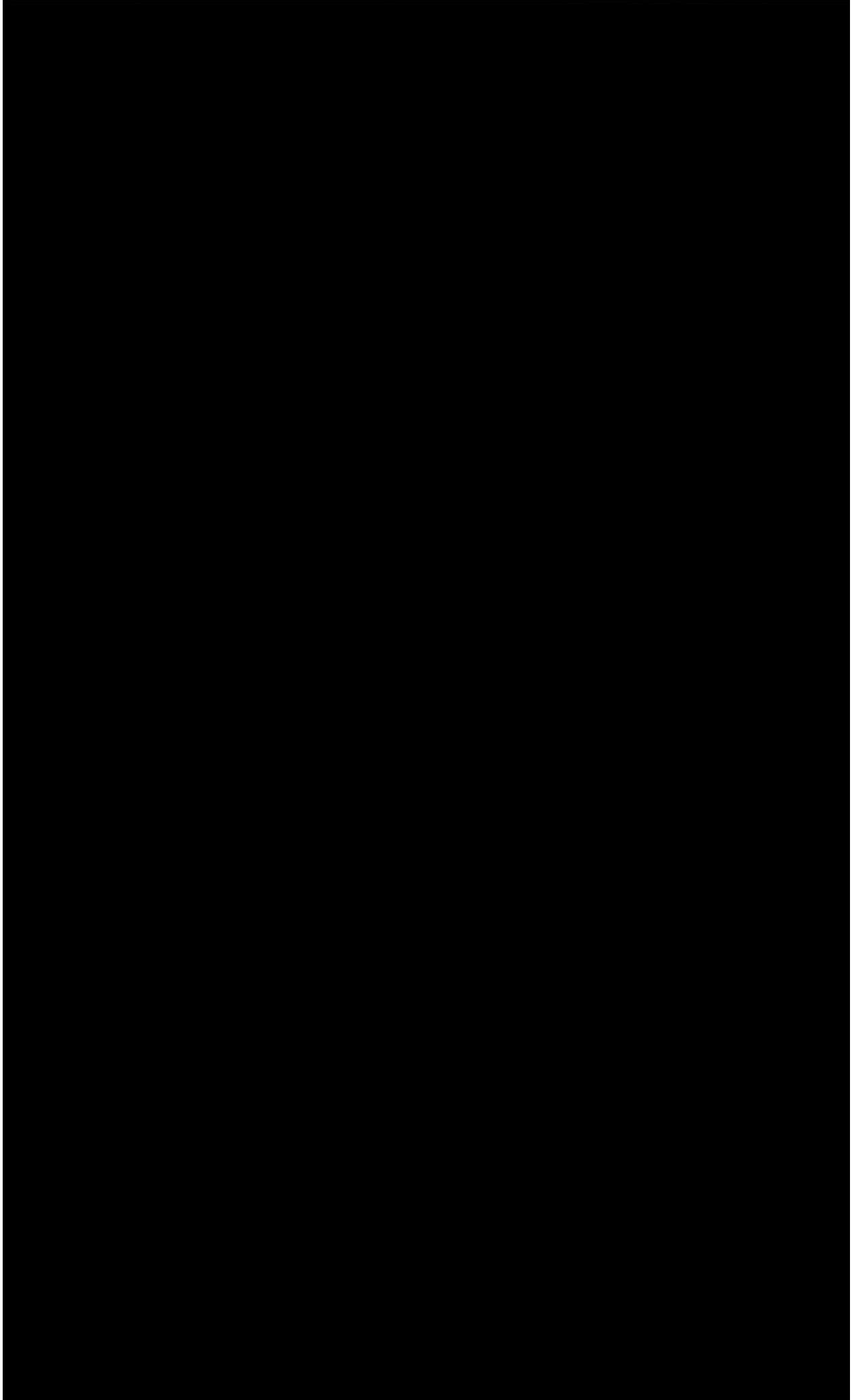
KLIPING BERITA

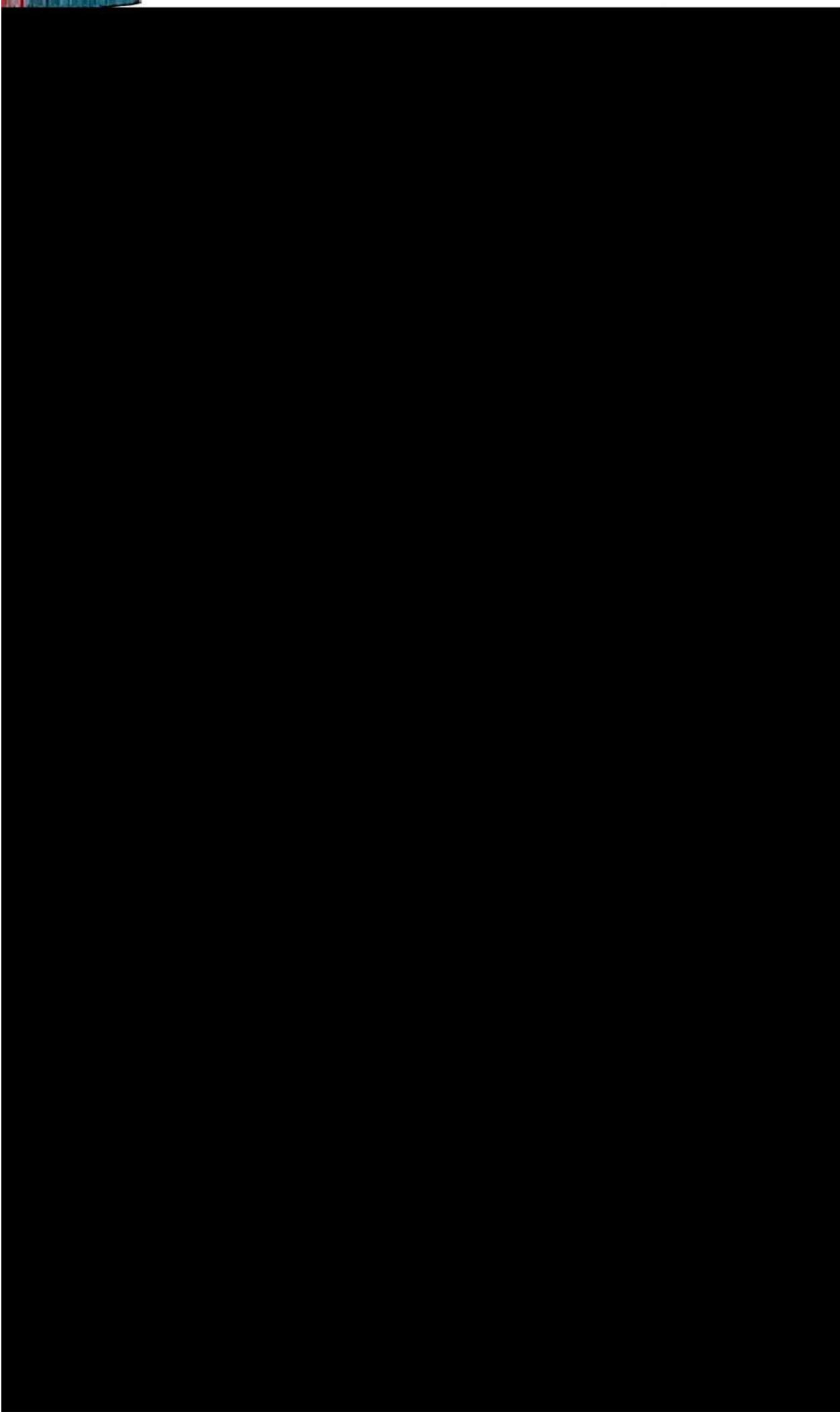


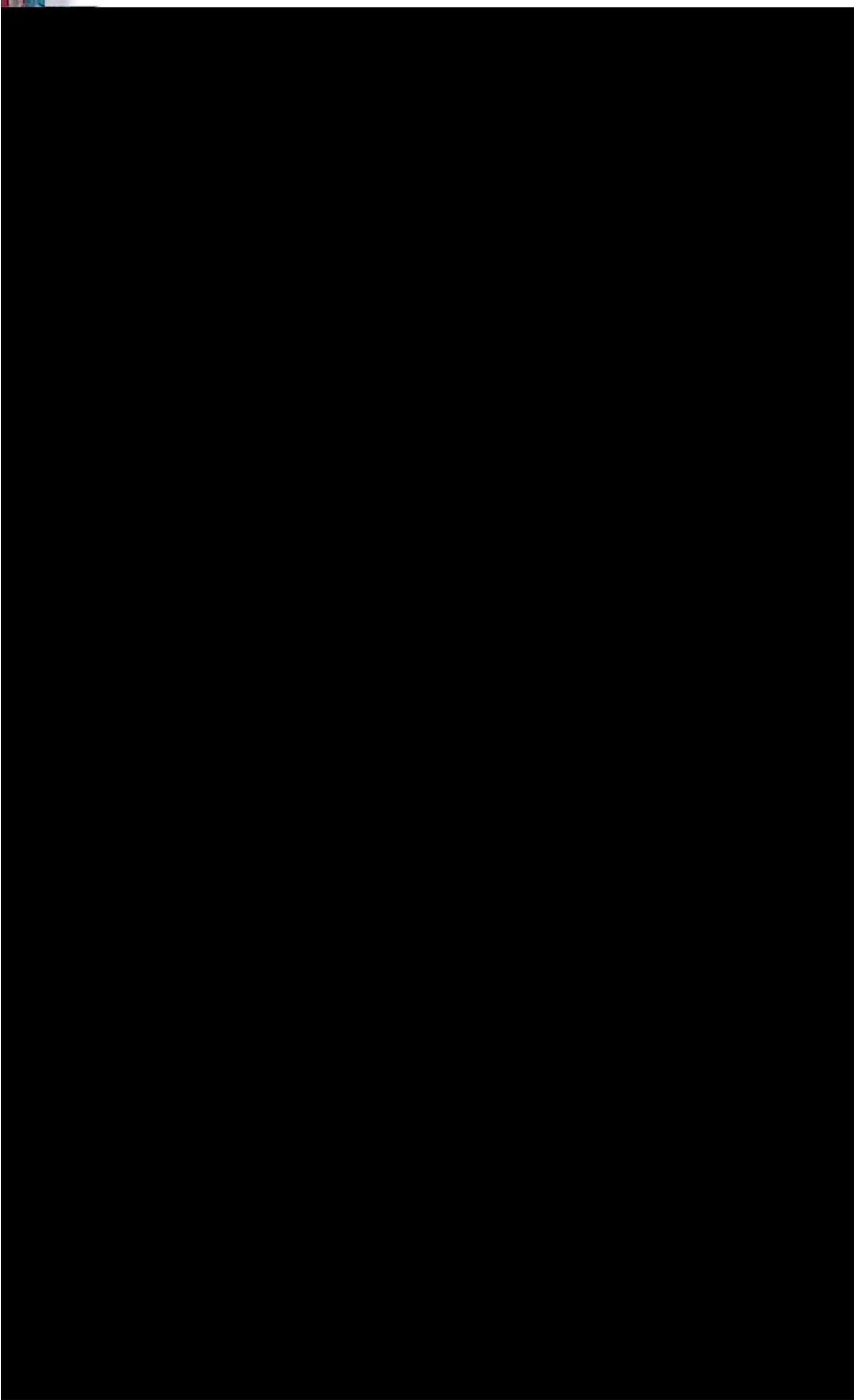
HUMAS DPRD SUMBAR

PENYERAHAN LAPORAN: Gubernur Sumbar Mahyeldi menyerahkan dokumen LKPj ke Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakil ketua dalam rapat paripurna penyampalan nota pengantar terhadap LKPj dan pembentukan Pansus LKPj kepala daerah tahun 2022, Jumat (24/3).











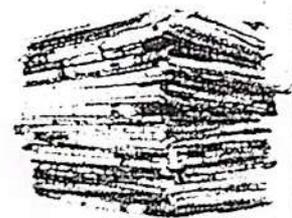
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

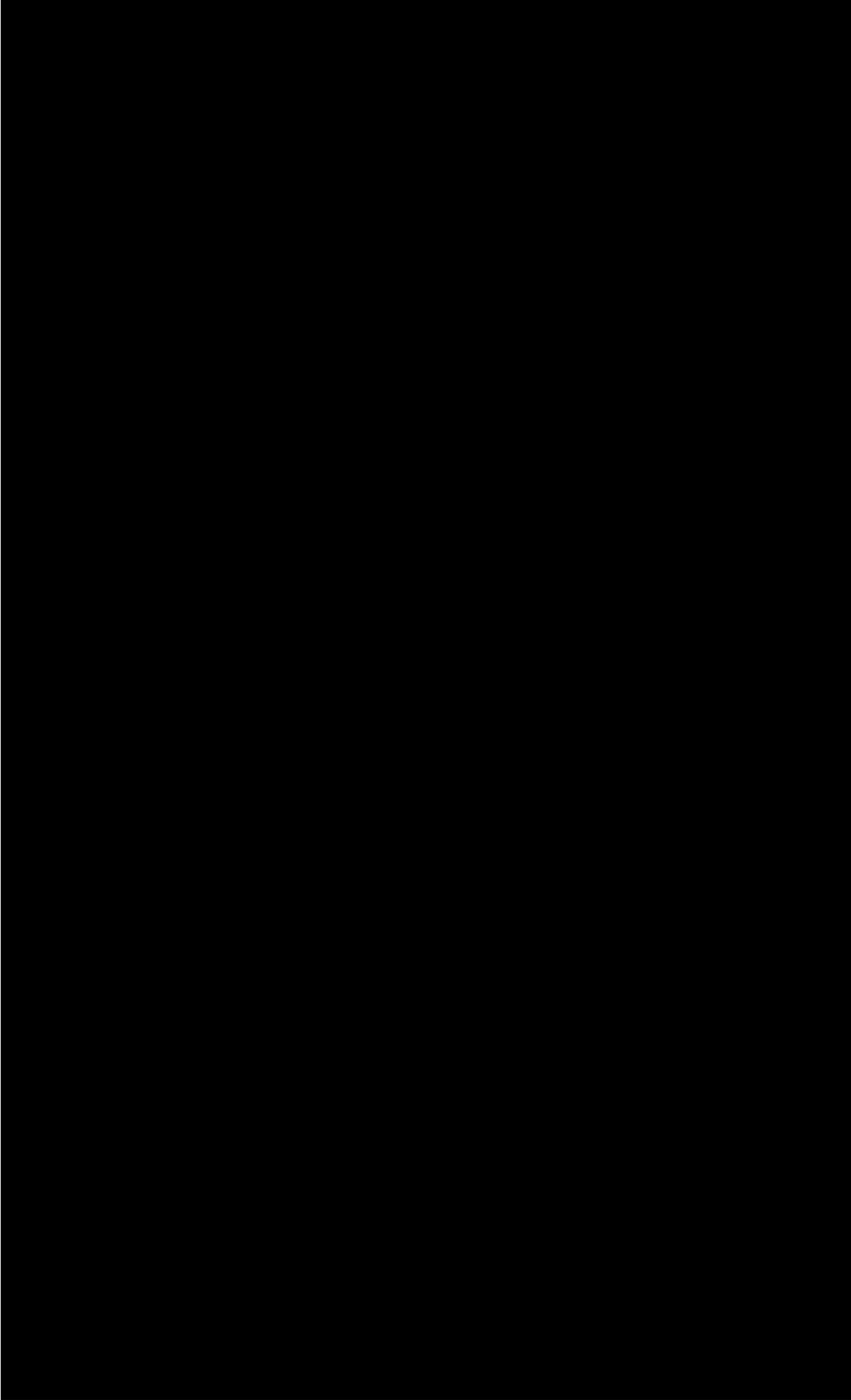
Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

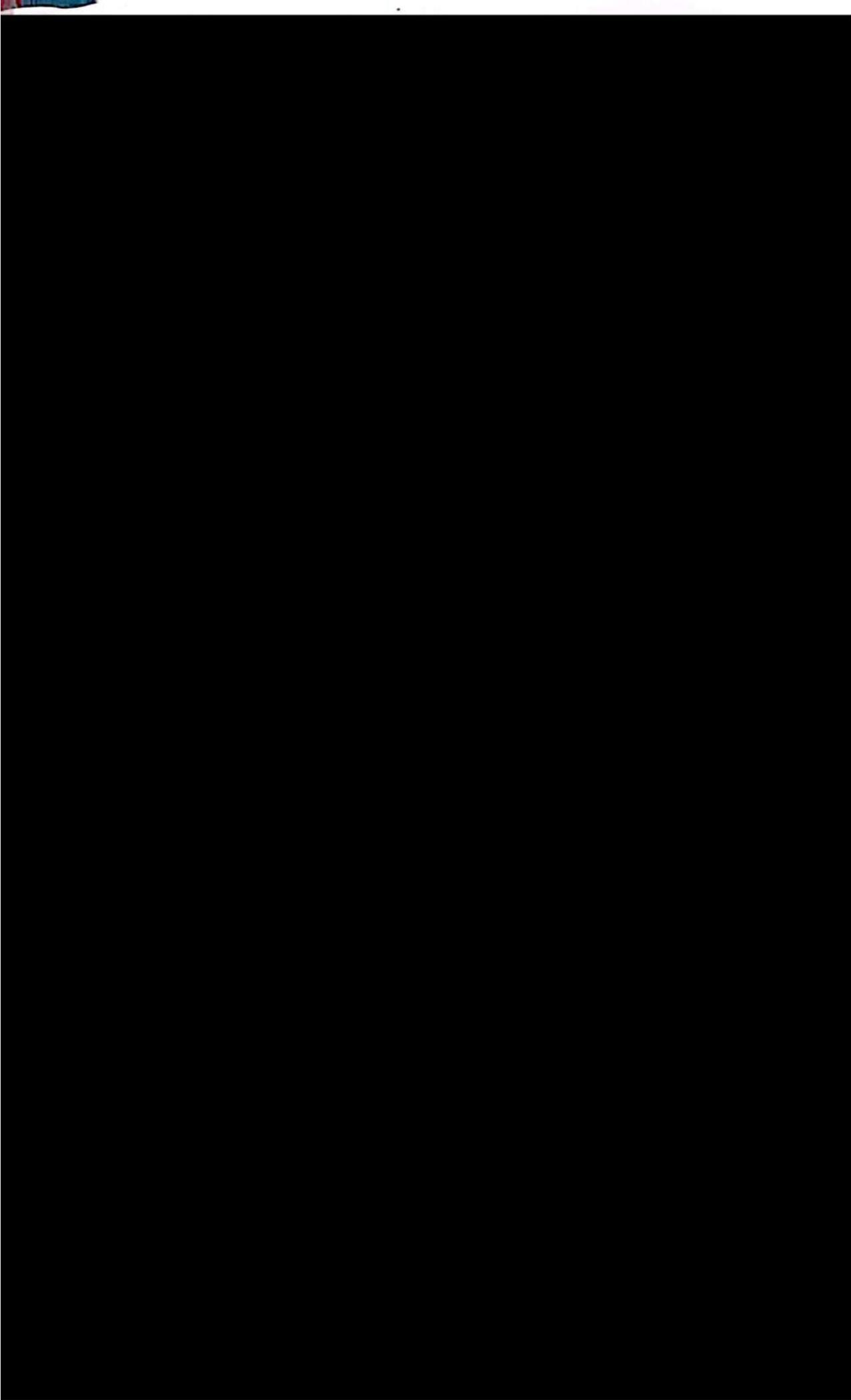
KLIPING BERITA

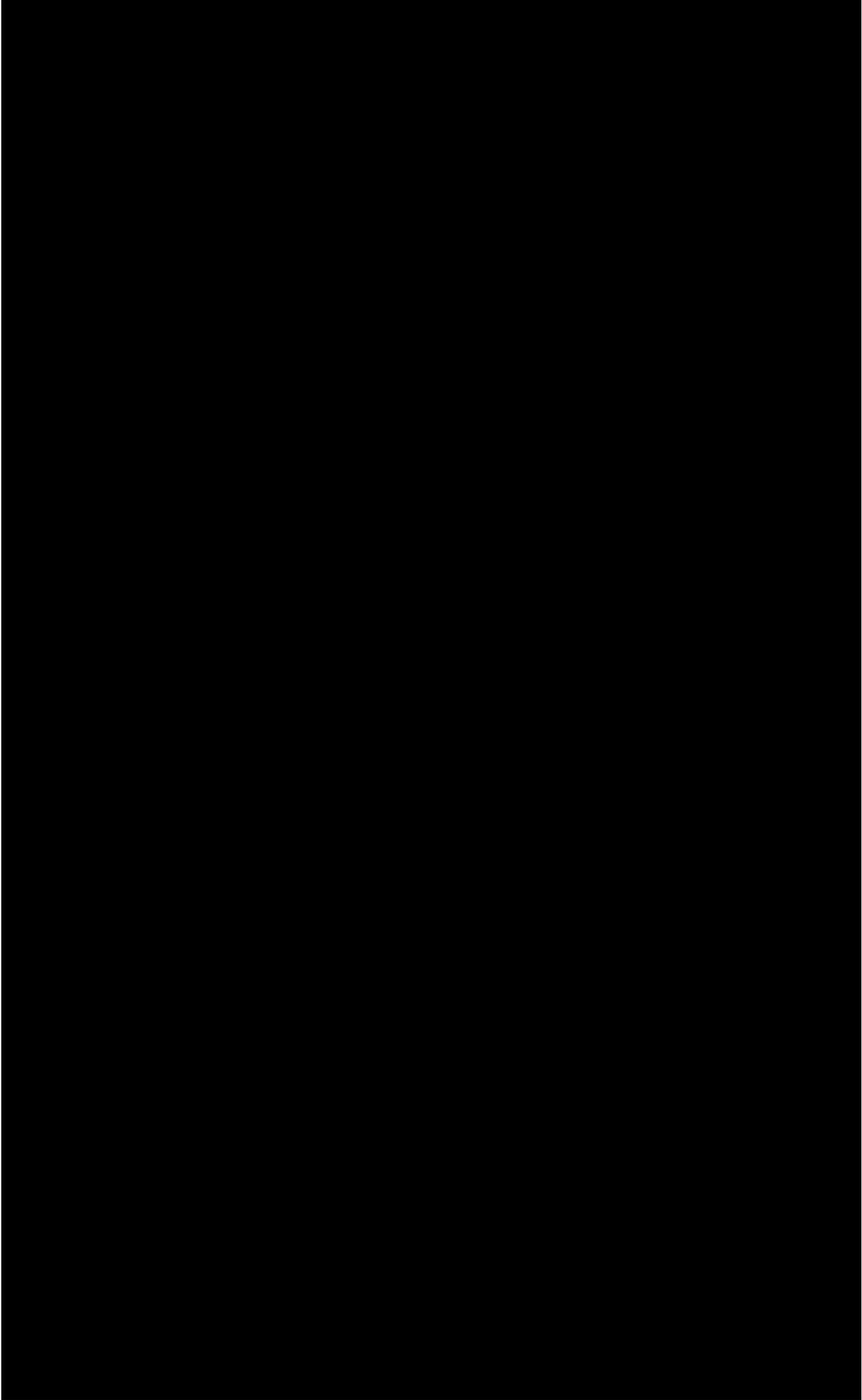


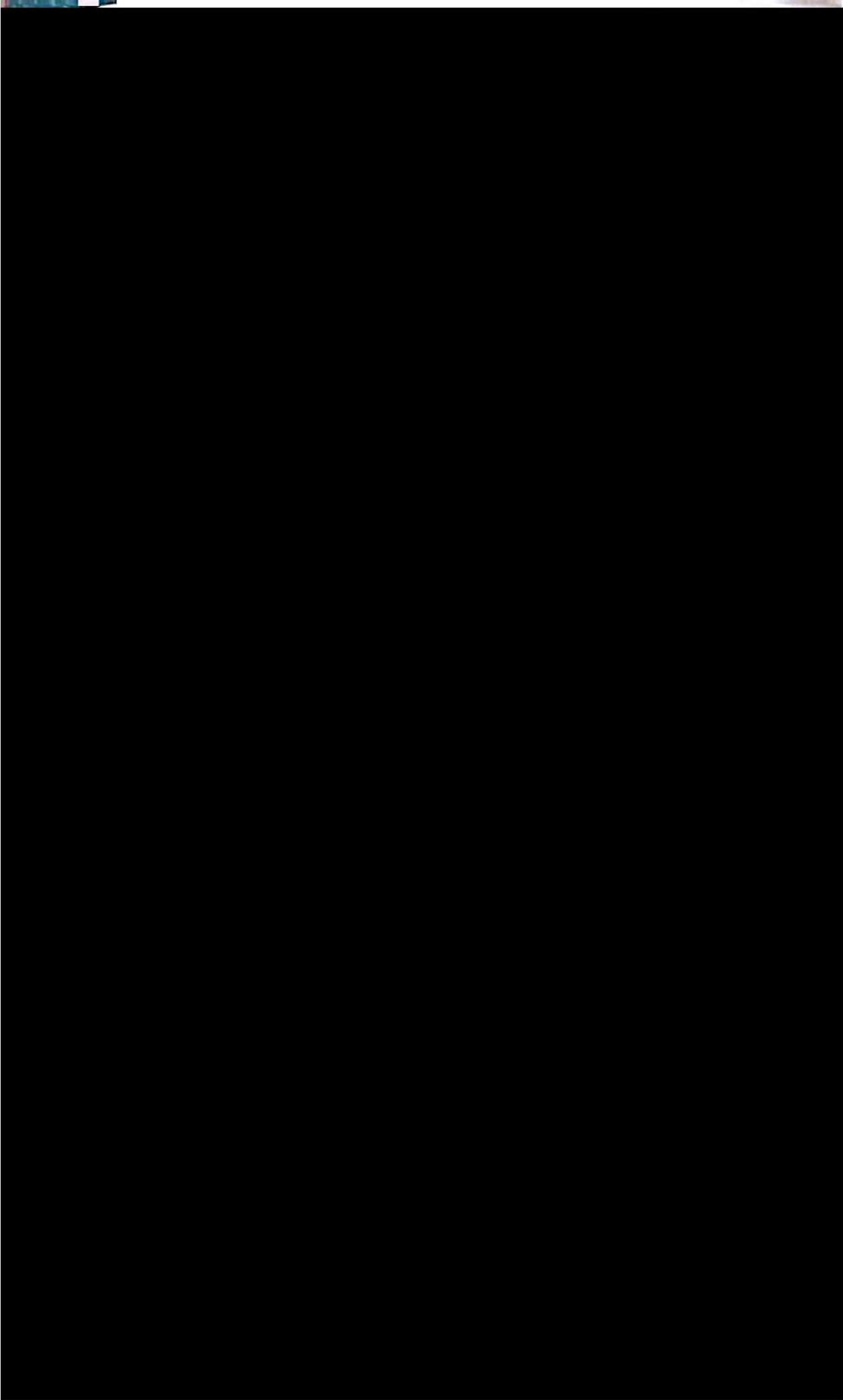
INTERNATIONAL GATHERING - Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat menghadiri International Gathering Sahabat Uzma di Uzma Center Nagari Sariak Laweh Kabupaten Limapuluh Kota, Minggu (19/3). (1st)

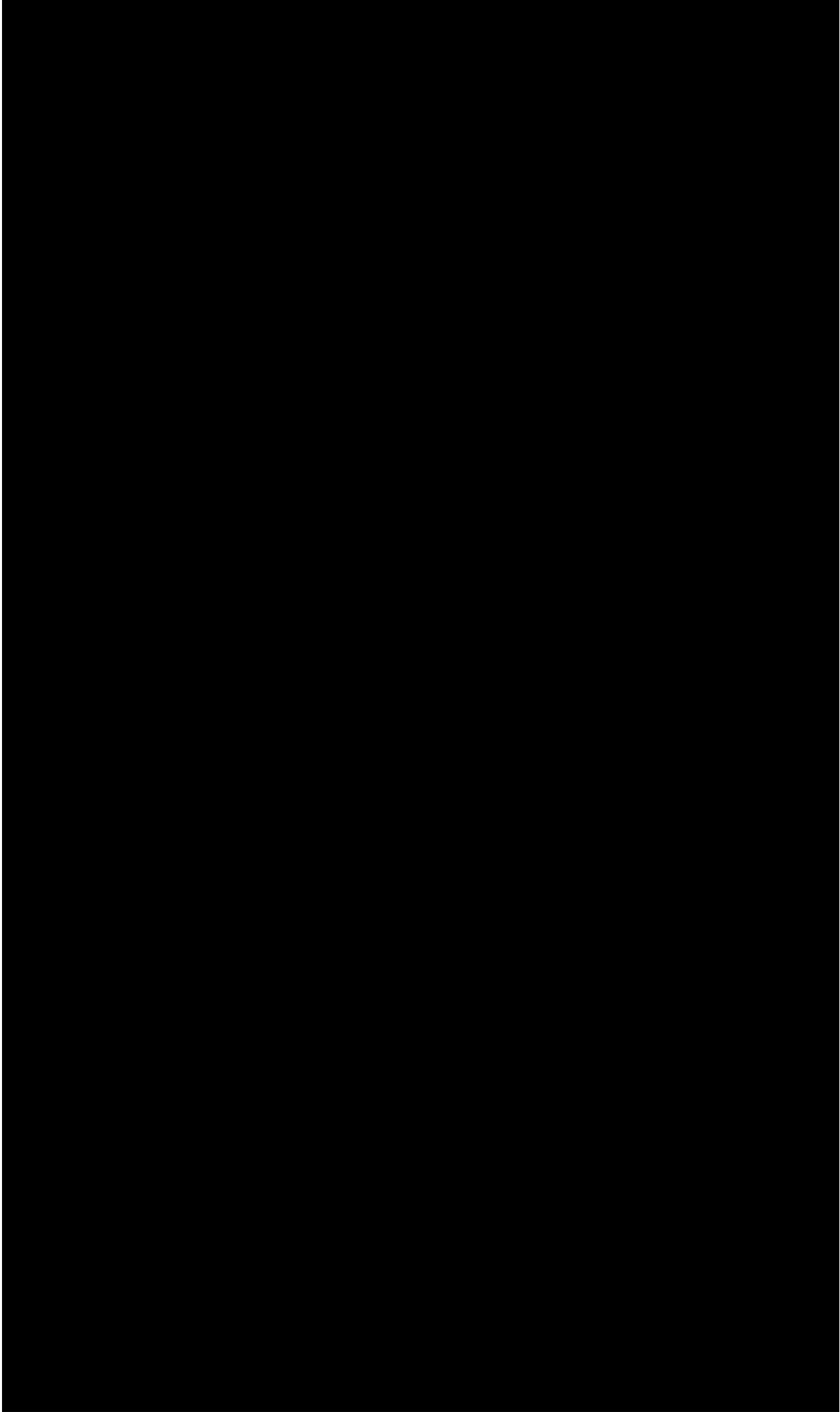


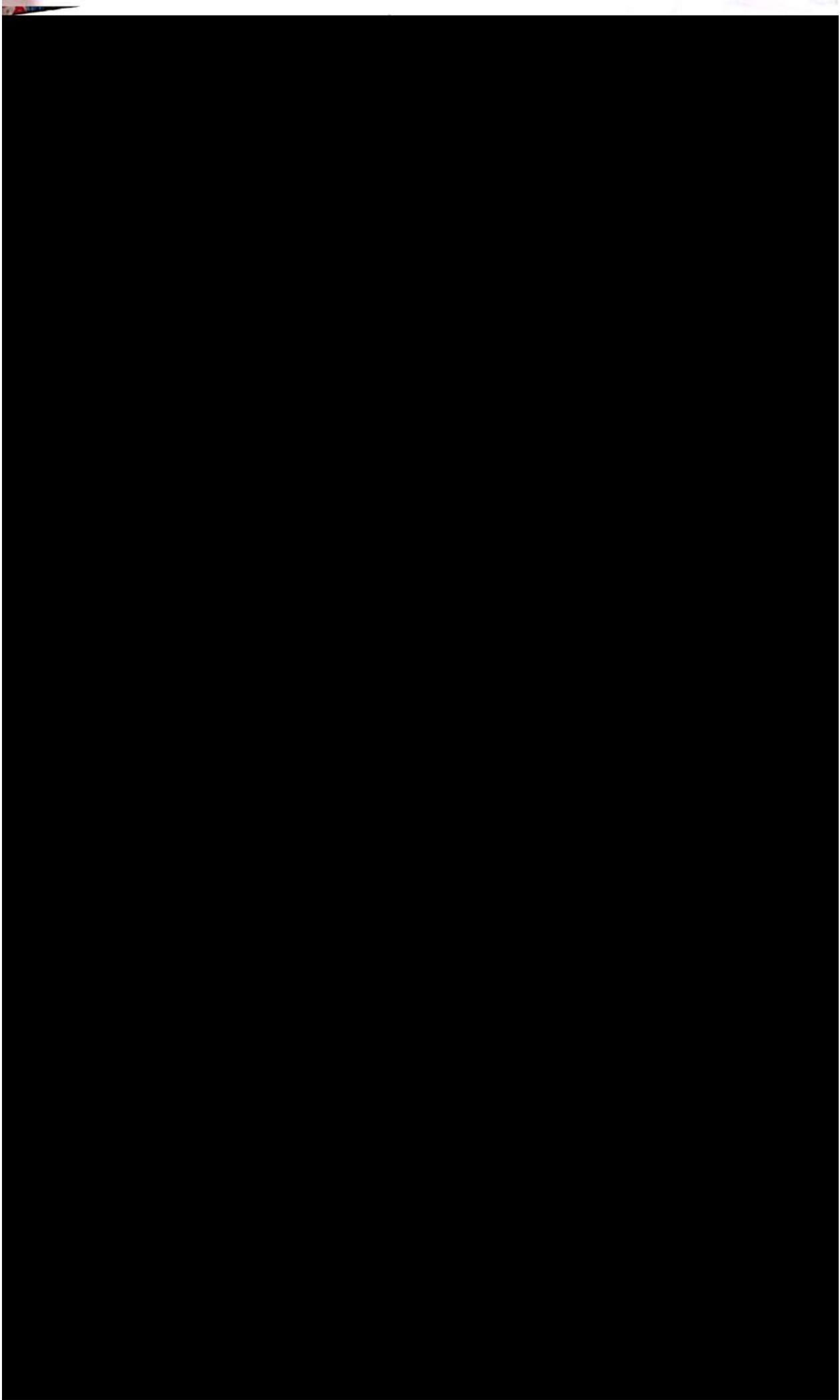


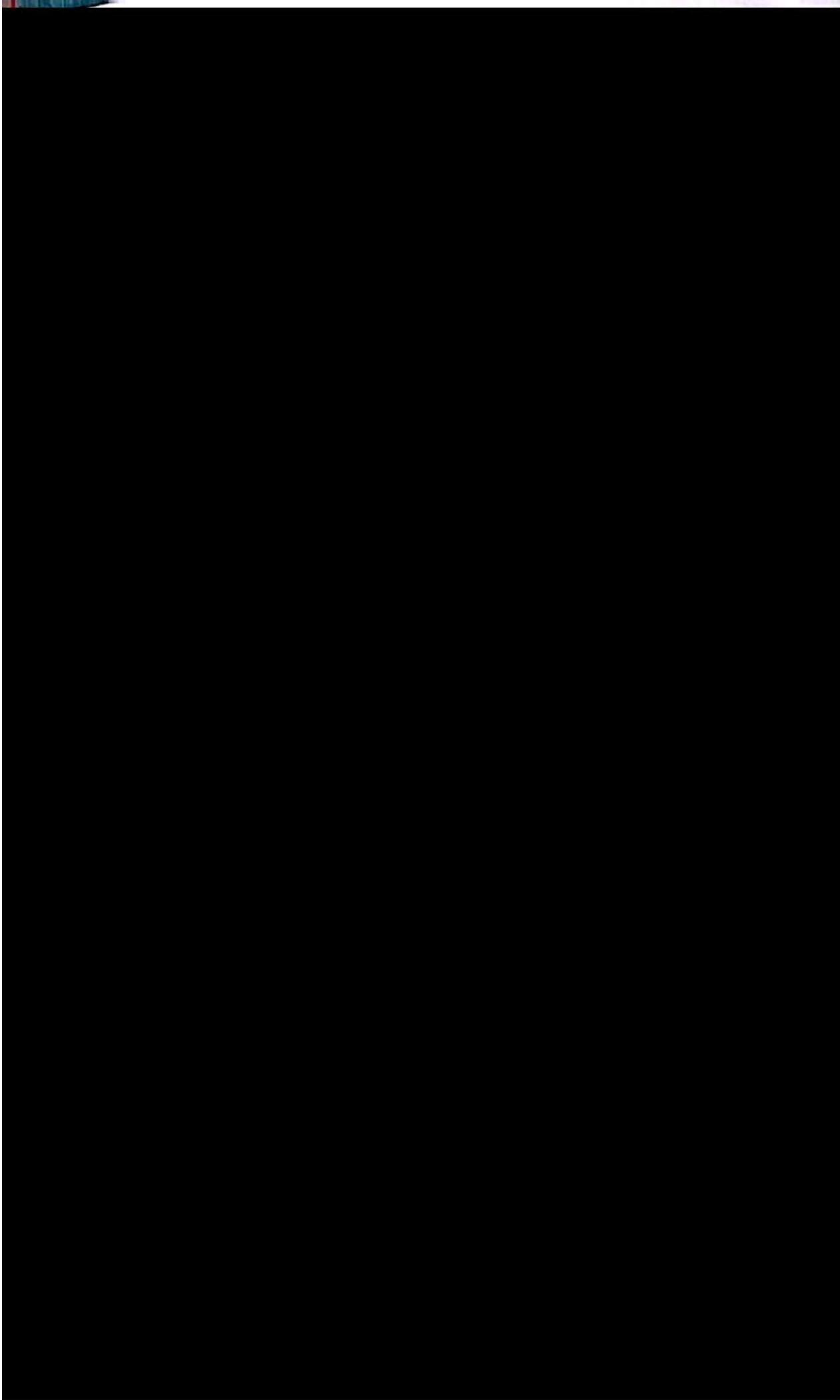


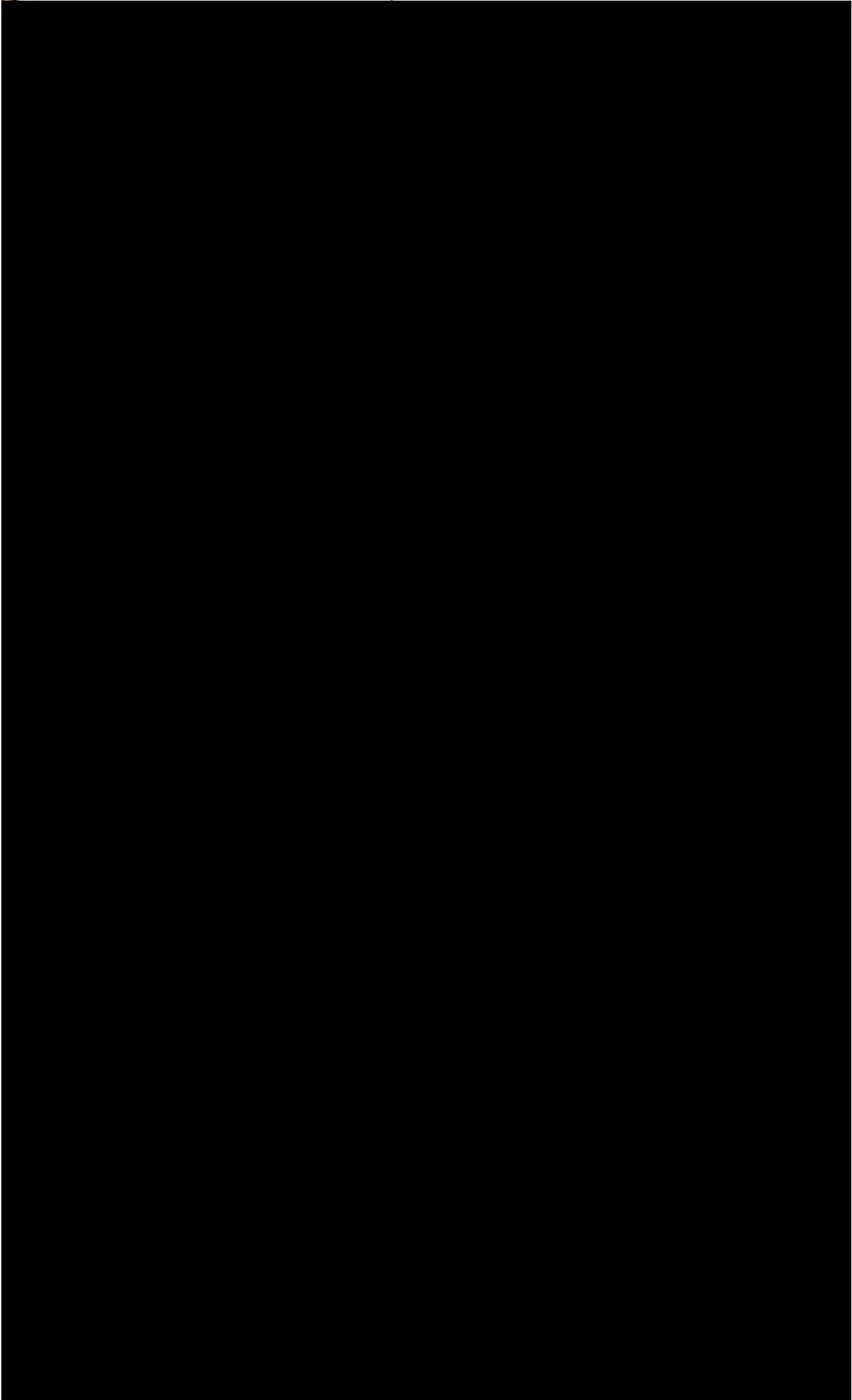


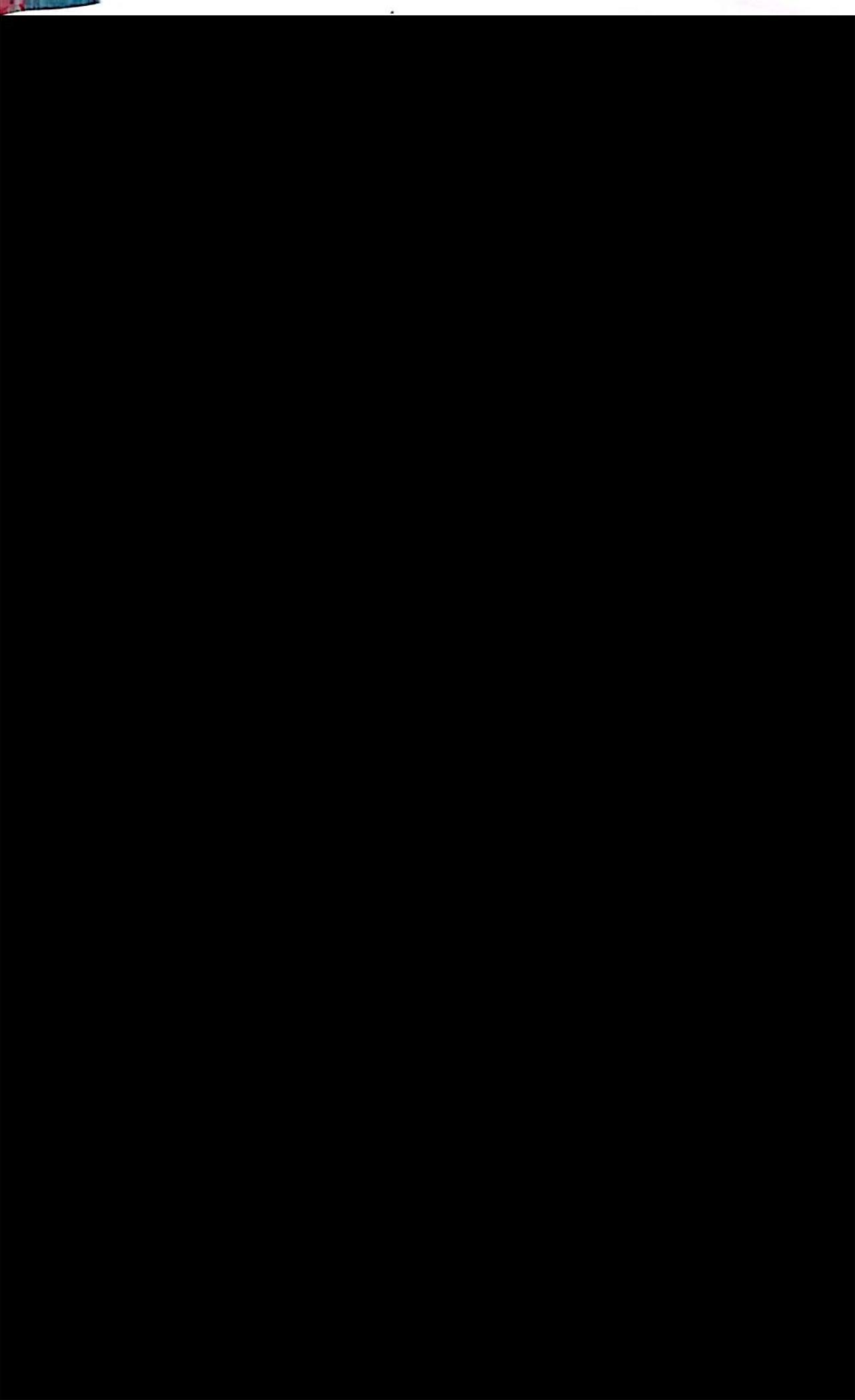


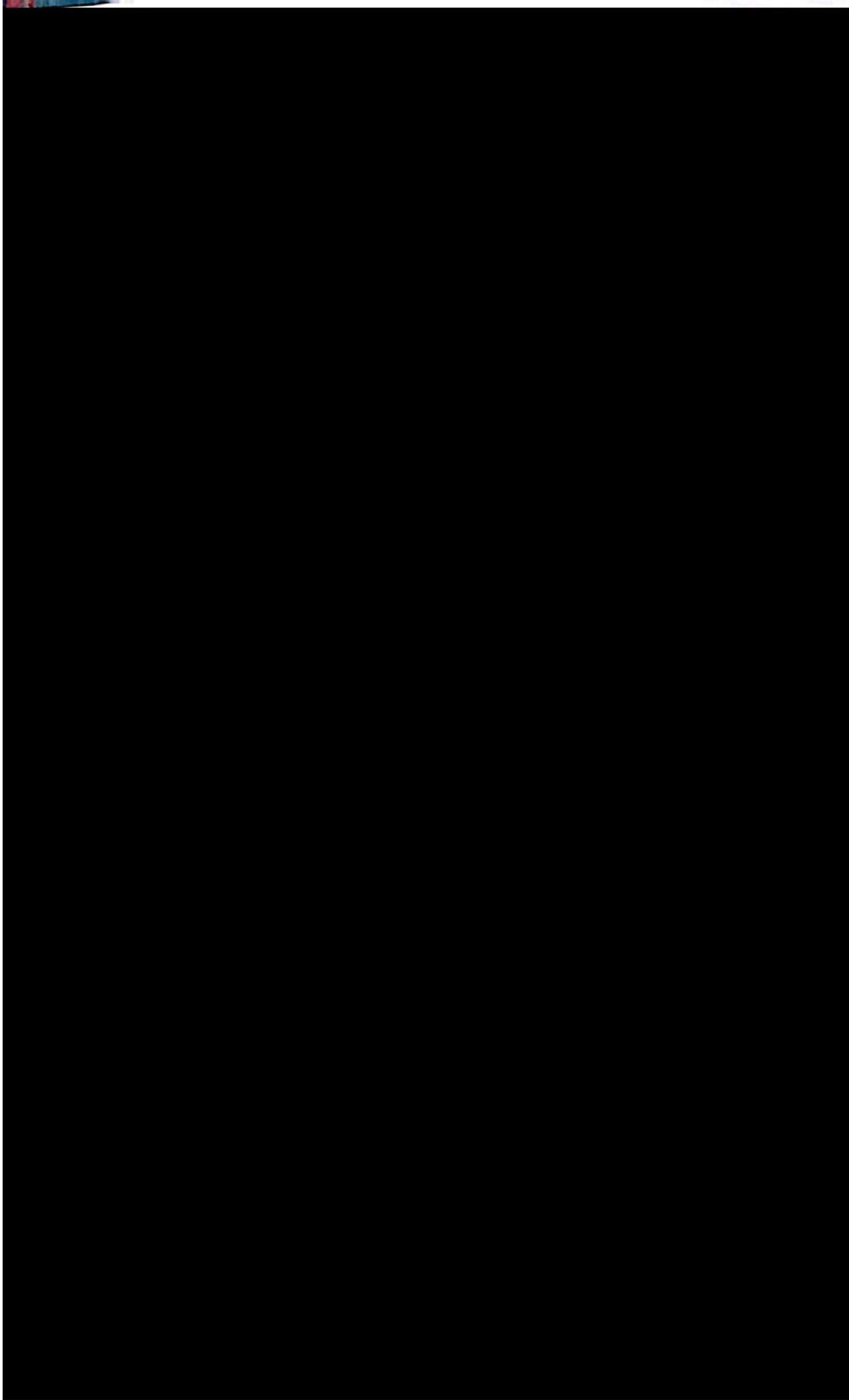


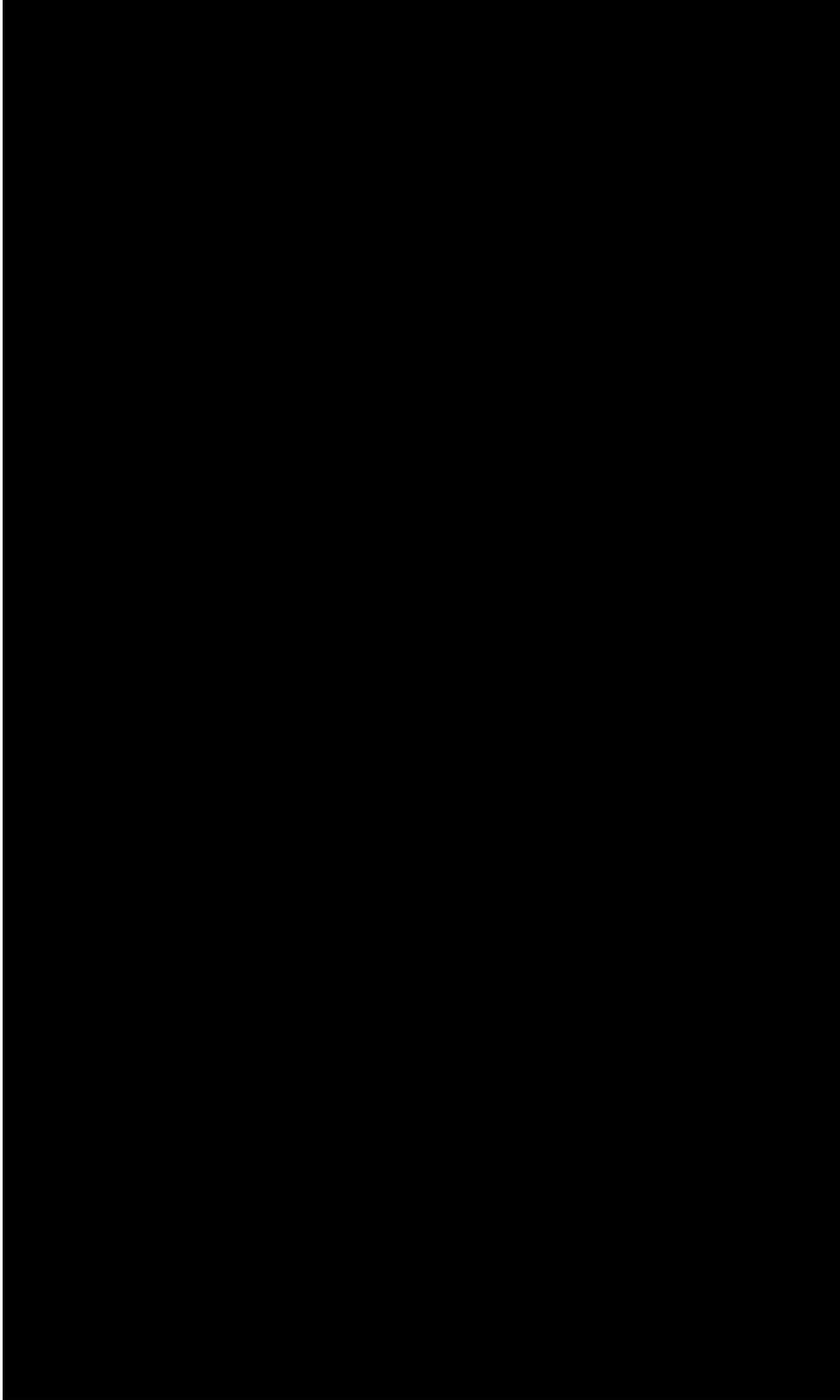


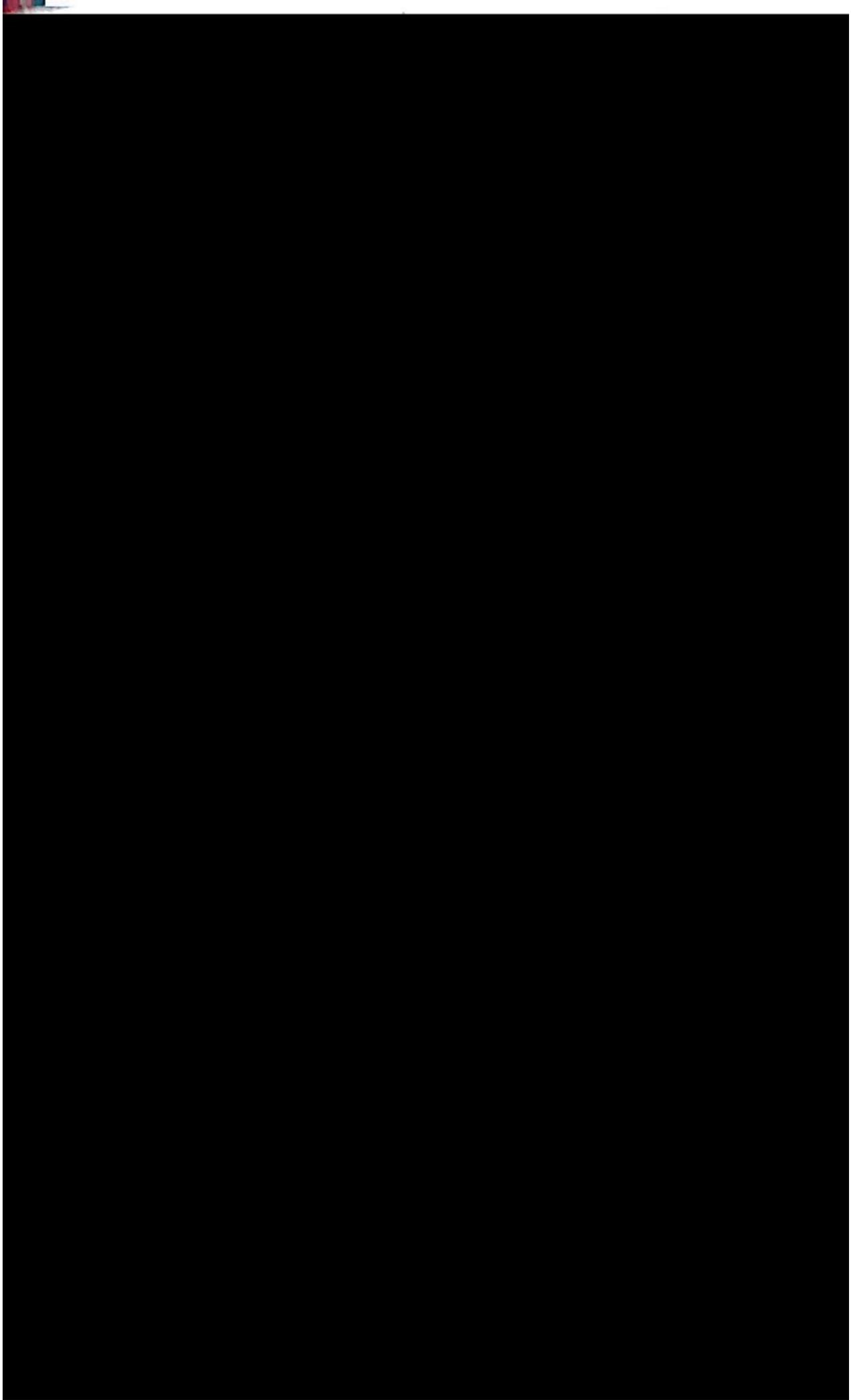


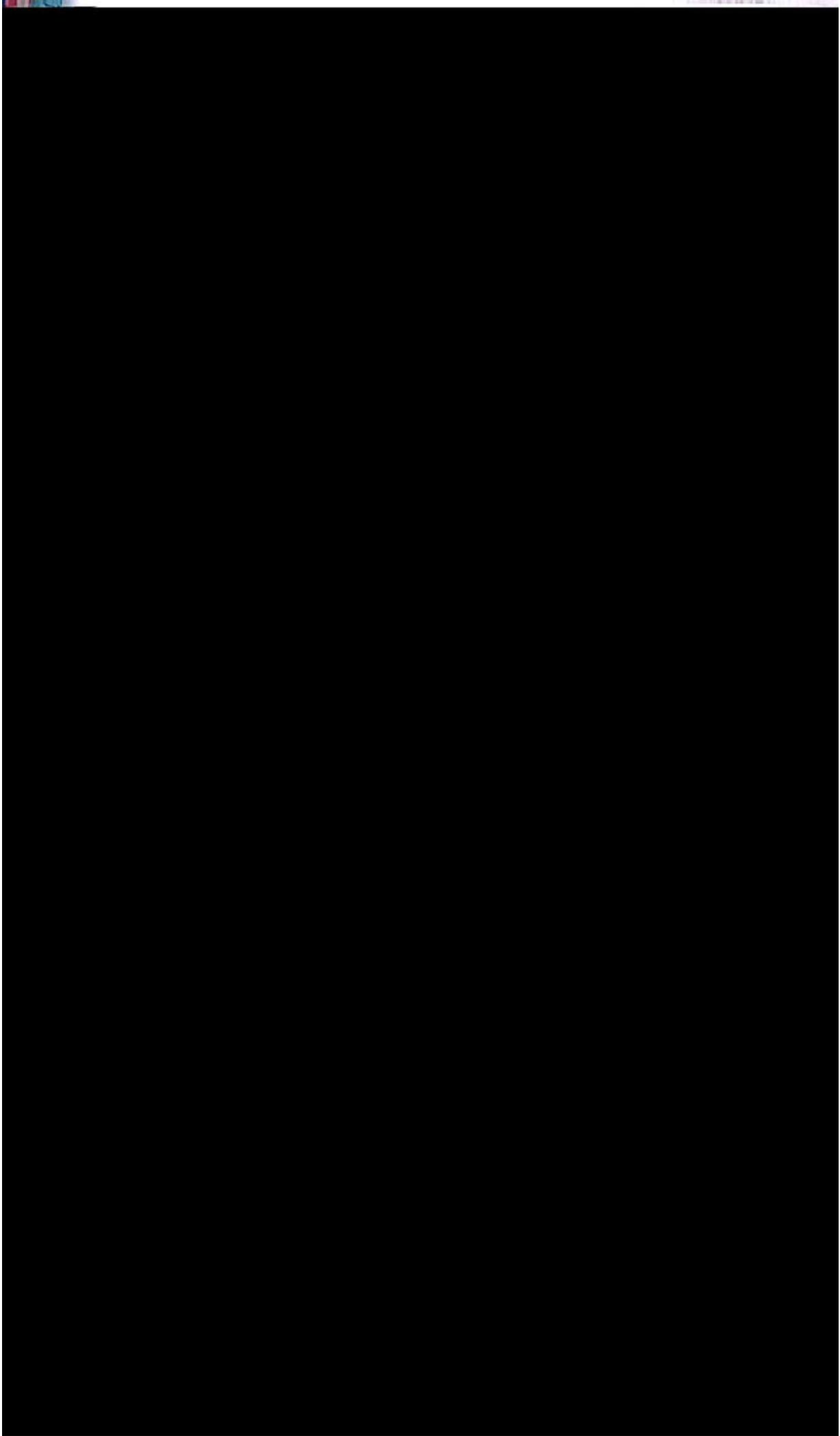


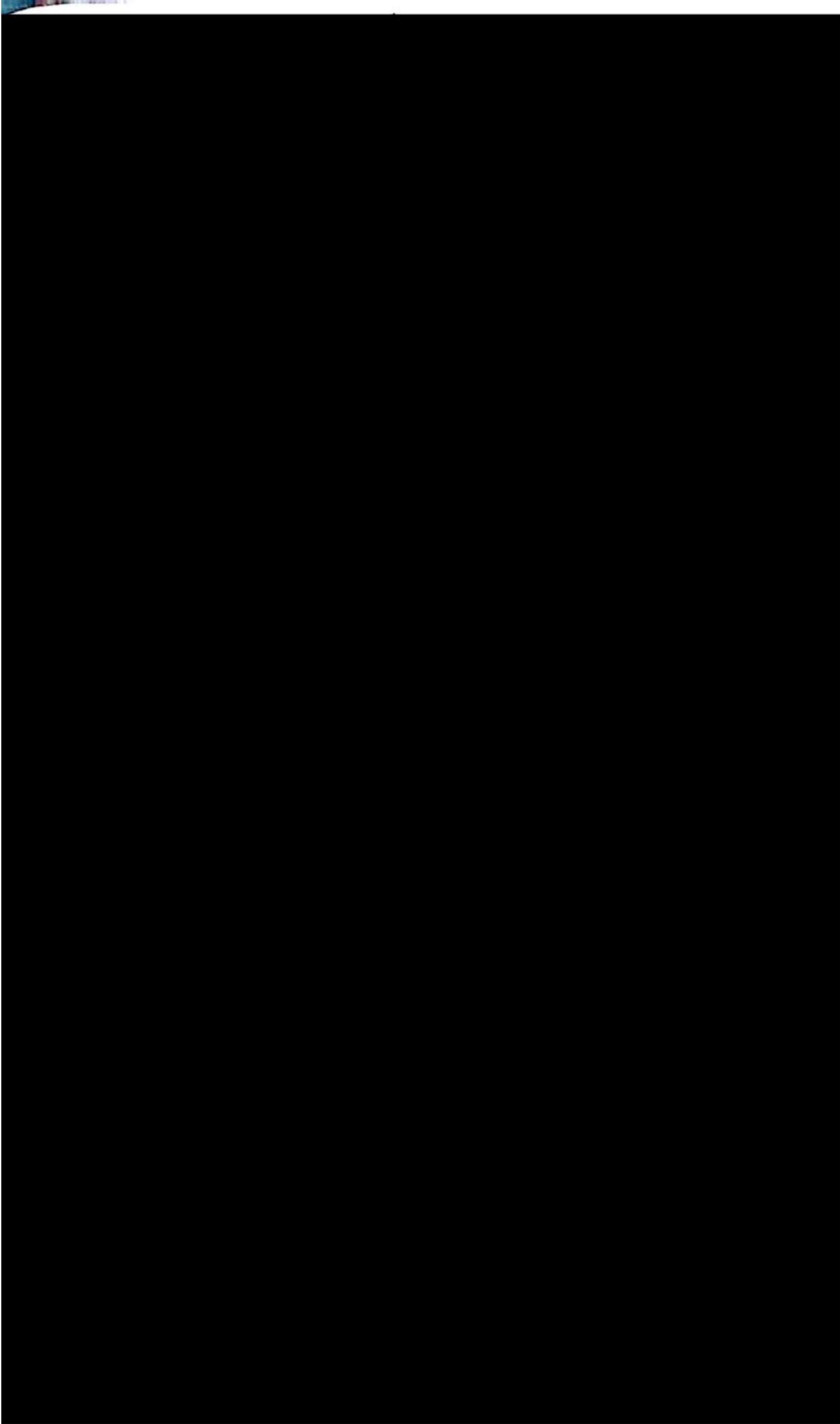


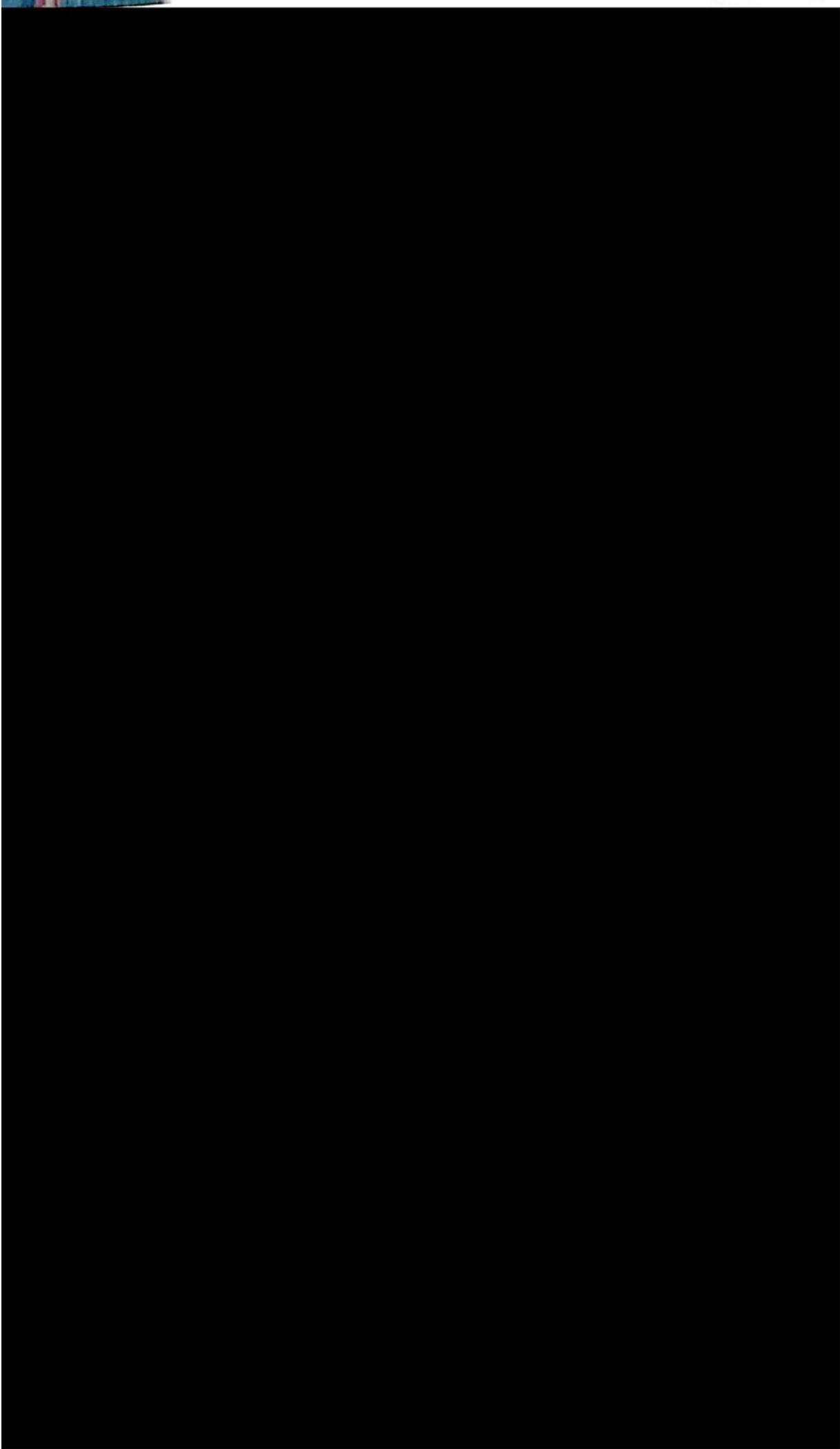


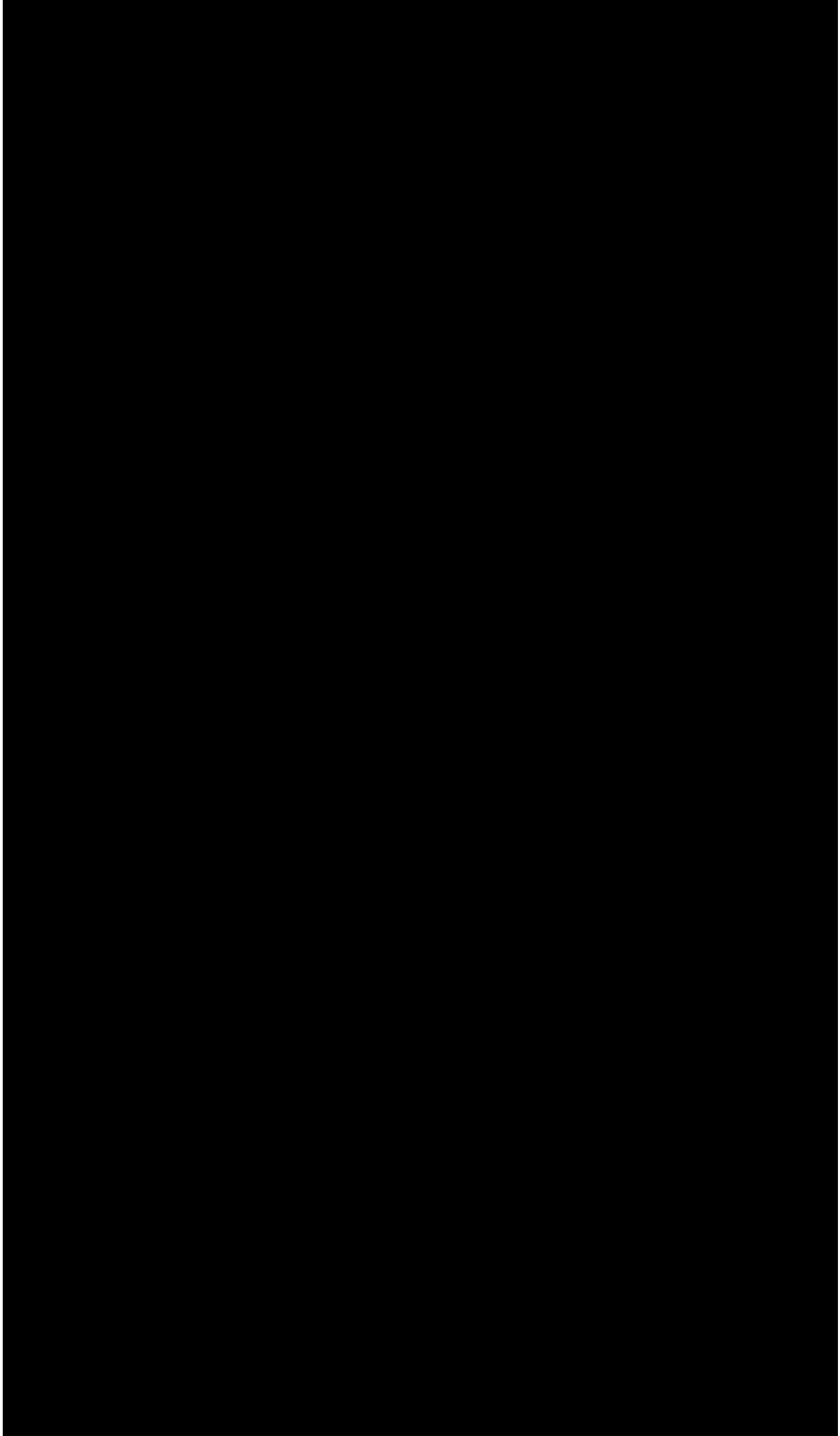


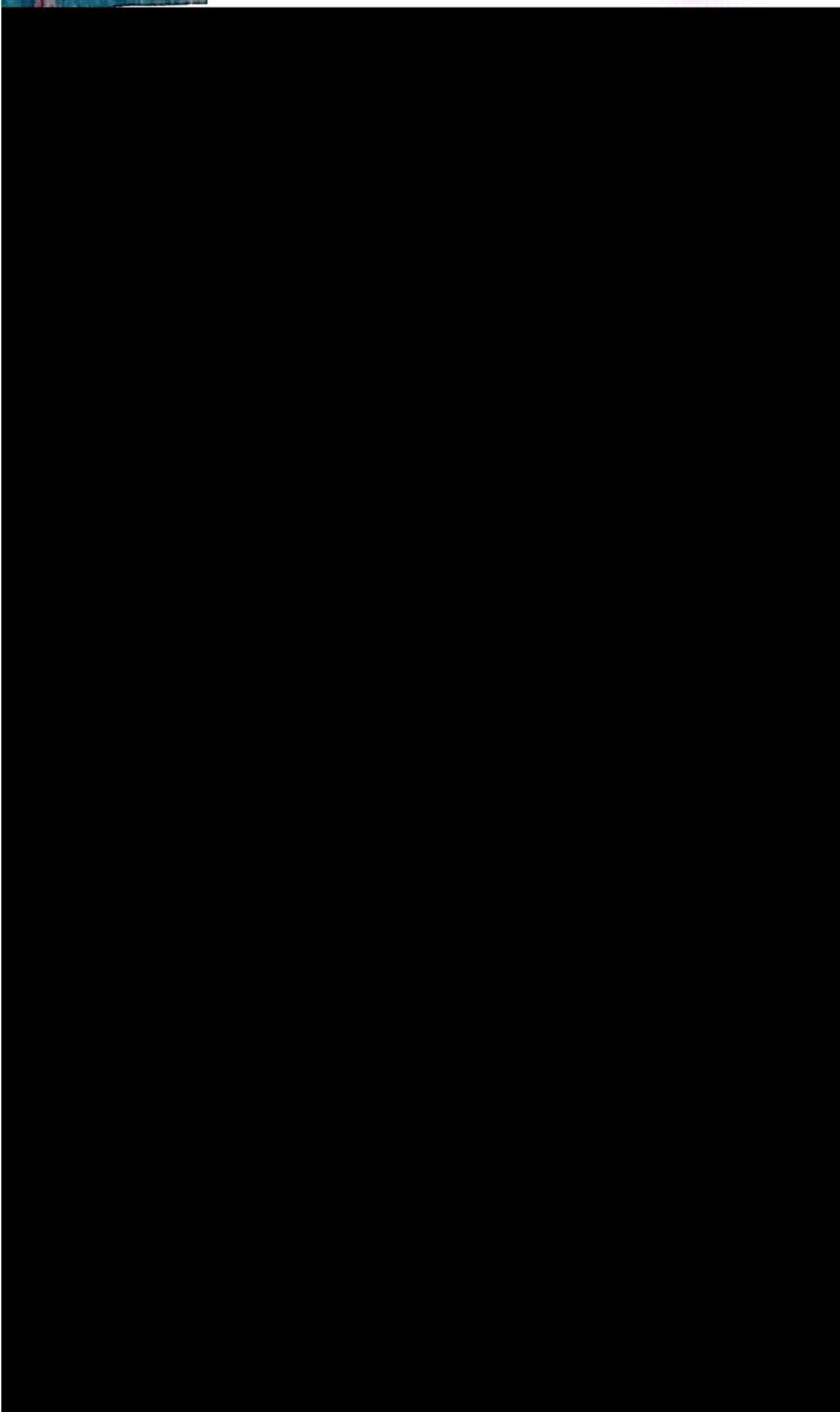


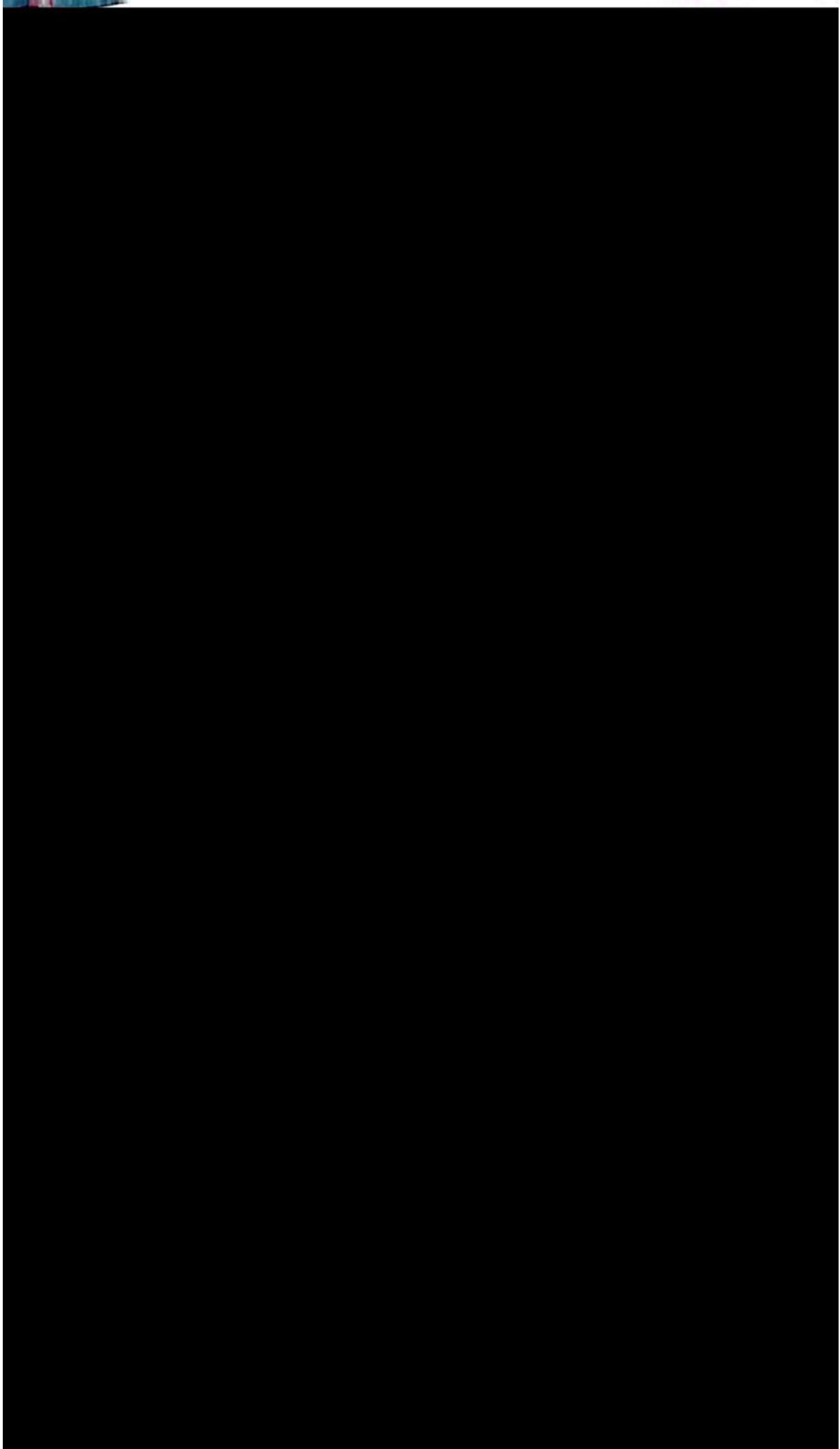


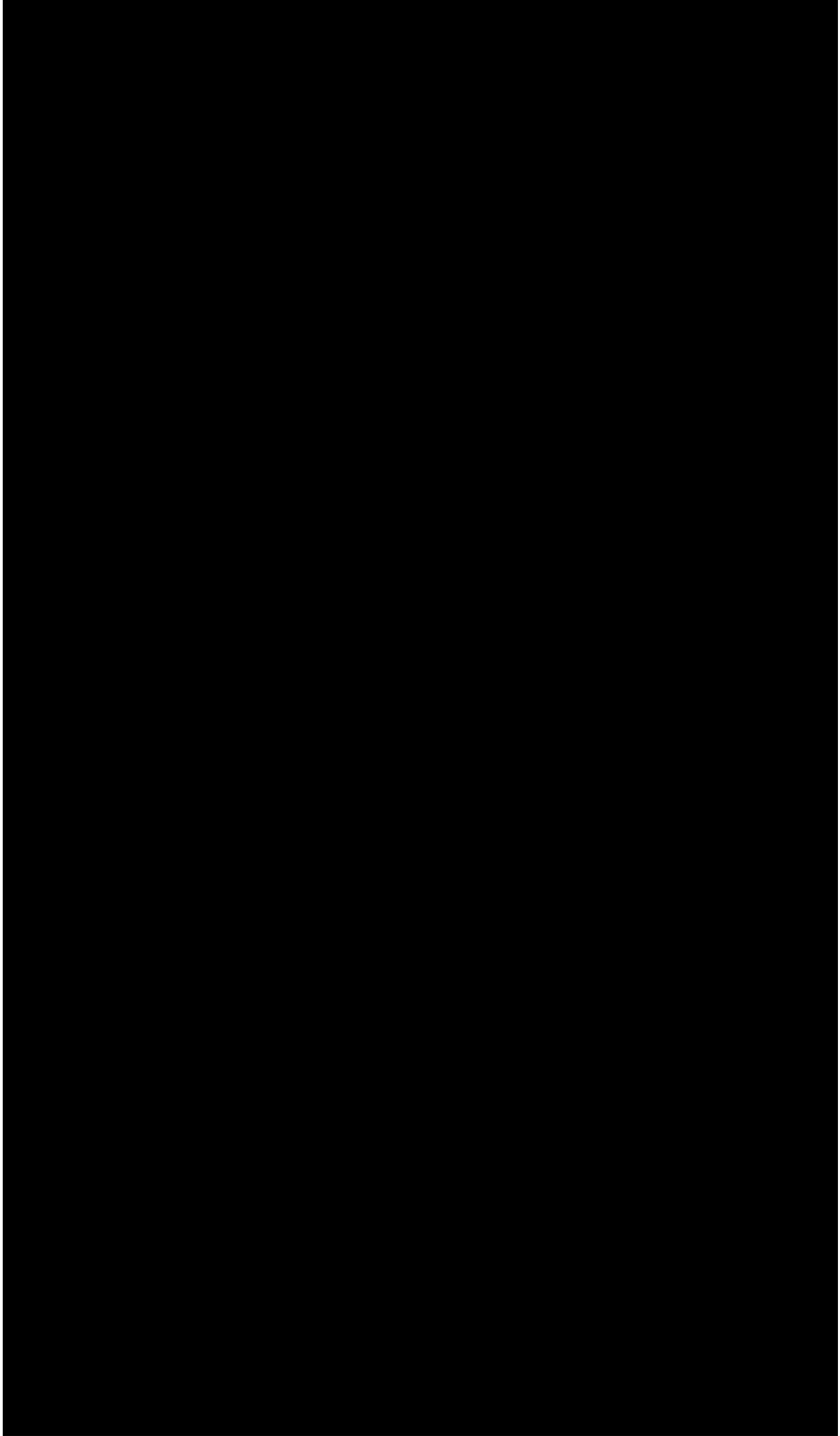




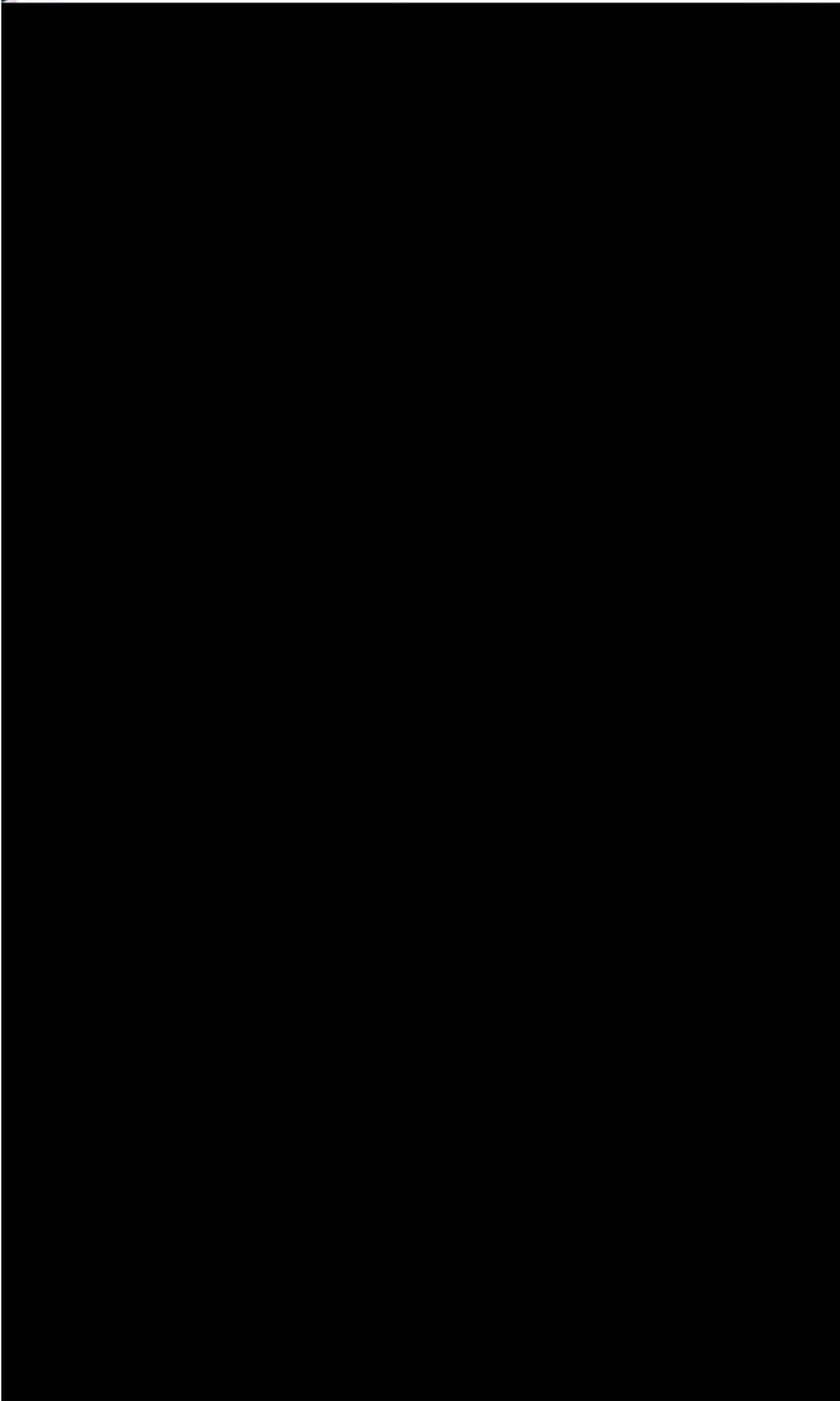


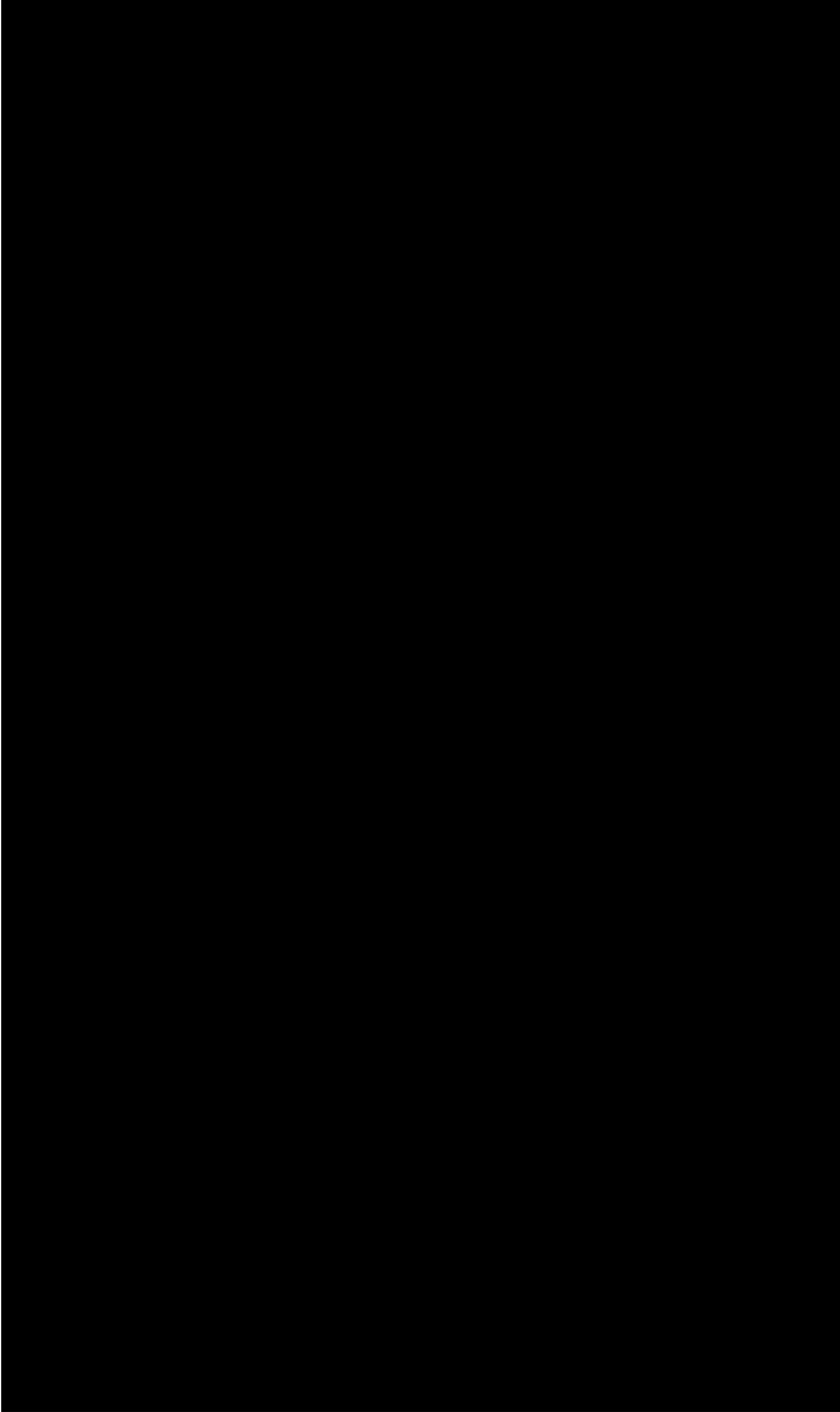


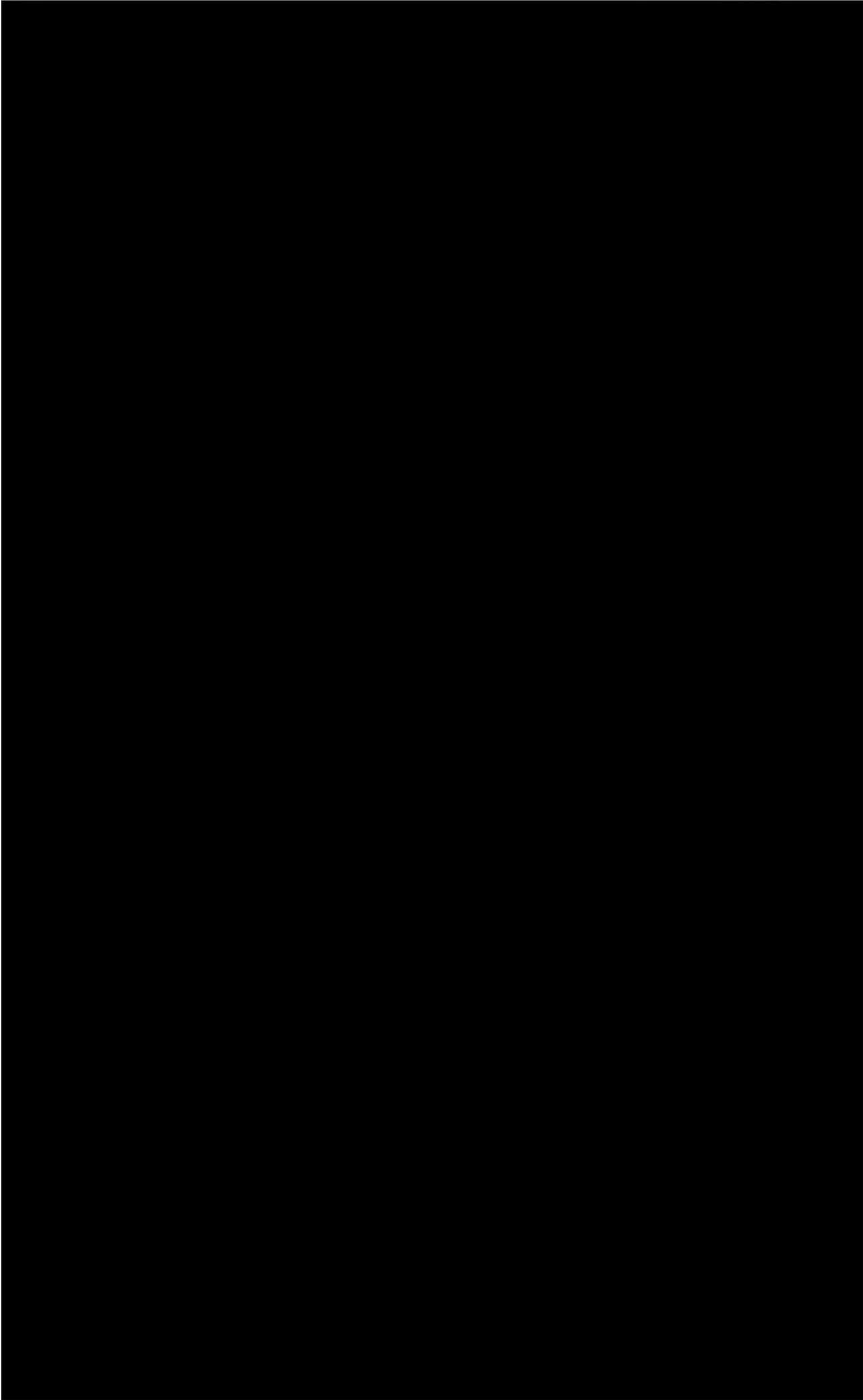


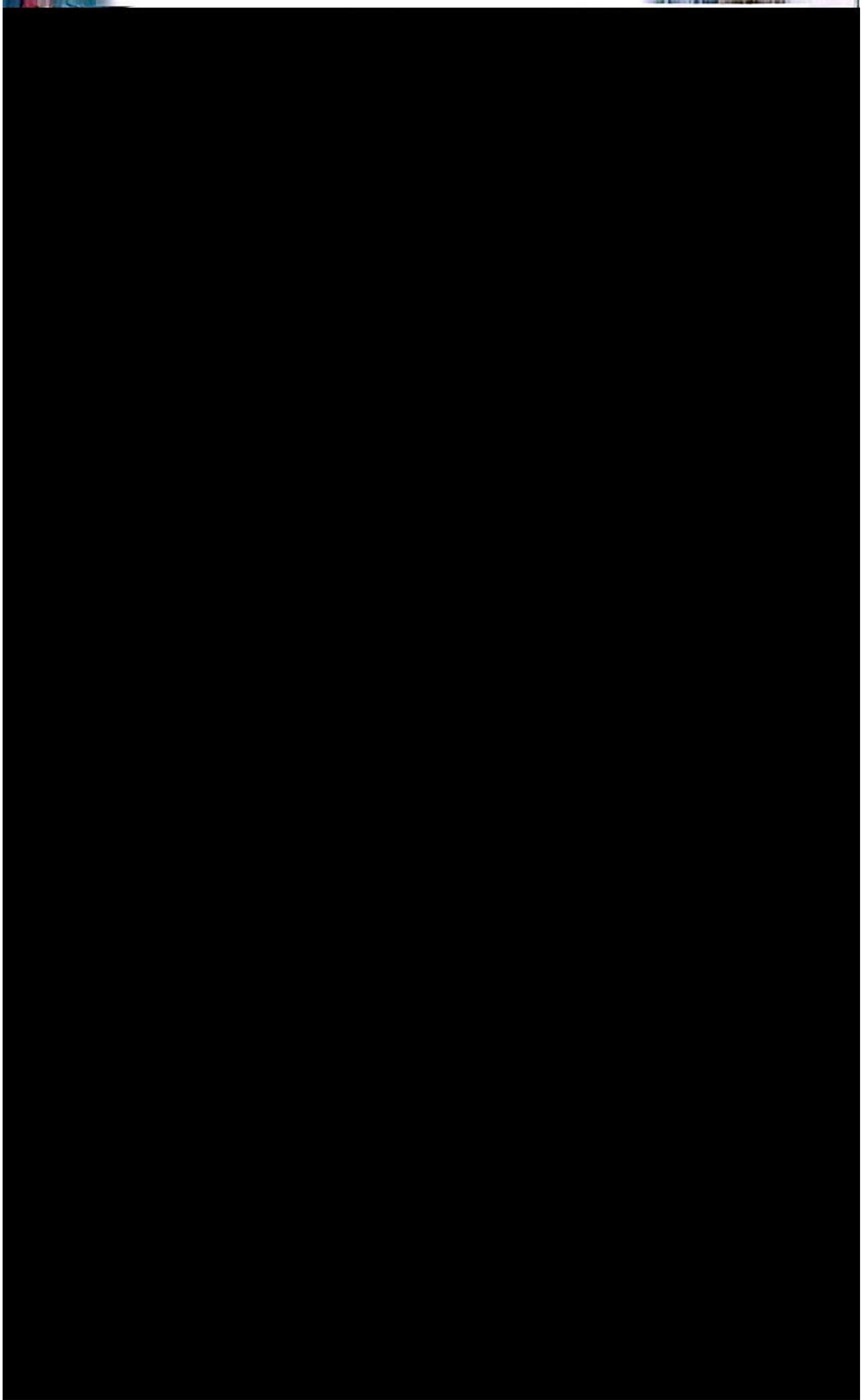


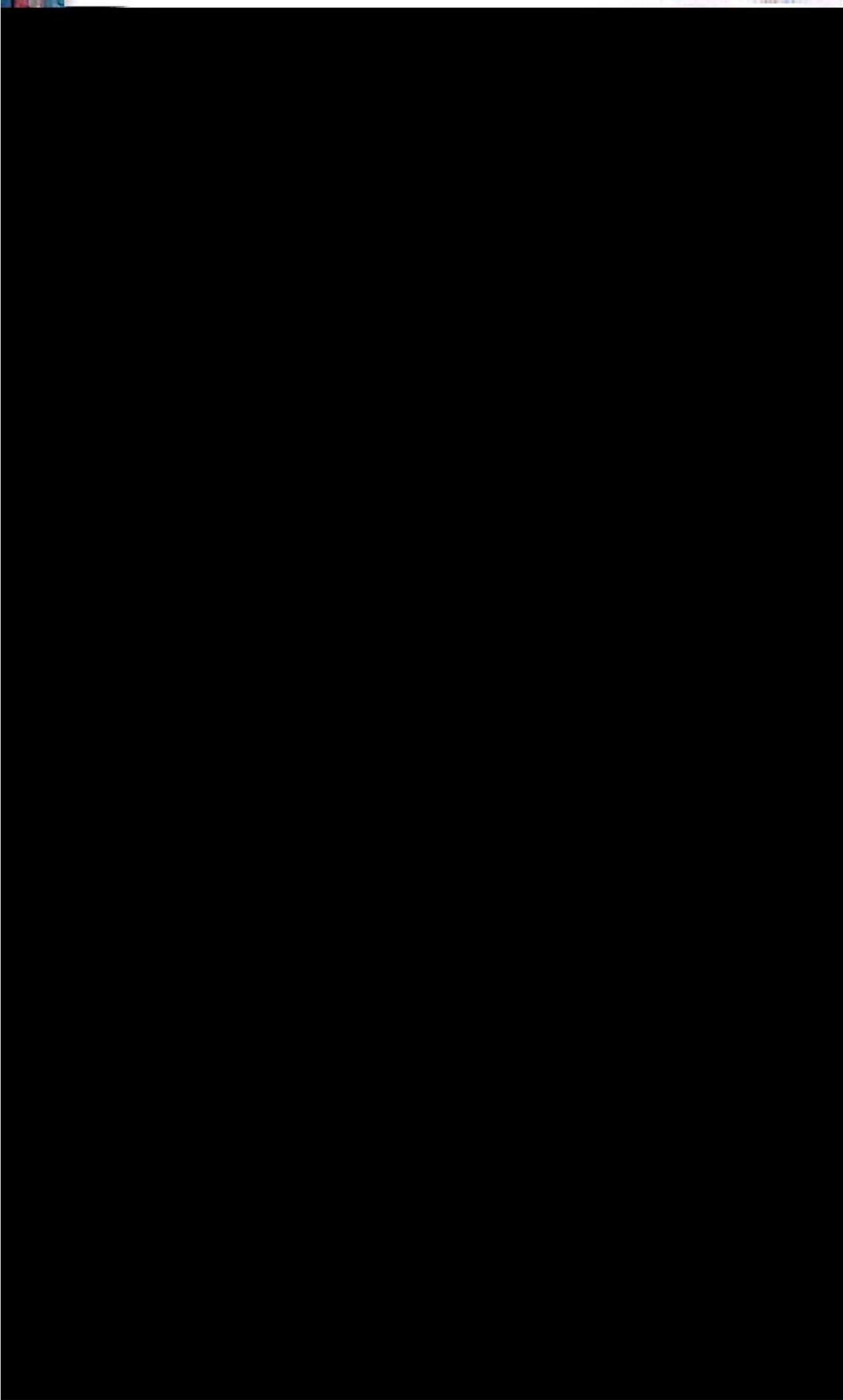


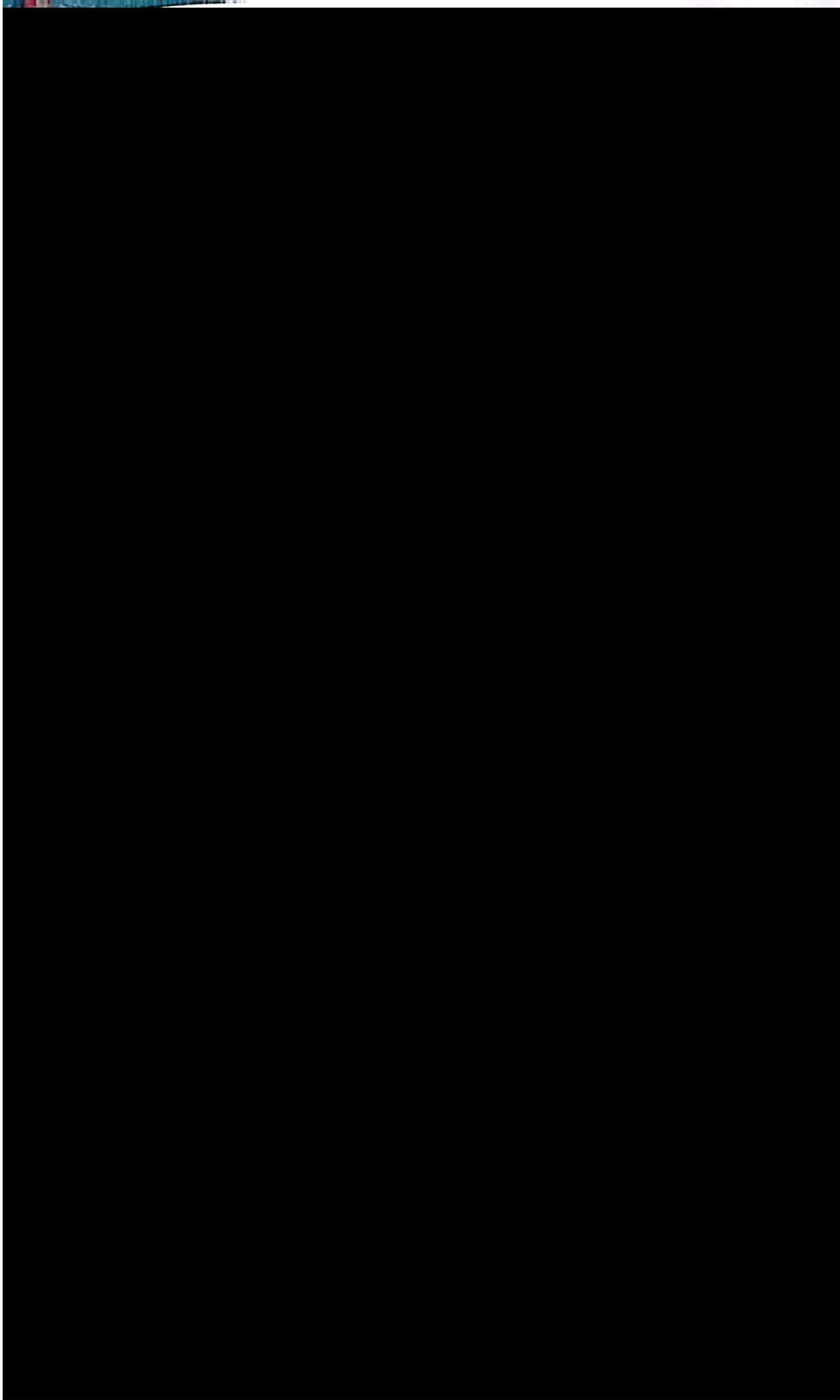


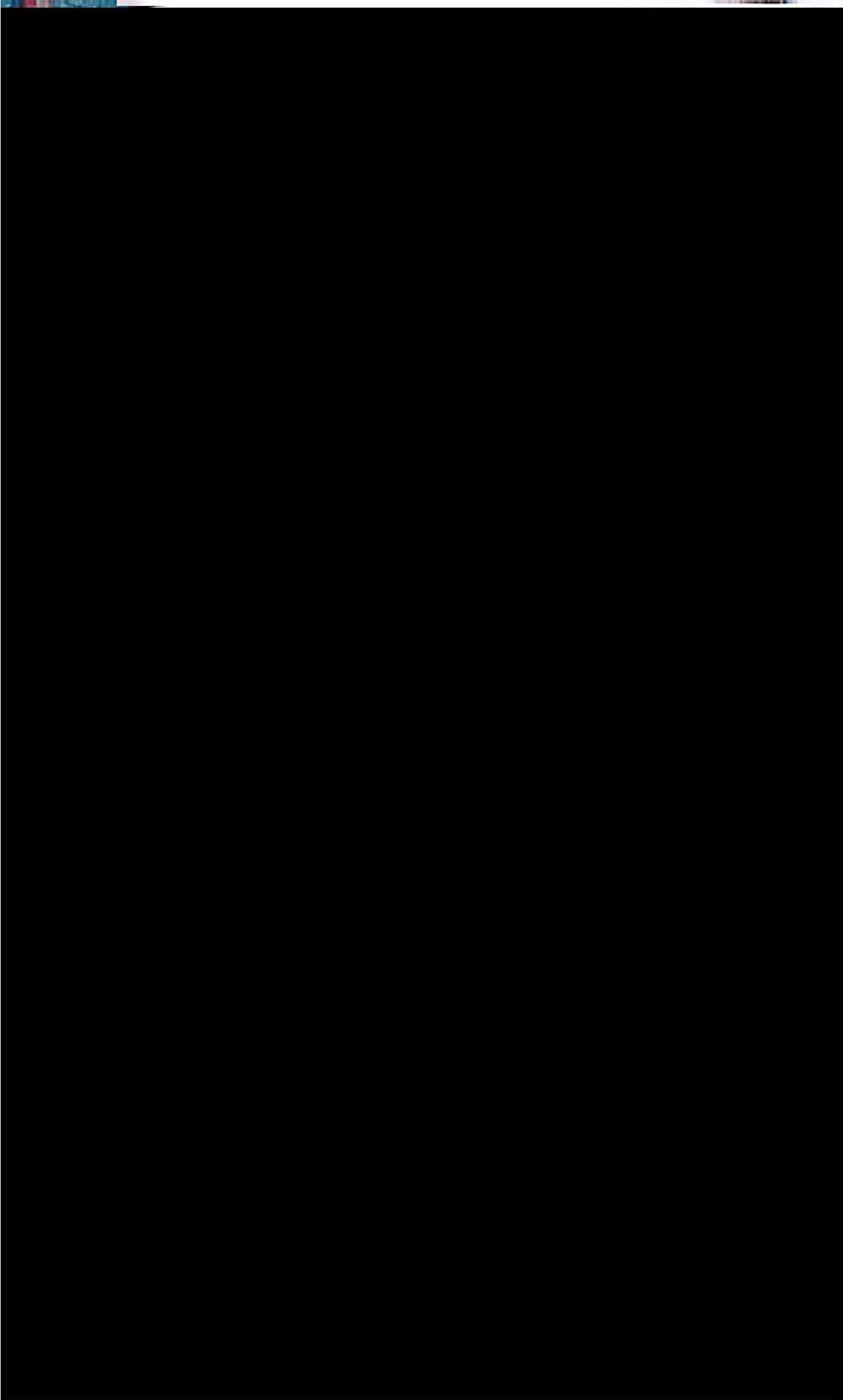


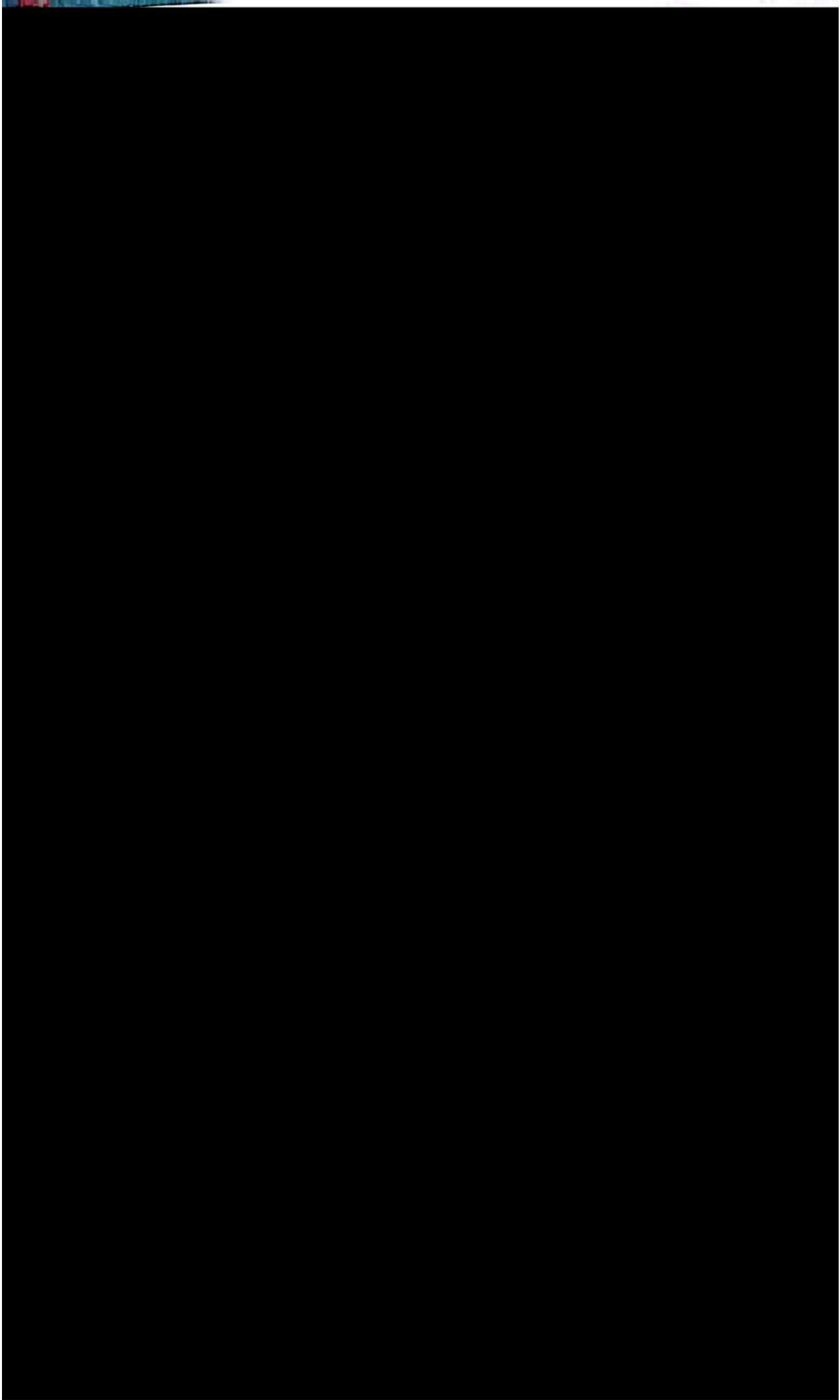


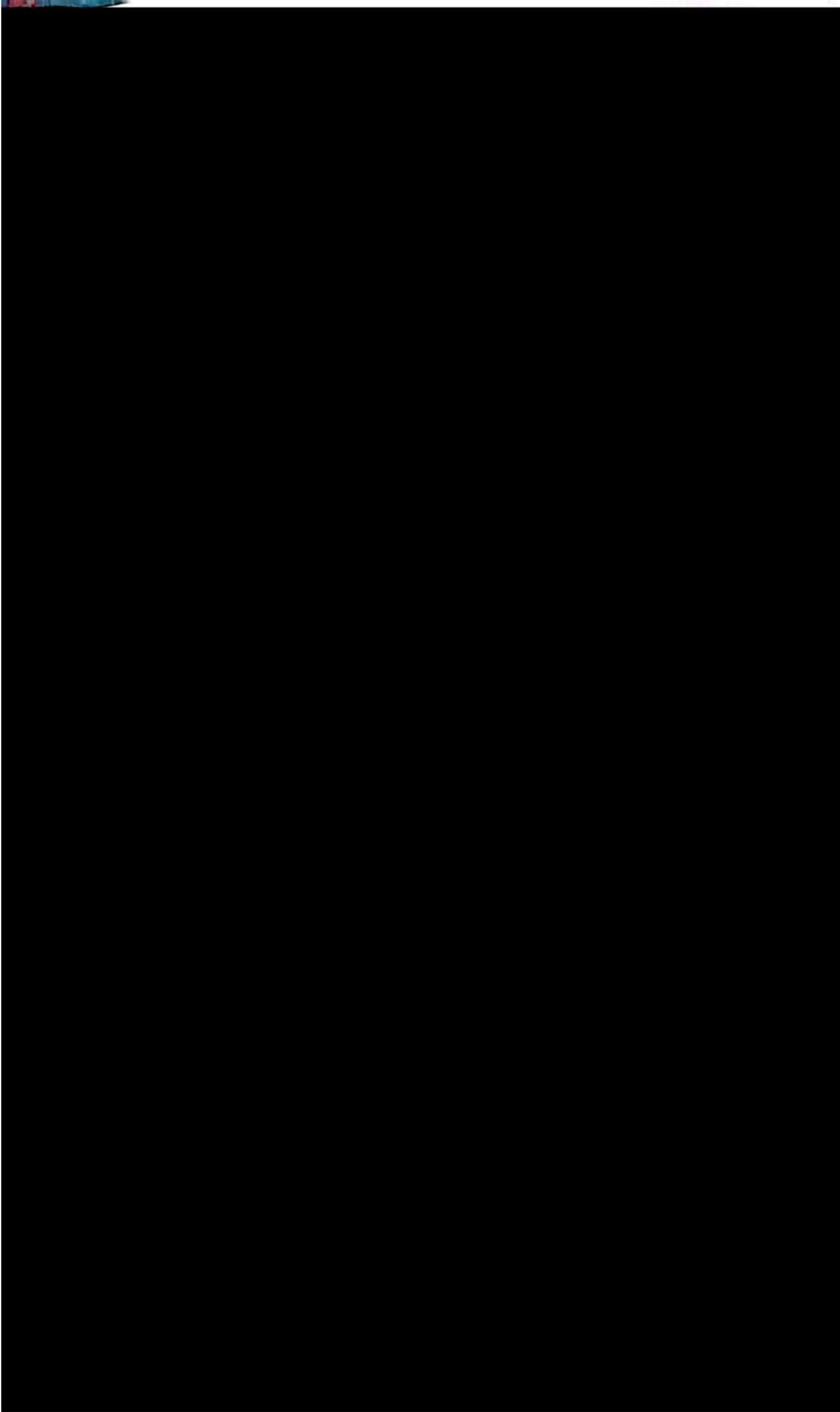


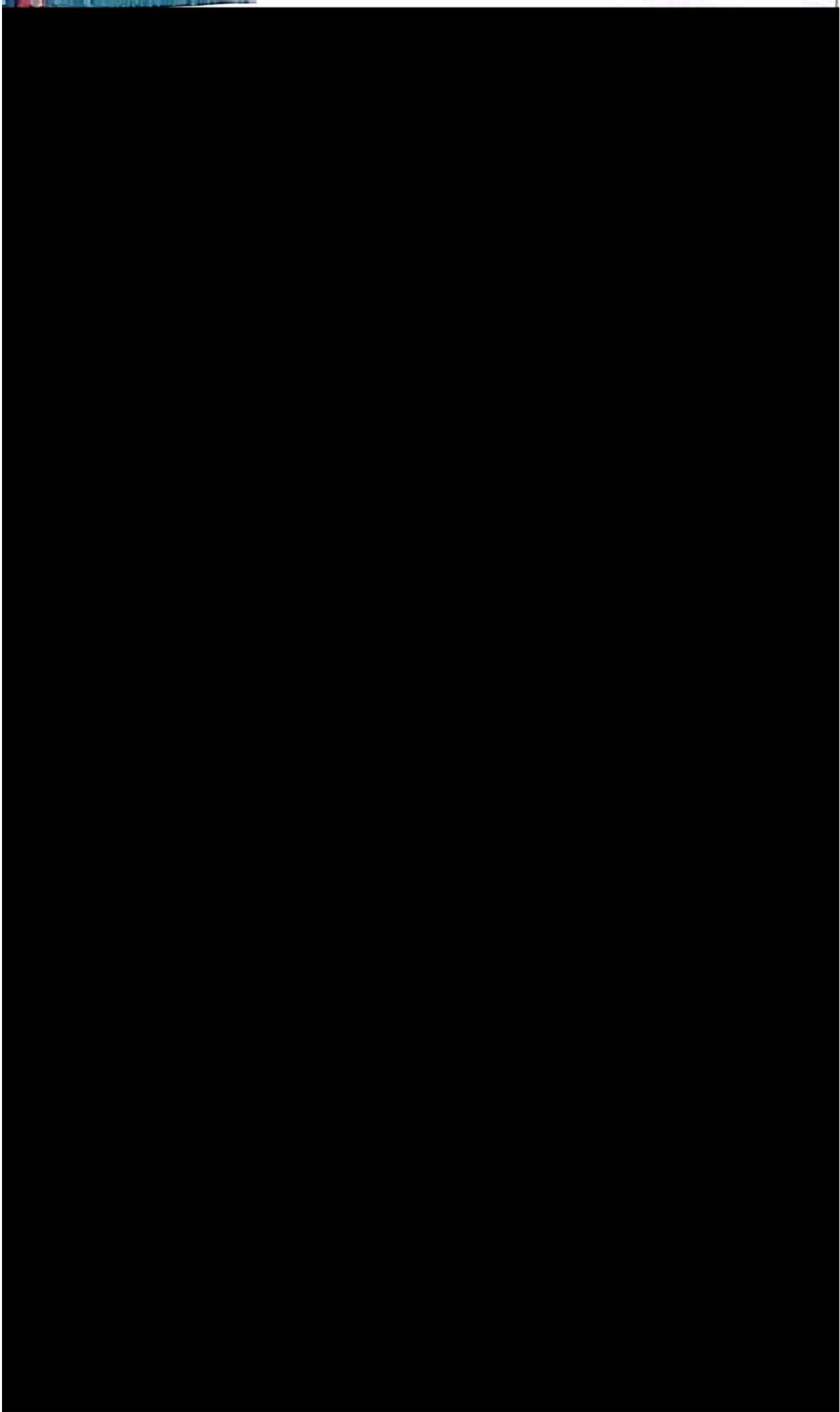


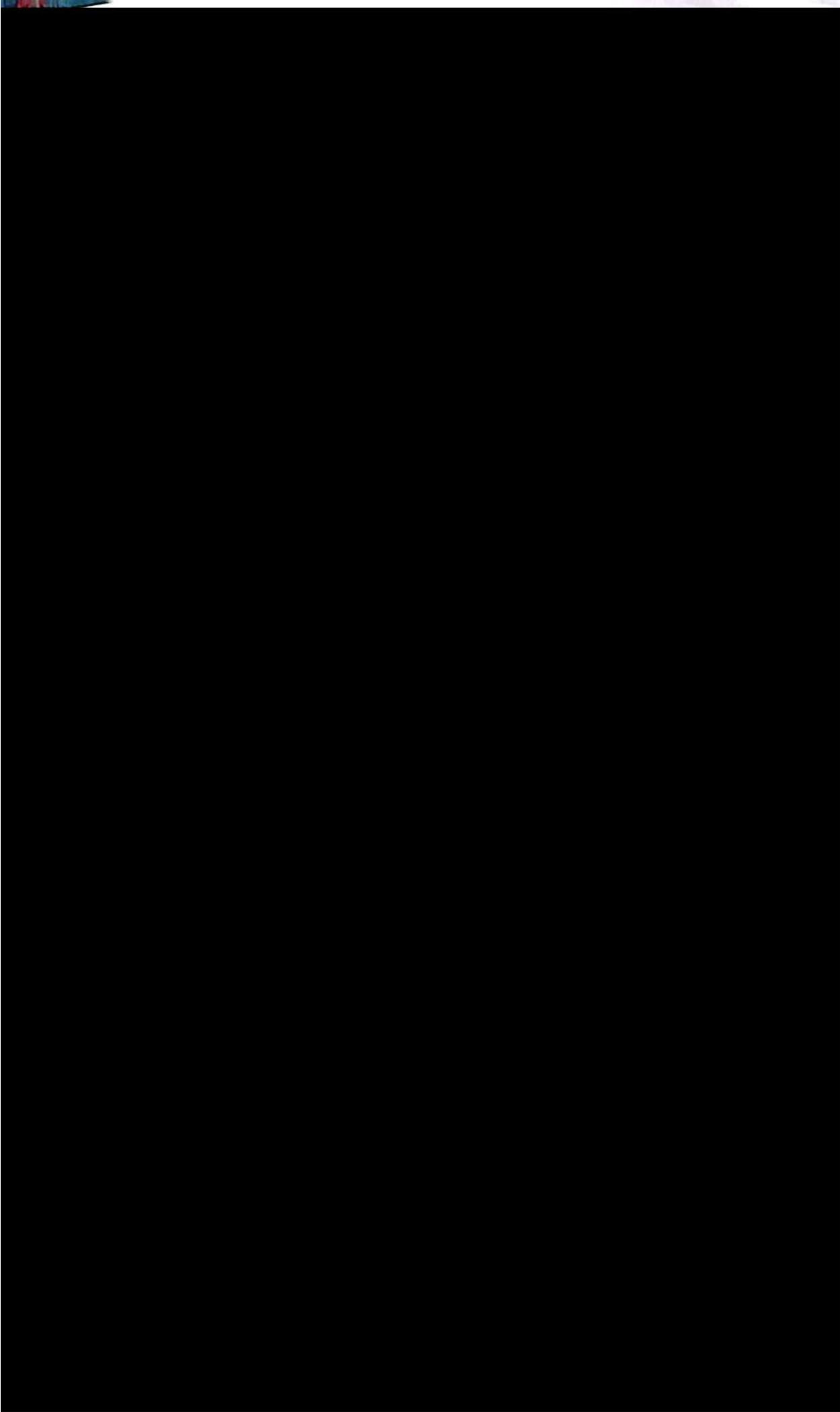


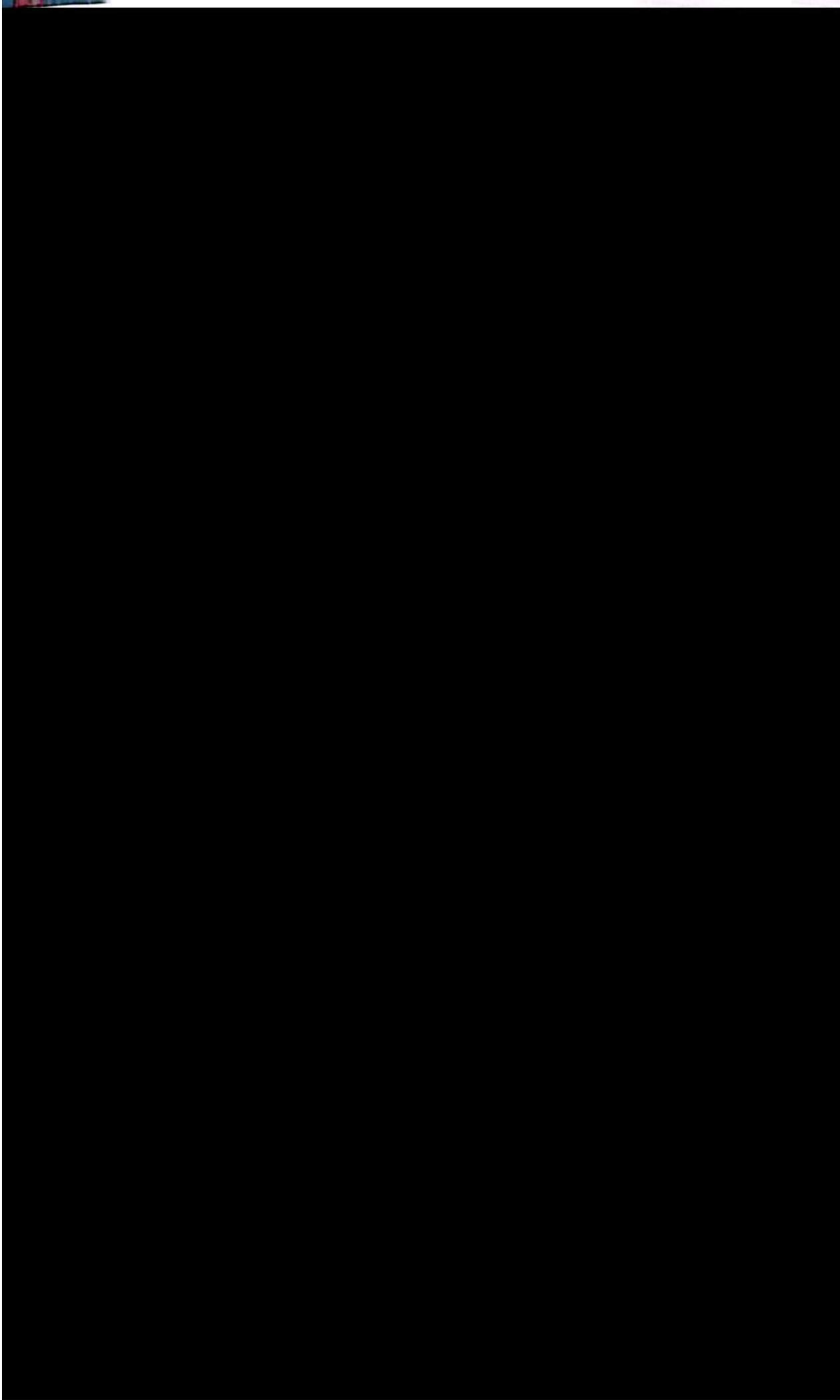


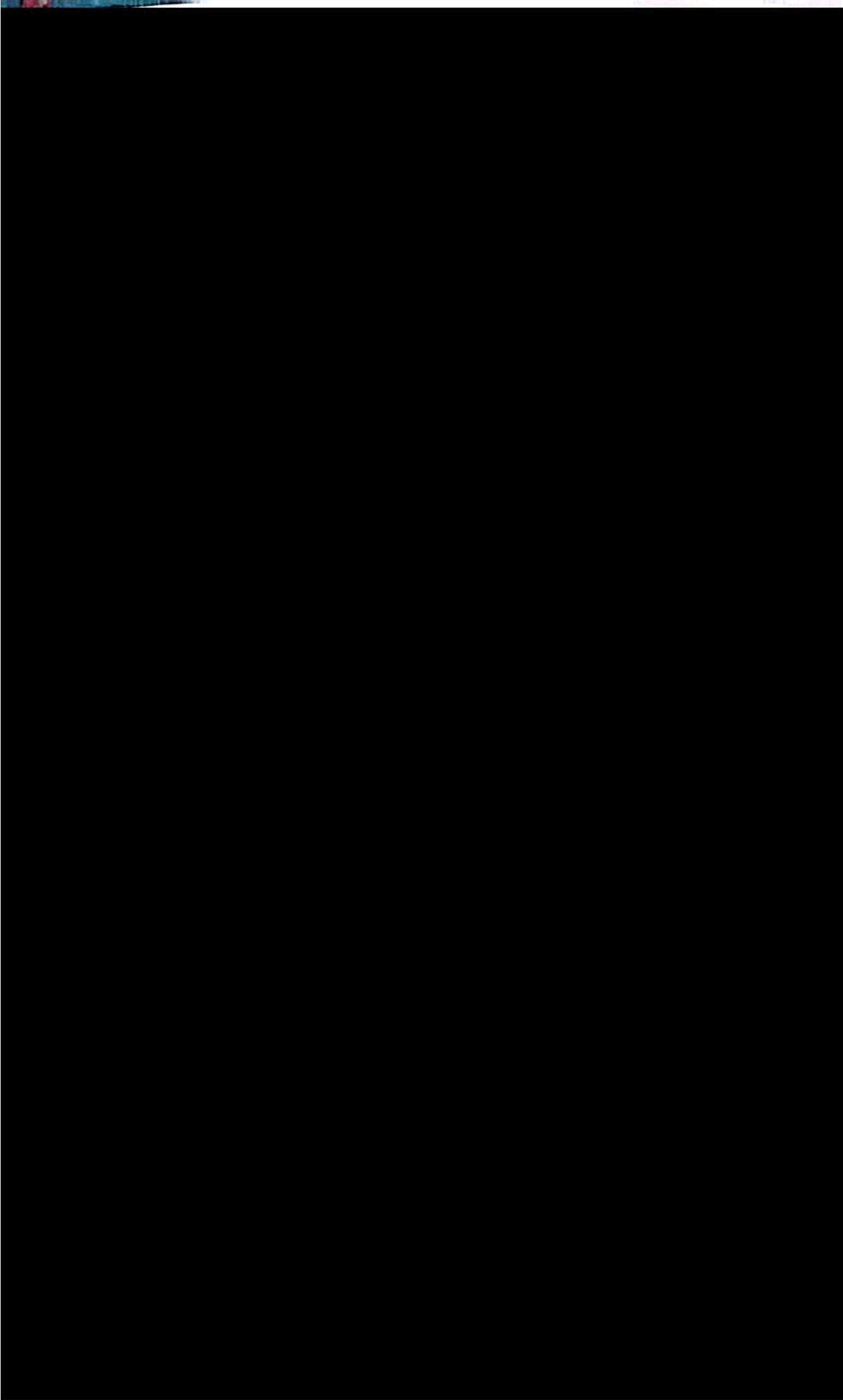


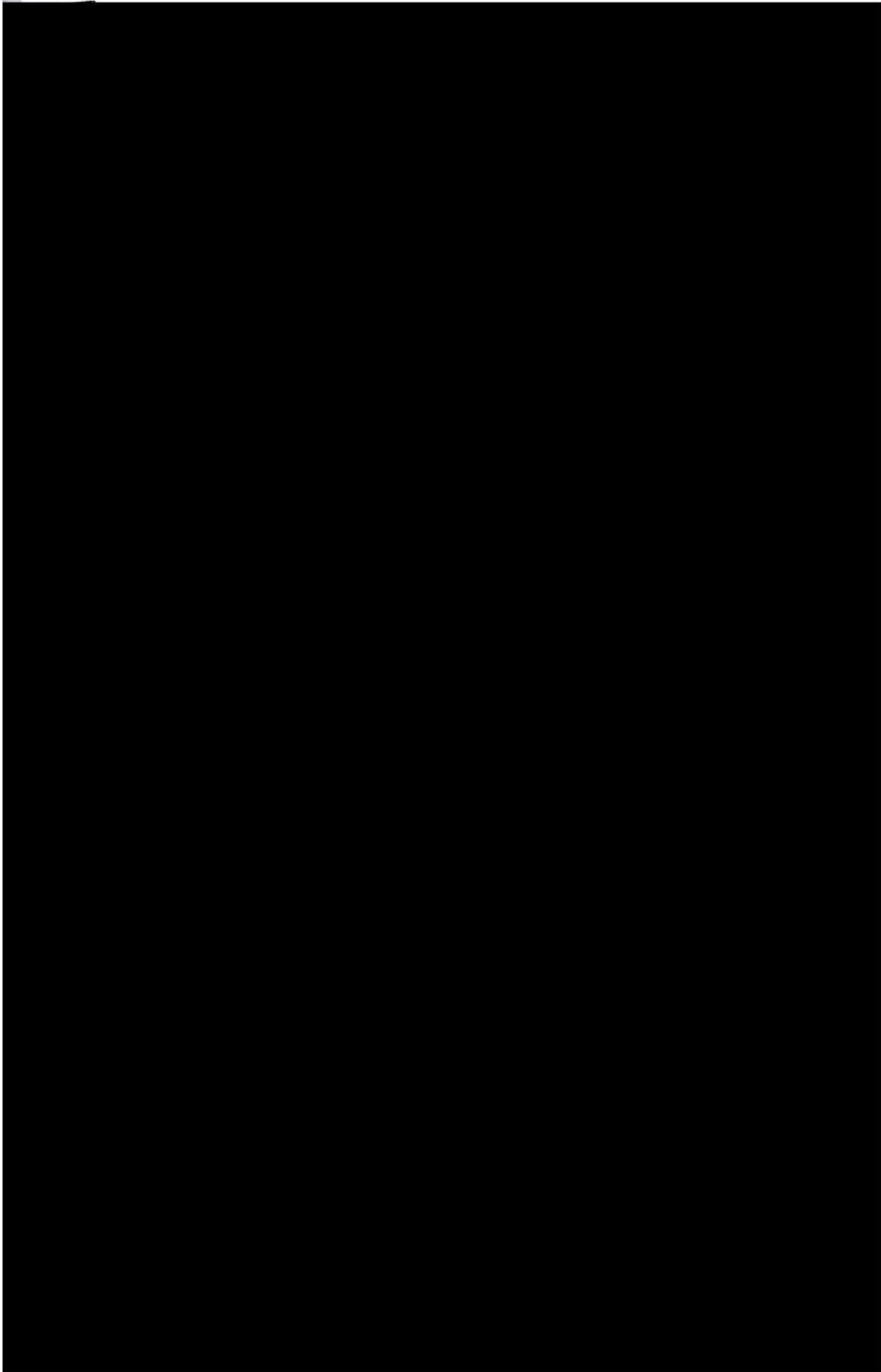


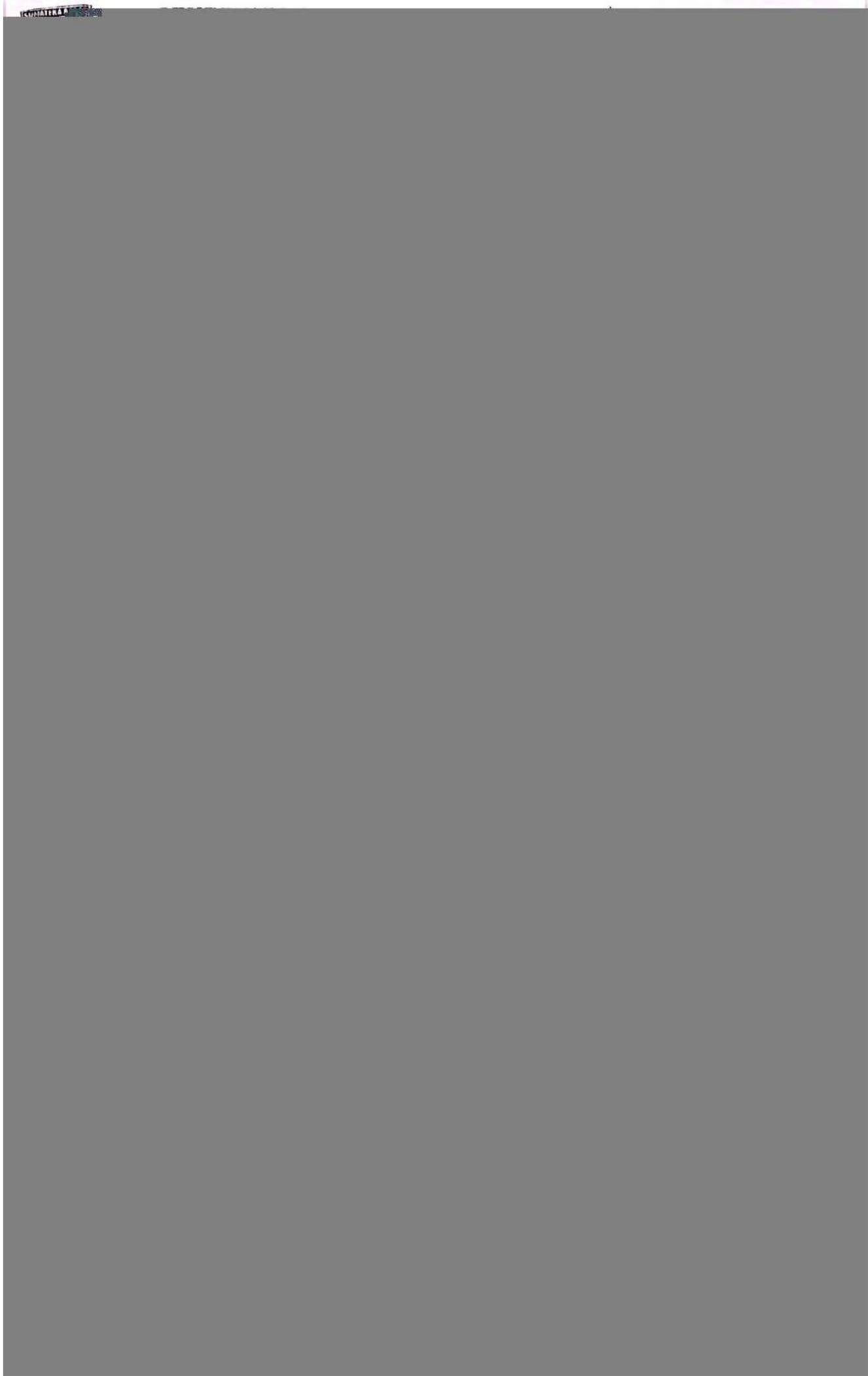


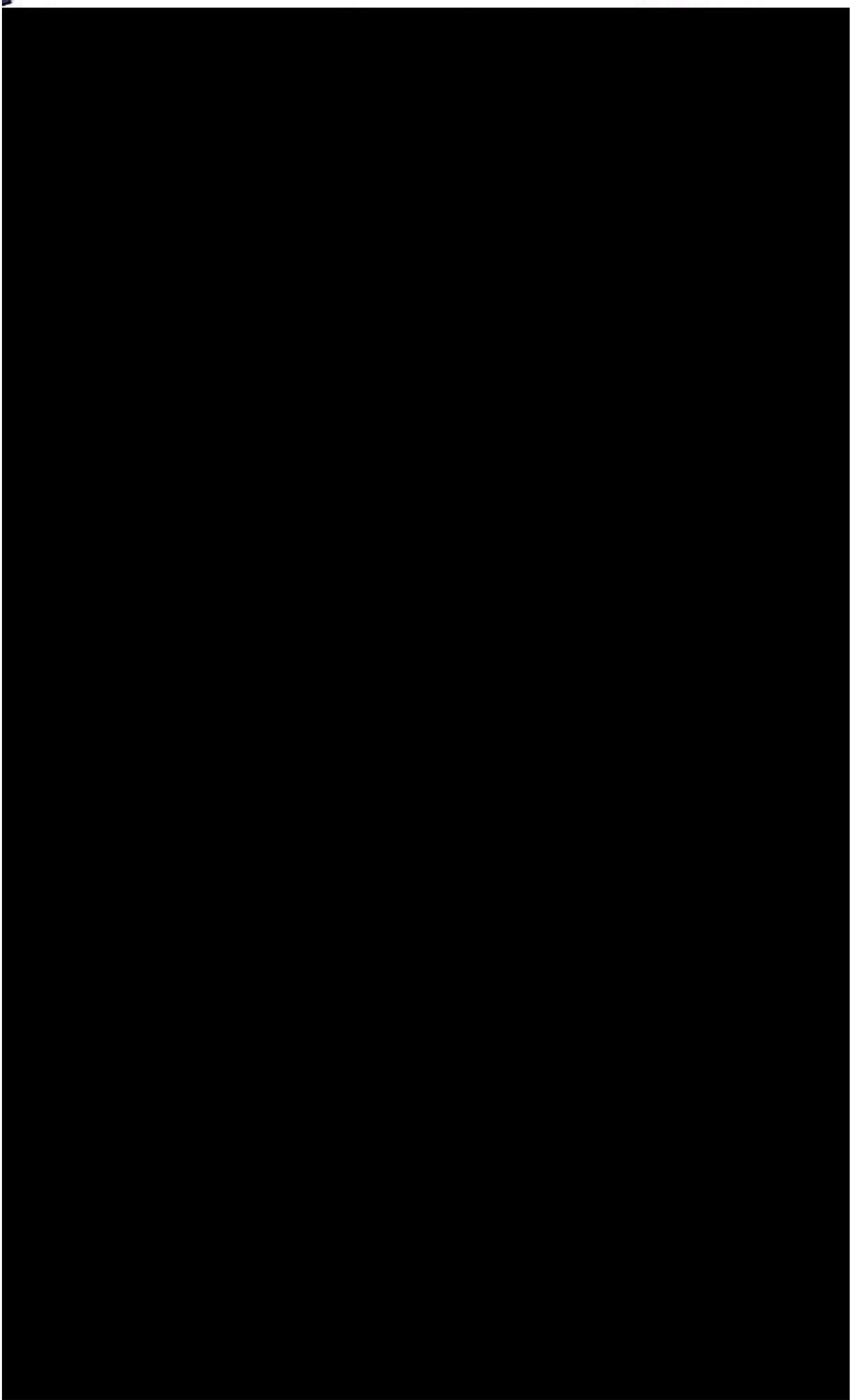














**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

KLIPING BERITA

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan- PKB DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman, berpandangan, bicara pertumbuhan ekonomi harus ada konsep jelas dari pemerintah daerah terhadap pembangunan yang akan mengarah kepada pertumbuhan ekonomi Sumbar. "Kemarin oke lah ada pandemi Covid-19, sekarang setelah pandemi harus ada terobosan-terobosan yang dilakukan, jika tidak, kita akan terlambat," katanya.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini, Albert menilai salah satu hal prioritas yang harus mendapat perhatian adalah masalah investasi. "Ekonomi akan tumbuh jika daya beli masyarakat kuat. Agar daya beli masyarakat kuat, tumbuh, atau muncul harus ada investasi, dan mesti ada pertumbuhan belanja dari sektor

swasta. Mewujudkannya, harus diciptakan iklim investasi yang bagus di Sumatera Barat," katanya.

Albert mengatakan, untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan nyaman untuk investor, harus ada kepastian, kemudahan, dan juga didukung dengan sarana prasarana yang memadai. "Sebagai contoh kita bisa melihat bagaimana pentingnya jalan tol. Coba lihat Dumai. Dumai itu dahulu sebelum ada jalan tol tidak terlalu pesat perkembangannya setelah ada jalan tol, pesat perkembangannya. Hal-hal seperti ini mesti mendapat perhatian oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Dahulu, sambung Albert, Sumbar dianggap sebagai gerbang pintu masuk dan keluar Sumatera bagian barat, namun sekarang semua hasil bumi tidak harus keluar melalui Sumbar. Tapi bisa melalui Kuala Tungkal, Jambi atau Dumai. "Mohon maaf, bukan saya menakutkan, kalau tol Padang - Pekanbaru ini tak kunjung selesai juga bisa habis Sumbar. Kita akan semakin tertinggal," katanya.

Sebelumnya, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Christoveny, saat menghadiri rapat di DPRD Sumbar memaparkan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) triwulan ke IV Tahun 2022 bertengger pada posisi dua terendah, dari 10 provinsi yang ada di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan ke IV Tahun 2022 berada pada angka 4,15 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Sumbar triwulan IV 2022 berada di urutan dua terendah untuk regional Sumatera, atau nomor sembilan dari 10 provinsi yang ada. Jika dilihat secara tahunan, berada pada angka 4,36 persen, tepatnya peringkat tujuh, atau empat terendah di Sumatera," ujarnya.

Ia menambahkan, dilihat secara tahunan, PE Sumbar pada 2022 juga berada di bawah rata-rata nasional, dimana pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,31 persen, dan juga di bawah Sumatera yang sebesar 4,69 persen.

Jika dibandingkan sebelum Covid-19, kata Atika, sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi Sumbar jauh lebih baik, angkanya hampir sama dengan rata-rata Sumatera, yakni di kisaran 5 sampai 6 persen, namun setelah Covid-19, untuk saat ini Sumbar masih di bawah rata-rata Sumatera.

Ia memaparkan, dari sisi pengeluaran, yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan IV adalah konsumsi rumah tangga dan investasi dalam bentuk penanaman modal asing.

Kemudian dari sisi lapangan usaha, ada lima pangsa atau lapangan usaha utama yang mendorong perekonomian Sumbar, yakni pertanian, perdagangan, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, dan konstruksi.

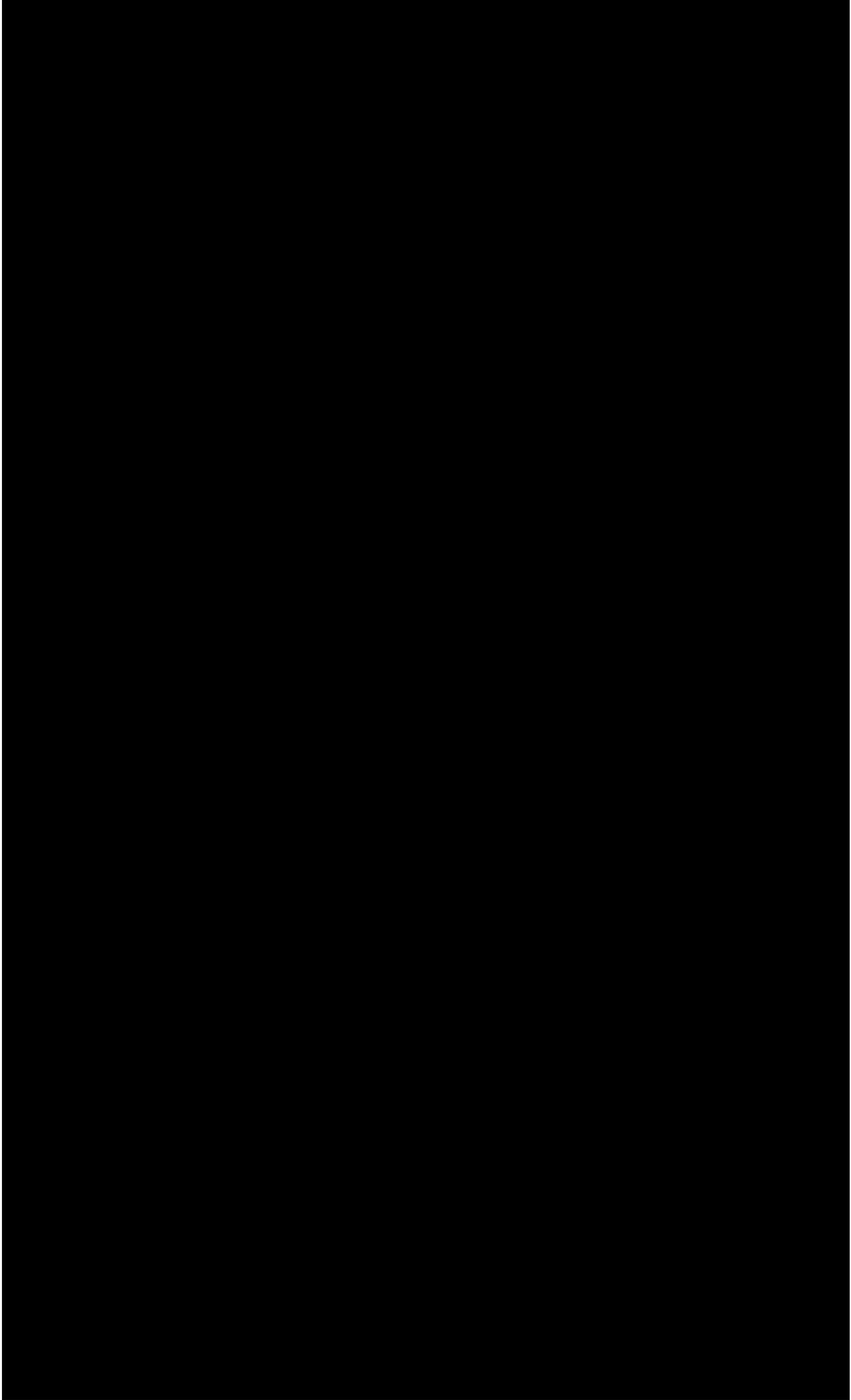
Bicara pertumbuhan, lima sektor ini ada yang trennya lambat, dan ada yang meningkat. Sektor yang cenderung melambat yaitu pertanian, dari yang sebelumnya berada pada angka 23 persen menjadi 21 persen. Begitupun industri pengolahan dari 8,9 persen, turun menjadi 8,5 persen.

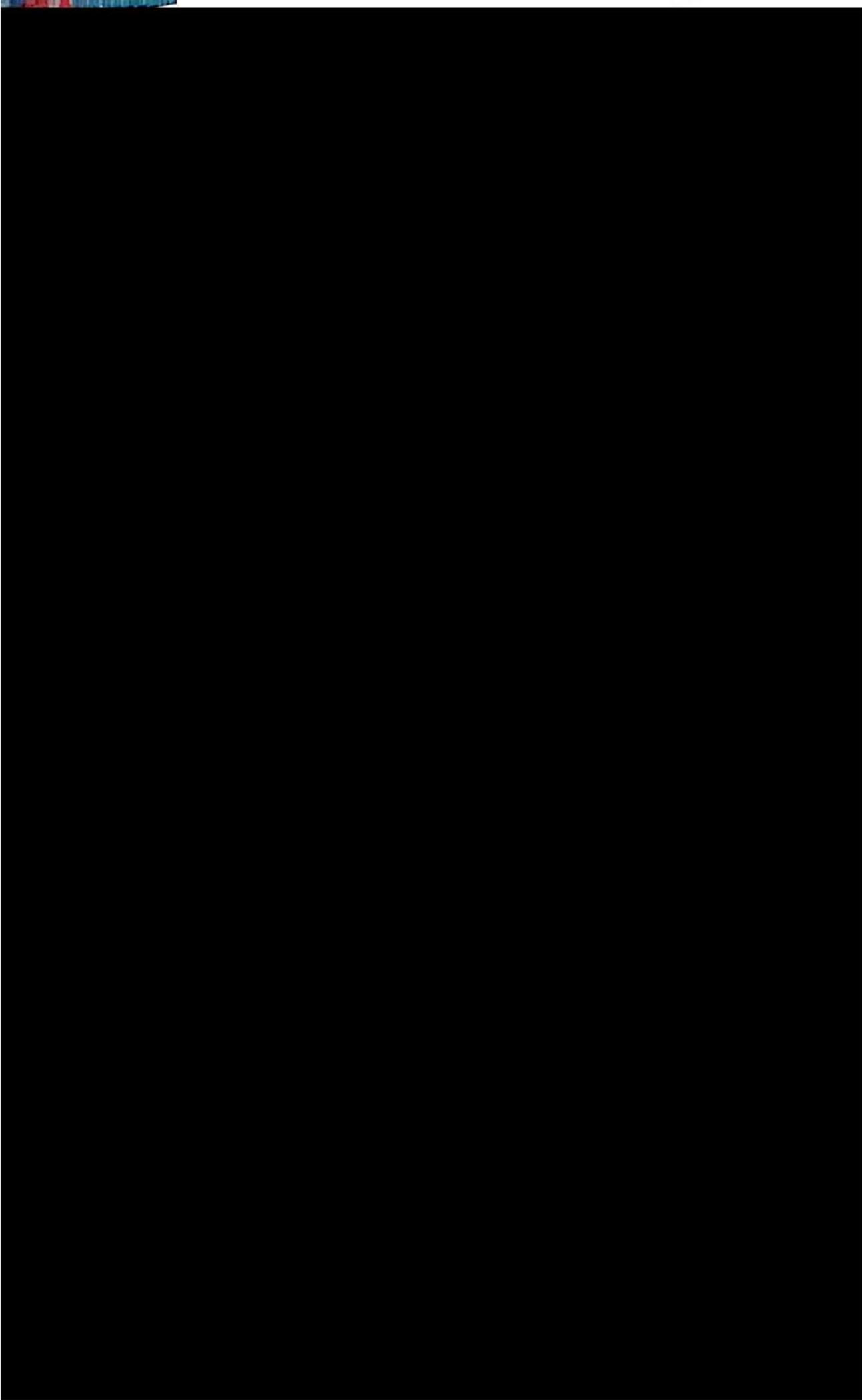
Sementara sektor yang trennya meningkat adalah transportasi dan pergudangan, perdagangan, serta akomodasi dan penyediaan makan minum. "Kami menilai yang mendorong peningkatan sejumlah sektor ini adalah masuknya wisatawan nusantara dan wisatawan asing ke Sumatera Barat. Meningkatnya sektor transportasi dan pergudangan, perdagangan, serta akomodasi dan penyediaan makan minum, ini merupakan potensi yang perlu dikembangkan oleh Sumbar, tepatnya dari sisi pariwisata. Hal ini sejalan dengan potensi alam dan kuliner yang dimiliki Sumatera Barat," tukasnya.

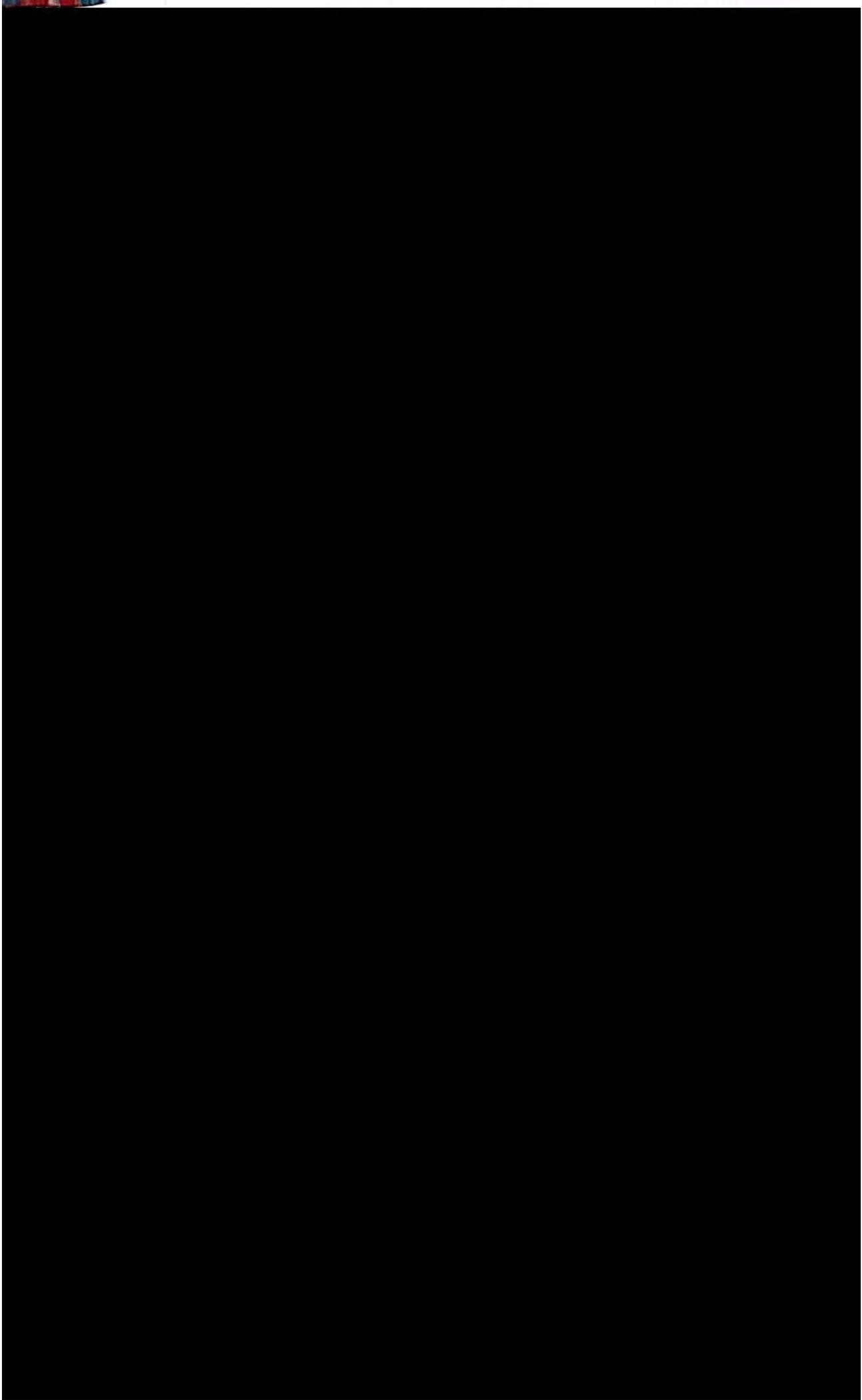
Lebih lanjut Ia menyampaikan, berdasarkan analisis Interregional Input Output (IRIO) yang juga dilakukan pihaknya, sektor kunci yang seharusnya dikembangkan Sumbar berdasarkan kondisi saat ini adalah transportasi. Sektor transportasi Ia nilai memegang peranan penting dalam mendorong PE Sumatera Barat ke depan. (len)

HALAMAN











KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Sabtu, 11 Maret 2023 (19 Syaban 1444 H)	1

Perbaikan Jalan Lurah Ampalu Mudahkan Warga 15 Korong



Masyarakat Nagari Lurah Ampalu saat pertemuan dengan Anggota DPRD Sumbar, Jasma Juni Dt. Gadang, Rabu (8/3) lalu di Kantor Wali Nagari itu. (1st)

PD.PARIAMAN - Warga Nagari Lurah Ampalu, VII Koto Sungai Sarik, Padang Pariaman, berharap pemerintah provinsi memperbaiki jalan lingkung yang ada di daerah itu, tepatnya di Korong Simpang. Perbaikan jalan tersebut menurut warga,

sangat penting untuk kemudahan aktivitas masyarakat di 15 korong yang ada di nagari itu.

Hal tersebut disampaikan warga saat pertemuan dengan Anggota DPRD Sumbar, Jasma Juni Dt. Gadang, Rabu (8/3) lalu di kantor walinagari setempat.

Walinagari Lurah Ampalu, Ais Surya mengatakan, pihaknya telah mengusulkan bantuan perbaikan jalan lingkung tersebut agar bisa libiyai oleh APBD Provinsi Tahun 2023. "Kami berharap pengajuan bantuan kami ini bisa erlaksana. Jika jalan lingkung ini dalam kondisi bagus, maka akan amat membantu mobilitas masyarakat yang ada di 15 korong," ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, kondisi jalan tersebut memprihatinkan. Ada banyak kerusakan di sejumlah ruas jalan itu.

Menanggapi permintaan tersebut, Jasma Juni, mengatakan, infrastuktur jalan yang baik menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat. Kemudahan mobilitas masyarakat

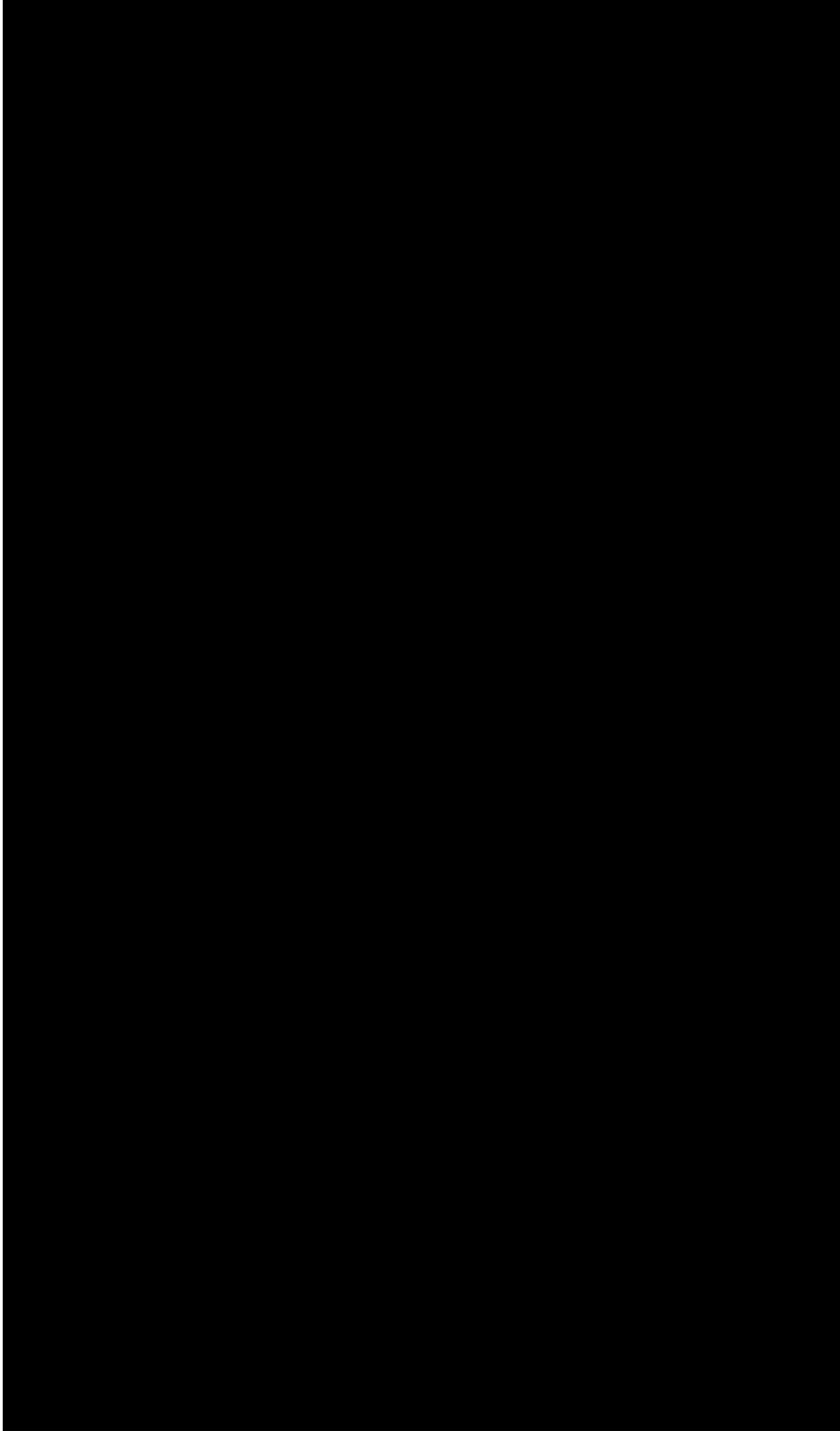
akan berpengaruh pula pada aktivitas masyarakat sehari-hari dan akan ikut mempengaruhi pula perekonomian daerah itu.

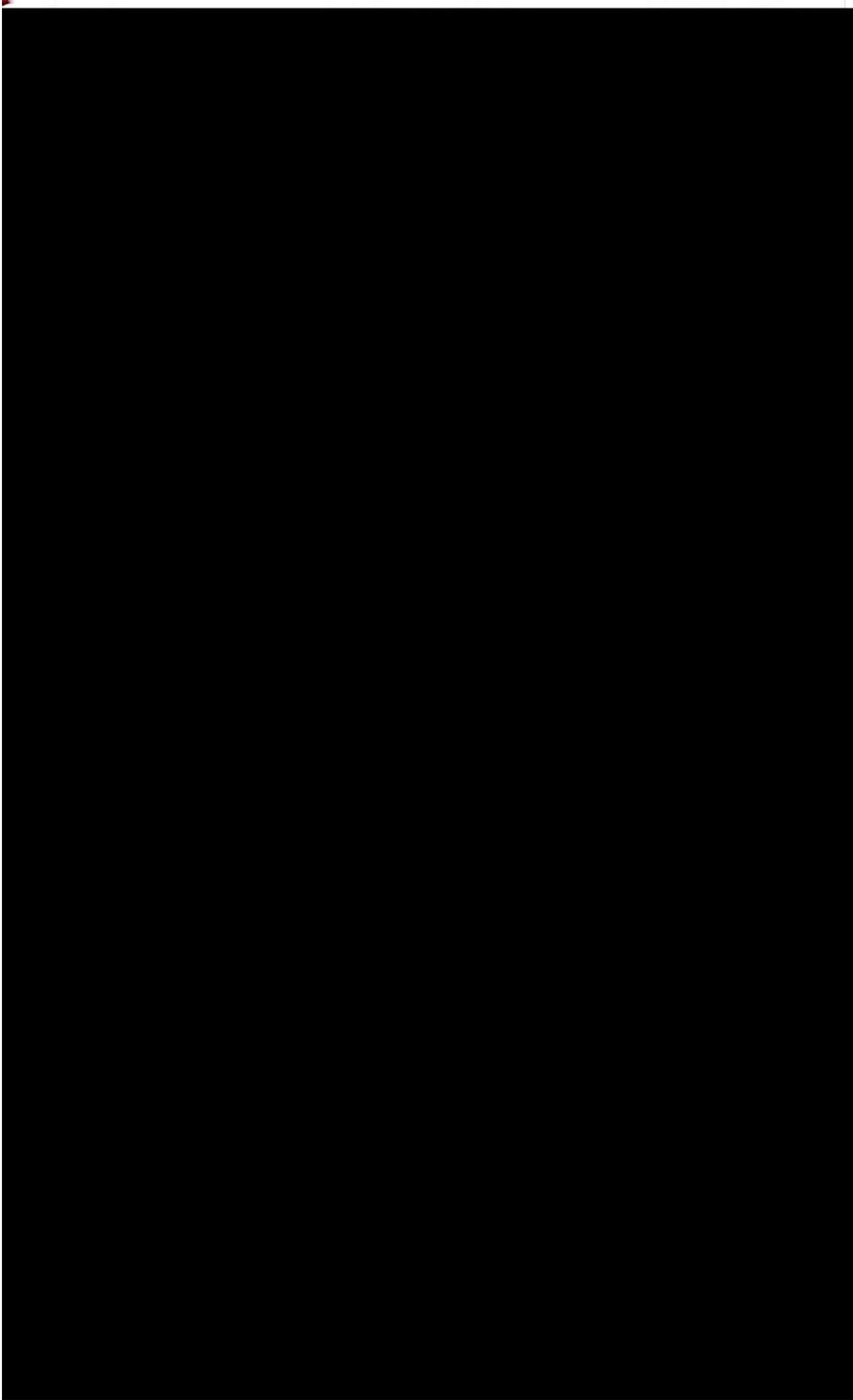
Jasma Juni mengatakan, permintaan perbaikan jalan di nagari Lurah Ampalu akan ia perhatikan. "Terlebih dahulu akan kita telusuri dulu status jalan tersebut, apakah jalan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten," katanya.

Jika jalan tersebut kewenangan kabupaten maka pemerintah provinsi tidak bisa memperbaikinya. "Namun, untuk tahun 2023 ini, sudah ada program APBD provinsi yang akan terlaksana di Nagari Lurah Ampalu. Di antaranya bantuan perbaikan masjid dan surau serta bantuan bibit tanamam produktif berupa pinang batara dan kopi robusta," katanya.

Tak hanya itu, menurut Jasma Juni, dirinya akan berkoordinasi dengan OPD pemerintah provinsi terkait beberapa usulan masyarakat, seperti masalah pupuk bersubsidi dan bantuan bidang pertanian serta alat mesin pertanian (alsintan). (401)











KLIPING BERITA

KORAN	HARI / TANGGAL	HALAMAN
PADANG	SABTU, 11 MARET 2023	6

Dituduh Diam-diam Pindah Partai, Nofrizon: Saya Pencinta Demokrat dan SBY



NOFRIZON

PADANG, KP - Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat, Nofrizon membantah pernyataan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumbar, Doni Harsiva Yandra terkait dirinya yang diam-diam pindah partai.

Nofrizon saat diwawancarai KORAN PADANG, Jumat (10/3) mengatakan, tidak ada bukti konkrit terkait kepindahannya ke partai lain, hingga sekarang dirinya masih mengikuti kegiatan internal Demokrat, bahkan Senin besok akan mengikuti bimbingan teknis di Jakarta.

"Terkait bimtek dirinya telah berkoordinasi dengan DPP dan memastikan diri untuk ikut, bahkan terkait persoalan ini ada instruksi agar tidak mundur dari partai. Langkah selanjutnya saya akan bertemu dengan ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief untuk mencari titik terang dan berkonsultasi terkait langkah apa yang diambil terkait persoalan dirinya dengan DPD," katanya.

Dia juga membantah telah memperlihatkan kartu tanda anggota (KTA) partai lain atas nama dirinya, hal itu sangat tidak benar dan tidak ada bukti. Semakin DPD Demokrat Sumbar membuat konflik dengan dirinya akan berbuah kerugian pada partai. Jadi jangan korbankan elektabilitas Demokrat hanya untuk berkonflik dengan saya dan menjadi konsumsi publik. "Secara pribadi saya adalah pecinta Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," tegasnya.

Dia mengaku siap akan sikap DPD, jika ingin diperpanjang dirinya akan mengikuti alur yang ada. "Istilahnya jika suka Rock mari kita berdisko, jika suka dangdut mari kita bergoyang, jika suka slow mari kita berdansa biar orang lain yang menikmati," ucapnya.

Menurutnya, jika ada persoalan yang urgen mari diselesaikan dengan kepala dingin, namun terkait ini ia menunggu apapun sikap DPD.

Lebih lanjut disampaikannya, pengurus Demokrat Sumbar harusnya telah memikirkan langkah-langkah

pemenangan pemilu, seperti mengencarkan sosialisasi atau yang lainnya. Kenyataannya sekarang malah sibuk mengurus konflik internal partai, sangat miris akan hal itu.

Persoalan ini bukan berawal dari dirinya, melainkan pihak Ketua DPD Demokrat Sumbar dari penyebaran rekaman pengancaman salah satu pejabat OPD Pemprov Sumbar dan hal-hal yang lainnya.

"Jadi terjadinya konflik seperti sekarang, merupakan kegagalan Ketua DPD Demokrat Mulyadi dalam mengurus partai, banyak internal partai yang berma salah, namun tidak menjadi konsumsi publik, tapi Demokrat dibawah kepemimpinannya terjadi, sangat miris," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Demokrat, Doni Harsiva Yandra mengatakan, salah satu kadernya yang duduk di DPRD Sumbar pernah menyatakan hendak bertubuh ke partai lain.

Kader yang dimaksud yakni Nofrizon yang belakangan menjadi sorotan lantaran aksinya bersumpah dibawah Alquran demi membantah telah mengancam salah seorang kepala bidang (kabid) di Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar tentang pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Seharusnya Nofrizon tidak perlu bersikap super reaktif dengan retorika yang berlebihan seperti itu, tetapi alangkah baiknya mendatangi kabid tersebut, kemudian melakukan klarifikasi bersama apabila memang tidak melakukan pengancaman, sehingga persoalannya selesai.

Menurut Doni, keinginan pindah partai dari Nofrizon merupakan haknya sebagai seorang warga negara, bahkan pria tersebut telah pernah dipanggil oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumbar.

"Itu hak pribadi Nofrizon, tapi tolong kami diberitahu dan pindah secara baik-baik, jangan cerita ke sana ke mari tapi kami sebagai pimpinan partai tidak tahu dan tahunya dari orang lain, tentu ini tidak bagus," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/3).

Namun pada saat dipanggil beberapa bulan lalu, kata Doni, Nofrizon menyampaikan telah mengungkapkan niatnya pindah partai karena berdasarkan informasi yang dia dapat elektabilitas partai yang hendak ia tuju menurun.

Pada saat itu, Partai Demokrat Sumbar mengambil sikap dengan memperingatkan Nofrizon untuk tidak menjadikan partai sebagai alat tujuan kepentingan pribadi semata.

"Ia menyampaikan permohonan maaf dan tak mengulangi lagi perbuatan serupa. Kami tidak ingin disusupi oleh pihak lain, benderanya Partai Demokrat, namun yang dijalankan kebijakan partai politik lain, ini sangat berbahaya," katanya.

Namun, setelah itu, muncul sikap Nofrizon yang dinilai bertentangan dan dianggap merugikan Fraksi Partai Demokrat, sehingga dilakukan rapat. "Dalam rapat

